



UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA

**KEMAMPUAN PANGKALAN UTAMA TNI AL
SEBAGAI PANGKALAN AWAL DALAM MENDUKUNG
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
(Studi Pangkalan Utama TNI AL Lantamal III Jakarta)**

TESIS

**Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar
Magister Bidang Pertahanan**

Oleh

DRI SUATMAJI

120120104094

**FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN
PROGRAM STUDI STRATEGI DAN KAMPANYE MILITER**

**JAKARTA
MARET 2014**

ABSTRAK

Nama : Dri Suatmaji
Program Studi : Program Studi Strategi dan Kampanye Militer
Judul Tesis : Kemampuan Pangkalan Utama TNI AL sebagai Pangkalan Awal dalam Mendukung Penanggulangan Bencana (Studi Pangkalan Utama TNI AL III Jakarta).

Indonesia merupakan negara yang secara geografis terletak pada wilayah cincin api (*Ring of Fire*), sehingga kondisi lingkungannya sangat rawan terhadap berbagai kemungkinan bencana alam seperti gunung meletus, tsunami, tanah longsor, gempa bumi, dan lain-lain. Situasi ini menuntut aksi pemerintah untuk menetapkan suatu mekanisme yang tepat dalam mengantisipasi dan menaggulangi bencana yang terjadi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kemudian dibentuk untuk menangani permasalahan ini. Namun pada dasarnya, tulang punggung upaya-upaya penanggulangan bencana pada akhirnya kembali kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang memiliki kecepatanreaksi dan sangat terorganisir. Hal ini juga sebagai salah satu bentuk manifestasi dari tugas TNI yakni melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Sebagai salah satu komponen TNI, TNI AL dengan kekuatan armadanya, sangat memegang peranan penting dalam melaksanakan pergeseran personel dan barang bantuan yang diperlukan. Dalam pelaksanaannya, pangkalan awal, dimana bantuan berasal dan diorganisir, sangat berpengaruh memberikan dukungan bagi keberhasilan operasi penanggulangan bencana ini. Disini terlihat bagaimana peran sentral Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) III Jakarta sebagai pangkalan awal dalam melaksanakan embarkasi untuk mendukung Penanggulangan Bencana. Namun berdasarkan fakta yang ditemukan dengan melihat pengalaman penanggulangan bencana selama kurun waktu 2004-2013, peran ini belum berjalan optimal karena adanya beberapa permasalahan pada aspek sumber daya manusia, organisasi dan sarana di Lantamal III Jakarta. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk mengukur tingkat kemampuan Lantamal III Jakarta dalam melaksanakan OMSP Penanggulangan Bencana. Berdasarkan penelitian ini didapatkan bahwa solusi praktis terhadap aspek SDM, organisasi dan sarana dapat dilakukan dengan kesinergian dengan *stake holder* lainnya serta penerapan manajemen yang tepat.

Kata kunci: Lantamal III Jakarta, Embarkasi, Penanggulangan Bencana.

ABSTRACT

Name : Dri Suatmaji
Study Program : *Strategy and Military Campaign (Strategi dan Kampanye Militer)*
Thesis Title : *The ability of Naval Main Base as Initial Base to Support MOOTW Dealing with Natural Disaster Relief (Study of the 3rd Naval Main Base Jakarta).*

Geographically, Indonesia lies on the Ring of Fire, thus vulnerable to a variety of natural disasters such as volcanic eruptions, tsunamis, landslides, earthquakes, and others. This situation required alertness and the need to establish an appropriate mechanism to respond and deal with potential disasters and its impacts. The National Disaster Management Agency (BNPB) then formed to address these issues. However, the backbone of disaster relief efforts turns to the Indonesian Armed Forces (TNI), which is responsive and very organized. This is also as part of implementation of its tasks that to perform Military Operations Other Than War (MOOTW). As one of the military services, the Indonesian Navy with the fleet plays an important role in mobilising personnel and distributing the needed supplies. In practice, the initial base, where the supplies come and organized, is very influential to provide support for successful operations. Here we can see how the central role of the Naval Main Base (Lantamal) III Jakarta as an initial base to support MOOTW dealing with disaster. Nevertheless, based on the facts found by looking at the experience of disaster management during the period 2004-2013, this role has not been optimised due to some problems in human resources, organization and facilities in Lantamal III Jakarta. Thus, this study will measure the ability of Lantamal III Jakarta in executing MOOTW for disaster relief. This study found that practical solutions to address indicated problems in human resources, organization and facilities, can be afforded with stakeholders synergy and the implementation of appropriate management.

Keywords: *The 3rd Main Naval Base Jakarta, Embarkation, disaster relief.*

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab, atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Jakarta, Maret 2014

(Dri Suatmaji)

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Pertahanan pada Program Studi Strategi dan Kampanye Militer, Universitas Pertahanan Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dalam bentuk bimbingan, saran, tanggapan dan diskusi, selama proses penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini dengan baik. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Setyo Harnowo, Drg, Spbm (K), FICD, FICCDE dan Dr. Abdul Rivai Ras, MM, MMS selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing saya dalam penyusunan tesis ini;
2. Rektor Universitas Pertahanan Indonesia beserta seluruh staf dan jajarannya, Tim Penguji, serta narasumber yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuandalam proses penulisan dan pengujian tesis ini;
3. Orang tua, istri dan buah hati kami tercinta yang selalu memberikan dorongan moril yang tak terhingga; dan
4. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi bagi pelaksanaan kuisisioner serta pengembangan ide penulisan ini.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu, dan semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, Maret 2014

Penulis

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Pertahanan Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dri Suatmaji
NPM : 129120104094
Program Studi : Program Studi Strategi dan Kampanye Militer
Sekolah : Strategi Pertahanan
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

KEMAMPUAN PANGKALAN UTAMA TNI AL SEBAGAI PANGKALAN
AWAL DALAM Mendukung Penanggulangan Bencana
(Studi Pangkalan Utama TNI AL III Jakarta)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Pertahanan Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta/karya Intelektual dari Tesis ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jakarta, Maret 2014

Yang Menyatakan

Dri Suatmaji

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Batasan Penelitian.....	6
1.6 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	8
2.1 Tinjauan Pustaka	8
2.1.1 Operasi Militer Selain Perang (OMSP)	8
2.1.2 Teori Sinergitas	11
2.1.3 Teori Organisasi	12

2.1.4	Bencana Alam	17
2.1.5	Manajemen Kedaruratan	27
2.1.6	Konsep Kampanye Militer	30
2.1.7	Konsep Pangkalan.....	31
2.2	Karya Ilmiah Terdahulu	33
2.3	Kerangka Pemikiran	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		38
3.1	Desain Penelitian.....	38
3.2	Teknik Pengumpulan Data	38
3.3	Pengujian Keabsahan Data	43
3.4	Lokasi dan Waktu Penelitian	44
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA.....		46
4.1	Hasil Penelitian	46
4.1.1.	Deskripsi Lantamal III	46
4.1.2.	Sumber daya Manusia Lantamal III.....	48
4.1.3.	Organisasi Lantamal III	49
4.1.4.	Sarana Embarkasi LantamalIII	54
4.1.5.	Deskripsi Embarkasi Sumber daya	64

4.2 Pembahasan	64
4.2.1. Analisis Sumberdaya Manusia Lantamal III	64
4.2.2. Analisis Organisasi Lantamal III.....	78
4.2.3. Analisis Sarana Embarkasi Lantamal III	82
4.2.4. Analisis Sarana Informasi.....	85
4.3 Analisis Pelaksanaan Embarkasi Sumberdaya.....	87
4.3.1. Analisis berdasarkan Teori Sinergitas.....	87
4.3.2. Analisis berdasarkan Teori Manajemen	89
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	102
5.1 Kesimpulan	102
5.2 Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	106

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Metode untuk Setiap Variabel.....	40
Tabel 3.2 Panduan untuk Pemberian Skor	43
Tabel 3.3 Rencana Jadwal Penelitian	45
Tabel 4.1 Komposisi Prajurit TNI AL dan PNS di Lantamal III.....	48
Tabel 4.2 Jumlah SDM Lantamal III yang Terlibat Embarkasi	52
Tabel 4.3 Kesiapan Sarana Informasi Lantamal III	62
Tabel 4.4 Penilaian Kompetensi Prajurit TNI AL Lantamal III	65
Tabel 4.5 Budaya Organisasi Lantamal III	67
Tabel 4.6 Konsep Diri Prajurit TNI AL di Lantamal III	70
Tabel 4.7 Motivasi Tugas Prajurit TNI AL di Lantamal III	71
Tabel 4.8 Disiplin Prajurit TNI AL di Lantamal III	74
Tabel 4.9 Ketercapaian Visi dan Misi Organisasi Lantamal III	79
Tabel 4.10 Kesiapan Sarana Fisik Lantamal III	82
Tabel 4.11 Kesiapan Sarana Informasi Lantamal III.....	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta <i>Ring of Fire</i>	1
Gambar 2.1 Manajemen Penanggulangan Bencana	26
Gambar 2.2 Penanggulangan Bencana	27
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian	37
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kerja Lantamal	48
Gambar 4.2 Personel Lantamal III.....	49
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Lantamal III	50
Gambar 4.4 Organisasi Embarkasi Lantamal III Jakarta	54
Gambar 4.5 Dermaga Operasional Lantamal III, Pondok Dayung .	55
Gambar 4.6 Dermaga <i>Beaching</i> Lantamal III	57
Gambar 4.7 Bengkel Fasharkan Lantamal III.....	58
Gambar 4.8 Mobil Genset Lantamal III.....	61
Gambar 4.9 Proses Embarkasi	94
Gambar 4.10 Proses Embarkasi	94

DAFTAR LAMPIRAN

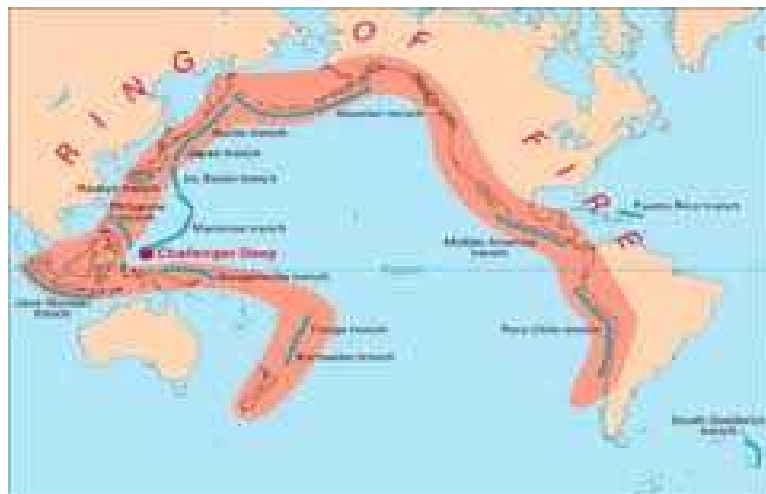
Lampiran 1: Dokumentasi Observasi dan Kegiatan Wawancara ...	L-1-1
Lampiran 2: Pedoman Wawancara	L-2-1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana. Secara geografis NKRI merupakan negara yang memiliki risiko bencana alam yang cukup tinggi. Tingginya risiko Indonesia karena secara geologis letak wilayah Indonesia dilalui oleh dua jalur pegunungan muda dunia yaitu Pegunungan Mediterania di sebelah barat dan Pegunungan Sirkum Pasifik di sebelah timur atau dapat disebut bahwa posisi geografi Indonesia berada di cincin api (*ring of fire*).¹



Gambar 1.1 Peta *Ring of Fire*

Sumber: Maarif, S. 2010

Ditinjau dari perspektif geologi, kondisi geologi negara Indonesia terdiri dari pertemuan tiga lempeng raksasa bumi (*earth*) yakni; Lempeng

¹ Maarif, S. 2010. Bencana dan Penanggulangannya: Tinjauan dari Aspek Sosiologis. *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*, 1(1):1-7.

Pasifik, Lempeng Eurasia dan Lempeng Samudera Hindia Australia yang senantiasa bergerak secara evolusi namun pasti dapat memberikan akibat terjadinya bencana alam yang meliputi; gempa bumi, tsunami, gunung berapi, gerakan tanah (tanah longsor) serta bencana yang diakibatkan oleh lingkungan yang meliputi kebakaran hutan, kerusakan lingkungan dan pencemaran.

Hal ini terbukti dengan terjadinya beberapa kali gempa dan bencana alam lainnya seperti tsunami. Kerugian yang ditimbulkan oleh bencana tersebut sangat besar dan menimbulkan kerugian material dan jiwa yang besar. Sumatera Barat berada di antara pertemuan dua lempeng benua besar (lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia) dan patahan (sesar) Semangko. Di dekat pertemuan lempeng terdapat patahan Mentawai. Ketiganya merupakan daerah seismik aktif.

Mencermati kenyataan tersebut maka untuk dapat mewujudkan pencegahan, penanggulangan dan pengurangan risiko (mitigasi) akibat terjadinya bencana alam harus dilakukan oleh seluruh elemen bangsa termasuk Tentara Nasional Indonesia khususnya TNI Angkatan Laut.

Untuk dapat mewujudkan peran TNI AL tersebut diperlukan suatu strategi yang baik dan terencana, sehingga upaya penanggulangan, pencegahan, pengurangan beban penderitaan (mitigasi) pada masa prabencana, masa tanggap darurat dan masa pasca bencana dapat dilakukan secara tepat dan cepat. TNI AL selaku alat pertahanan Negara bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara dan keutuhan wilayah laut sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10, UU No. 3 Tahun 2002. Disamping melaksanakan tugas pokoknya, dalam kerangka operasi militer selain perang. Keterlibatan TNI AL dalam operasi penanggulangan bencana merupakan hal yang sangat penting.

Keberadaan Pangkalan TNI Angkatan Laut sebagai alat pertahanan negara pada masa damai maupun perang sangat diperlukan untuk menindak dan mengantisipasi datangnya ancaman terhadap kedaulatan negara. Dalam masa damai dapat diwujudkan dalam Operasi

Militer Selain Perang (OMSP) untuk mengantisipasi kondisi darurat akibat bencana alam dengan menjadi pangkalan awal pada operasi penanggulangan bencana.

Salah satu Pangkalan Utama TNI AL yang memegang peran penting sebagai pangkalan awal untuk melaksanakan Operasi Penanggulangan Bencana di wilayah barat Indonesia adalah Lantamal III yang terletak di kota Jakarta. Ada dua alasan utama bagaimana Lantamal III memiliki kemampuan sebagai pangkalan awal untuk mendukung Operasi Penanggulangan Bencana alam. Yang pertama, pada saat bencana terjadi, tanggapan daerah cenderung lambat dan seringkali tergantung dengan pusat.² Sehingga peran Jakarta sebagai Ibukota Negara sangat penting dan dalam konteks ini peran Lantamal III sebagai pangkalan TNI AL yang terdapat di Jakarta diharapkan dapat menjalankan fungsinya dengan optimal. Yang kedua, KRI yang melaksanakan mobilisasi logistik bantuan merupakan jajaran Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar)³ dan Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil)⁴ yang terletak di Jakarta. Dalam konteks penanggulangan bencana, Lantamal III memiliki andil besar untuk menyelenggarakan fungsi pangkalan dalam mendukung operasional Koarmabar dan Kolinlamil, terutama pada aspek embarkasi sumberdaya yang dimobilisasi oleh unsur-unsur Koarmabar dan Kolinlamil ke daerah yang terkena dampak bencana. Dengan fakta ini, maka jelas keberhasilan Operasi Penanggulangan Bencana yang terjadi di wilayah barat Indonesia yang menggunakan KRI untuk pergeseran logistik bantuan sangat dipengaruhi oleh kesiapan dan kemampuan Lantamal III.

Dari hasil observasi, wawancara dan analisa hasil sekunder yang dilakukan di lapangan oleh peneliti mengidentifikasi bahwa

² BNPB. Peraturan Ka BNPB No 11 Tahun 2008 ttg Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. 2008

³ Komando Armada Barat. Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut III (PPOP Lantamal III). Keputusan Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat. 2013

⁴ Kolinlamil. Buku Petunjuk Pelaksanaan Penentuan Kesiapsiagaan Operasional Kolinlamil

kemampuan Lantamal III belum optimal dalam mendukung penanggulangan bencana, yang disebabkan oleh beberapa permasalahan yang meliputi; rendahnya kualitas personil Lantamal III dalam melaksanakan embarkasi sumberdaya untuk menangani bencana yang diindikasikan rendahnya kemampuan dalam efisiensi ruang muat kapal, pengetahuan tentang karakteristik bencana alam dan rendahnya kemampuan dalam tata letak barang bantuan sebelum pelaksanaan embarkasi; organisasi embarkasi sumberdaya Lantamal III yang belum melaksanakan tugas dengan optimal yang disebabkan belum adanya pejabat yang secara spesifik menangani bencana alam, organisasi embarkasi belum permanen; dan kurangnya sarana yang dimiliki Lantamal III untuk mendukung pelaksanaan embarkasi diantaranya tidak memiliki gudang khusus yang digunakan untuk menyimpan barang-barang bantuan, sehingga barang-barang bantuan banyak yang rusak diembarkasi ke KRI; sarana dermaga yang tidak dilengkapi dengan infrastruktur jalan, pelaksanaan pengiriman barang bantuan terhambat, karena menggunakan dermaga pelabuhan umum.

Pada kejadian bencana alam yang terjadi pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2013, diantaranya adalah terjadinya gempa bumi yang diikuti oleh Tsunami di Aceh, kejadian bencana gempa bumi di kepulauan Mentawai, gempa bumi di Bengkulu pada tahun 2007, Gempa Bumi di Padang pada tahun 2008.⁵ Kemampuan Lantamal III pada saat itu belum mampu sebagai Pangkalan Awal penanggulangan bencana alam.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam kemampuan Lantamal III dalam mendukung tugas TNI dalam Operasi Militer Selain Perang pada penanggulangan bencana khususnya bidang embarkasi sumberdaya di Lantamal III. Hal ini penting untuk dibahas, mengingat NKRI berada di wilayah cincin api dunia (*ring of fire*)

⁵ Ihsan, Daftar Kerugian Bencana Alam di Indonesia sepanjang 2004-2013, diunduh dari <http://wartaekonomi.co.id/berita23462/ini-daftar-kerugian-bencana-alam-di-indonesia-sepanjang-20042013.html>

yang memberikan pengaruh terhadap adanya bencana alam setiap tahun yang disebabkan oleh adanya pergerakan lempeng bumi. Dengan adanya penelitian ini diharapkan kemampuan Lantamal III akan menjadi contoh bagi pengembangan tugas-tugas pangkalan TNI AL di tempat lain dalam meningkatkan kemampuannya dalam mendukung tugas TNI. Untuk itu judul tesis ini adalah “Kemampuan Pangkalan Utama TNI AL sebagai Pangkalan Awal dalam Mendukung Penanggulangan Bencana Alam.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1.2.1. Bagaimana kemampuan Sumberdaya Manusia Pangkalan Utama TNI AL III dalam melaksanakan embarkasi sumberdaya untuk mendukung penanggulangan bencana alam?

1.2.2. Bagaimana organisasi Pangkalan Utama TNI AL III dalam melaksanakan embarkasi sumberdaya untuk mendukung penanggulangan bencana alam?

1.2.3. Bagaimana dukungan sarana Pangkalan Utama TNI AL III dalam pelaksanaan embarkasi sumberdaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, dihadapkan dengan tuntutan dan tantangan tugas yang dihadapi oleh Lantamal III dalam mendukung penanggulangan Bencana alam, maka ada beberapa hal yang ingin diketahui dan menjadi tujuan penelitian, antara lain :

1.3.1. Menganalisis kemampuan Sumberdaya Manusia Pangkalan Utama TNI AL III dalam melaksanakan embarkasi sumberdaya untuk mendukung penanggulangan bencana alam.

1.3.2. Menganalisis kemampuan organisasi Pangkalan Utama TNI AL III dalam melaksanakan embarkasi sumberdaya untuk mendukung penanggulangan bencana alam.

1.3.3. Menganalisis dukungan sarana Pangkalan Utama TNI AL III dalam melaksanakan embarkasi sumberdaya untuk mendukung penanggulangan bencana alam.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Teoritis. Implikasi teoritis dari penelitian terhadap kemampuan Lantamal III sebagai pangkalan awal dalam mendukung pengurangan bencana alam ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan studi Manajemen Bencana dalam bidang penanggulangan bencana khususnya pada aspek embarkasi sumberdaya, serta memberikan masukan tinjauan pada teori-teori yang digunakan khususnya teori sinergitas dan teori manajemen.

1.4.2. Praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi para pengambil kebijakan, dalam meningkatkan peran TNI AL dalam Operasi Militer Selain Perang terhadap penanggulangan bencana alam.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan batasan kegiatan embarkasi sumberdaya dan organisasi yang mendukung terlaksananya penanggulangan bencana alam yang dilakukan oleh Lantamal III dengan menggunakan fasilitas yang ada di Lantamal selama tahun 2004 s.d 2013.

1.6 Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun/ditulis dalam 5 (lima) bab dengan rincian sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Tujuan dari bab ini adalah menggambarkan kondisi yang menjadi permasalahan penelitian dan apa saja yang dapat dihasilkan oleh penelitian yang diarahkan pada permasalahan tersebut.

Bab 2 Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran. Bab ini berisikan tinjauan pustaka, gambaran mengenai teori-teori pangkalan, manajemen penanggulangan bencana konsep-konsep yang berkaitan dengan peran dan fungsi Pangkalan TNI Angkatan Laut yang meliputi asumsi/anggapan dasar, definisi operasional, pembahasan penelitian yang pernah dilakukan oleh pihak lain dan kerangka pemikiran.

Bab 3 Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan bagaimana penggambaran mengenai desain penelitian dijalankan. Di dalamnya dijelaskan tentang metodologi penelitian yang menggunakan metode kualitatif, serta uraian mengenai pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, teknik pemilihan narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan rencana pengujian keabsahan data.

Bab 4 Hasil Pembahasan dan Analisa. Bab ini berisikan pembahasam dan analisa mengenai hasil penelitian yang di dalamnya terdapat gambaran umum obyek penelitian, yakni mengenai kemampuan Pangkalan TNI Angkatan Laut III Jakarta dalam melaksanakan embarkasi untuk mendukung penggulungan bencana alam dan pembahasan hasil penelitian yang dikaitkan dengan teori-teori yang relevan.

Bab 5 Kesimpulan dan Saran. Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan rekomendasi yang dikemukakan berdasarkan hasil pembahasan dan analisa tentang peningkatan kemampuan Pangkalan TNI AL dalam mendukung penanggulangan bencana alam diantaranya peningkatan kemampuan personel penambahan organisasi penanggulangan bencana dan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana .

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Operasi Militer Selain Perang (OMSP)

OMSP merupakan bagian dari operasi militer secara umum. Operasi militer itu sendiri secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan militer dilakukan secara terencana untuk menyelesaikan tugas tertentu, baik untuk menghadapi kekuatan militer negara musuh yang hendak atau telah dilakukan terhadap negara kita dan ataupun tugas-tugas selain menghadapi militer atau musuh. Pengelompokan tugas itu kemudian dalam undang-undang disebut Operasi Militer Perang (OMP) dan tugas operasi militer selain perang (OMSP).⁶

Berdasarkan Pasal 7 ayat 2 huruf b Undang-Undang TNI, jenis operasi militer selain perang adalah: (1) Mengatasi gerakan separatisme bersenjata; (2) Mengatasi pemberontakan bersenjata; (3) Mengatasi aksi terorisme; (4) Mengamankan wilayah perbatasan; (5) Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis; (6) Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri; (7) Mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta keluarganya; (8) Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta; (9) Membantu tugas pemerintahan di daerah; (10) Membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang; (11) Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia; (12) Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan; (13) Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*); (14) Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

⁶ Letjen TNI, J Suryo Prabowo dalam tulisannya Operasi Militer Selain Perang, 2012

Dari keempatbelas jenis operasi militer selain perang yang disebutkan diatas, secara umum dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu operasi militer selain perang dengan kekuatan senjata dan operasi militer selain perang tanpa kekuatan senjata. Yang termasuk kepada kategori yang pertama antara lain mengatasi gerakan separatisme bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata, mengatasi aksi terorisme, dan membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Keempat operasi diatas merupakan sebuah bentuk operasi militer selain perang yang secara langsung menggunakan kekuatan senjata dalam pelaksanaannya. Selebihnya menggunakan kekuatan non-bersenjata atau pada beberapa poin seperti pengamanan dalam keadaan bersenjata yang dapat digunakan sewaktu-waktu.

Salah satu sebab bahwa operasi militer selain perang menjadi bagian dari tugas pokok TNI adalah dari berkembangnya perspektif ancaman di abad ke-21. Perubahan perspektif ancaman dari ancaman tradisional menjadi ancaman non-tradisional. Ancaman tradisional yang pada masa lalu hanya berasal dari negara-negara saat ini sudah bergeser dimana di dalam ancaman non-tradisional sumber ancaman tidak hanya berasal dari negara-negara saja. Ancaman non-tradisional menuntut adanya upaya mempertahankan kedaulatan dan juga integritas kewilayahan suatu negara dari segala bentuk ancaman.

Perubahan bentuk ancaman ini menuntut juga adanya peran lebih dalam upaya mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia. Peranan tersebut kemudian menjadi salah satu peranan yang diemban TNI sebagai alat pertahanan negara di Indonesia. Hal ini juga diperkuat sebagaimana telah diterangkan diatas bahwa TNI memiliki kemampuan untuk melaksanakan dan mengemban peran tersebut.

TNI sebagai alat pertahanan negara di Indonesia adalah sebuah institusi yang memiliki kemampuan pengerahan dalam waktu singkat dengan kesiapan yang tinggi. Hal ini berkaitan dengan kemampuan TNI

yang, walaupun pada dasarnya dibina untuk operasi militer perang, memiliki kemampuan untuk melakukan operasi militer selain perang berdasarkan pengalaman TNI di masa lalu yang terus dikembangkan hingga saat ini. Kemampuan yang dimiliki TNI ini yang bersumber dari pengalaman di masa lalu menjadikan TNI sebagai aktor pelaksana operasi militer selain perang yang efektif.

Selain itu patut diperhatikan mengenai kondisi sosial masyarakat Indonesia yang berbeda dengan negara-negara lain. Bahwa pada awal pendiriannya hingga saat ini fakta bahwa TNI dibentuk dari rakyat Indonesia dan hingga saat ini menyandang jati diri sebagai tentara rakyat menunjukkan keterlibatan yang erat antara prajurit TNI dengan rakyat yang dilindunginya. Prajurit TNI dituntut untuk lebih bisa memahami dinamika dalam masyarakat mengingat asalnya yang dari rakyat itu sendiri, dimanapun mereka ditugaskan.

Heterogenitas masyarakat Indonesia sendiri merupakan tantangan yang besar dan bisa jadi merupakan potensi ancaman untuk kedaulatan dan integritas Indonesia. Keragaman dalam budaya, agama, dan bahasa menjadikan Indonesia negara yang selain rentan konflik juga memberikan tantangan yang besar dalam proses tanggap bencana maupun mengatasi konflik. Dalam keadaan yang beragam ini, prajurit TNI berpotensi menjadi aktor yang dalam operasi militer selain perang dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif. Hal ini juga terkait dengan Sistem Pertahanan Negara yang saat ini dianut oleh Indonesia.

Pada Undang-Undang TNI Pasal 1 angka 6 bahwa Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah. Negara Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.

Lebih rinci lagi terkait operasi militer selain perang, diterangkan juga bahwa peran TNI adalah memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta. Hal ini semua berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana pada ayat (2) ditegaskan bahwa usaha pertahanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yaitu bahwa Tentara Nasional Indonesia merupakan kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Keterangan-keterangan di dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan yang disebutkan diatas menunjukkan pelibatan aktif TNI dalam usaha mempertahankan negara yang di dalamnya termasuk upaya memberdayakan rakyat Indonesia dalam mempertahankan negara. Pelatihan maupun pembinaan warga negara merupakan salah satu spektrum yang terbangun di dalamnya.

Terkait operasi militer selain perang hal ini menunjukkan pentingnya keterlibatan peran masyarakat dalam peran aktif yang dilakukan TNI seandainya dilaksanakan sebuah operasi militer selain perang. Hal ini adalah salah satu keunikan dan mungkin dapat dikatakan sebagai salah satu keunggulan dari Indonesia pada satu sisi dimana sisi lainnya adalah keberagaman yang berpotensi menjadi ancaman bagi Indonesia. Konteks ini dapat dilihat pada pelaksanaan penanggulangan bencana alam, dan pada penelitian ini dapat dilihat secara spesifik bagaimana keterlibatan masyarakat dan instansi terkait dalam melaksanakan embarkasi sumberdaya untuk membantu masyarakat yang terkena bencana.

2.1.2 Teori Sinergitas

Koordinasi dan sinergitas antara aparaturnya pemerintahan baik pusat dan daerah serta TNI AL dalam hal ini Lantamal III Jakarta guna meningkatkan peran untuk penanggulangan dan pengurangan risiko terjadinya bencana alam pada tahap prabencana, tanggap darurat dan

pasca bencana akan sangat mempengaruhi keberhasilan dan keefektifan dalam upaya tersebut. Dalam teori sinergitas dikenal tiga pola yang meliputi;⁷

2.1.2.1. *Defensif*. Tingkat kerjasama dan kepercayaan yang rendah akan mengakibatkan pola hubungan komunikasi yang bersifat pasif/ defensif.

2.1.2.2. *Respectful*. Tingkat kerjasama dan kepercayaan yang meningkat memunculkan suatu pola komunikasi yang bersifat kompromi saling menghargai.

2.1.2.3. *Synergistic*. Dengan kerjasama yang tinggi serta saling mempercayai akan menghasilkan pola komunikasi yang bersifat sinergitas (*simbiosis mutualisme*) yang berarti bahwa kerjasama yang terjalin akan menghasilkan *output* yang jauh lebih besar dari jumlah hasil keluaran masing-masing pihak.

Pada pelaksanaan penanganan bencana, terutama pada pelaksanaan embarkasi, terjadi sinergitas yang relevan dengan teori sinergitas itu sendiri. Dimana pada konteks ini, sinergitas pada keterlibatan semua *stakeholder* sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan embarkasi yang dilakukan.

2.1.3 Teori Organisasi

Peningkatan produktifitas sebuah organisasi dapat diwujudkan oleh organisasi yang efektif dengan sumber daya manusia dan material yang melakukan kombinasi upaya secara kolektif dan sinergi, berupa pengintegrasian tugas-tugas yang terspesialisasi.⁸ Menurut John Prince Jones (1955), dalam bukunya *Organization for Public Relation*, mendefinisikan bahwa organisasi telah dilukiskan sebagai sebuah sistem. Organisasi adalah struktur dan peralatan yang tersusun dari orang-orang

⁷Sri Najiyati, Rahmat Topo Susilo, 2011, *Sinergitas Instansi Pemerintah Dalam Pembangunan*, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Ketransmigrasian, Kemenakertrans, Jakarta. Hal 3.

⁸Winardi, 2003, *Teori organisasi dan pengorganisasian*, raja Grafindo Persada, hal.21.

dan benda-benda dimana suatu usaha berencana yang teratur dijalankan.⁹ Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti mengartikan bahwa meneliti tentang organisasi tentunya akan membahas 3 (tiga) komponen organisasi yaitu struktur, peralatan dan personel pengawak peralatan dalam organisasi tersebut. Oleh karena itu mengadakan penelitian tentang Kemampuan Pangkalan TNI AL III harus dilaksanakan secara mendalam terhadap organisasi, peralatan dan perlengkapan pendukung serta personel pengawak organisasi dalam mendukung penanggulangan bencana alam.

Hal ini dikatakan sangat penting karena variabel tersebut merupakan indikator untuk mengetahui kemampuan dari Lantamal III dalam melaksanakan embarkasi sehingga dapat dinilai bahwa teori ini relevan dengan penelitian yang dilakukan. Untuk jelasnya, dibawah ini akan dijelaskan mengenai komponen-komponen yang menjadi variabel dari organisasi.

2.1.3.1 Komponen Personil

Komponen personel adalah komponen sumberdaya manusia dari usaha Lantamal III dalam mendukung penanggulangan bencana. Sumberdaya manusia secara umum dibagi menjadi dua jenis yaitu sumberdaya individual dan sumberdaya kolektif. Sumberdaya individual mencakup personil dan kreativitas, kompetensi, skill sosialnya, dan sejenisnya, sementara sumberdaya kolektif mencakup nilai, budaya, dan filsafat.¹⁰ Meningkatnya investasi pada sumberdaya manusia di organisasi dapat disebabkan oleh rendahnya pertumbuhan tenaga kerja sehingga organisasi mengupayakan bentuk-bentuk pengembangan SDM seperti pendidikan dan pelatihan.¹¹ Langkah ini menghasilkan dua hal pada diri SDM yaitu keunikan dan nilai. Keunikan datang dari kecakapan khusus

⁹Sutarto, 2002, *Dasar-dasar organisasi*, Gadjah Mada University Press, , h.26.

¹⁰ Agndal H, and Nilsson U (2006) "Generation of Human and Structural Capital: Lessons from Knowledge Management" *The Electronic Journal of Knowledge Management* Volume 4 Issue 2, pp 91 - 98, available online at www.ejkm.com, hal. 93.

¹¹ Robert J Willis, Wage Determinants: A Survey and Reinterpretation of Human Capital Earnings Functions, *Itandbook of Labor Economics, Volume L Edited by O. Ashenfelter and R. Layard* , 1986, Elsevier, hal. 539

yang datang dari organisasi dan nilai datang dari kecapakan yang penting secara strategis bagi organisasi.¹² Umumnya pengukuran komponen SDM ini dilakukan lewat pengumpulan informasi tentang persepsi atas kecakapan dan kompetensi dari personil.¹³

Ada banyak cara untuk menilai kesiapan komponen personel dalam suatu operasi. Tidak ada kesepakatan terkait aspek apa saja dari personel yang dapat dinilai. Walau begitu, tujuan akhir dari personel adalah memberikan kinerja terbaik bagi tugas. Ada dua penelitian sebelumnya terkait personel TNI AL. Penelitian Yasa (2013) menemukan hubungan antara profesionalisme dan budaya organisasi terhadap kinerja prajurit TNI AL di Lanal Palembang.¹⁴ Profesionalisme merupakan syarat penting bagi pekerjaan apapun. Walau begitu, profesionalisme tidak cukup untuk menghasilkan suatu pekerjaan yang baik. Budaya organisasi diperlukan untuk meningkatkan kinerja seorang prajurit. Menurut Ira M. Levin, budaya organisasi terdiri dari lima unsur yaitu kepemimpinan, norma dan praktik, kisah dan legenda, tradisi dan ritual, dan simbol.¹⁵ Penelitian kedua dilakukan oleh Yusnaldi (2008) menemukan pengaruh konsep diri, motivasi kerja, dan disiplin kerja terhadap kinerja Prajurit TNI AL di Satuan Kapal Amphibi Komando Armada RI di Kawasan barat (Satfib Armabar).¹⁶ Dari dua penelitian di atas dapat disimpulkan kalau komponen personel dari TNI AL dapat ditinjau dari lima aspek yaitu profesionalisme, budaya organisasi, konsep diri, motivasi tugas, dan disiplin tugas.

Dari segi profesionalisme, kompetensi yang relevan dengan embarkasi mencakup kemampuan melakukan pengamanan di saat

¹² M.L. Lengnick-Hall et al. Strategic human resource management: The evolution of the field. *Human Resource Management Review* 19 (2009) 64–85, hal. 73

¹³ Eko Santoso. 2011. Intellectual Capital in Indonesia: The Influence of Financial Performance of Banking Industry, Doctoral Dissertation, University of Phoenix, hal. 107

¹⁴ Yasa, I.G.M. 2013. Analisis Pengaruh Budaya Organisasi dan Profesionalisme terhadap Kinerja Prajurit TNI AL di Lanal Palembang. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 2(1)

¹⁵ Ira M Levin. 2001. Five Windows Culture Assessment Framework. *Health Progress*, hal. 52; lihat juga penerapannya pada Departemen Pertahanan Australia oleh Carmel McGregor, 2012, *The Review of Employment Pathways for APS Women in the Department of Defence*. Australia Department of Defence

¹⁶ Yusnaldi, 2008. *Pengaruh Konsep Diri, Motivasi Kerja, Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Prajurit TNI AL Di Satuan Kapal Amphibi Komando Armada RI Di Kawasan Barat (SATFIBARMABAR)*

embarkasi dan pengaturan laut sekitar Lantamal III dengan cepat untuk masuk dan keluar kapal untuk operasi OMSP. Kompetensi-kompetensi lain yang diperlukan untuk tugas embarkasi mencakuplah mempercepat proses perbaikan kapal ketika kapal dibutuhkan untuk tugas OMSP, melakukan efisiensi ruang kapal dengan cepat untuk muat personil dan bantuan kemanusiaan, melakukan pengaturan penumpang dan barang dengan efektif, bergerak cepat menuju lokasi bencana, melindungi kapal dari masalah badai, kabut, memadamkan kebakaran di atas kapal, penyelamatan korban di laut, serta pengetahuan tentang karakteristik bencana alam dan dampaknya bagi laut dan kapal.

Budaya organisasi secara umum terdiri dari aspek kepemimpinan, norma dan praktik manajemen, cerita dan tokoh, tradisi dan ritual budaya, dan lambang organisasi.¹⁷ Dari segi budaya organisasi, aspek kepemimpinan yang penting adalah kemampuan Danlantamal dalam melakukan perubahan-perubahan dalam tubuh organisasi untuk mengantisipasi bencana alam. Untuk aspek norma dan praktik manajemen, hal-hal penting untuk dikaji adalah apakah prajurit telah memiliki pandangan kalau bencana alam merupakan ancaman yang mengganggu kedaulatan, prajurit mampu prihatin atas kejadian tersebut, mereka belajar secara mandiri untuk cara-cara mengatasinya, dan membicarakannya dengan sesama prajurit untuk menemukan solusi yang tepat. Dalam budaya organisasi juga terdapat komponen cerita dan tokoh. Cerita misalnya ditunjukkan dengan berbagi pengalaman antara prajurit yang telah pernah bertugas OMSP dengan prajurit yang belum pernah menjalankan tugas tersebut. Sementara itu, kehadiran tokoh dapat dilihat dari adanya panutan dalam penanggulangan bencana. Selain cerita dan tokoh, juga terdapat lambang-lambang khusus. Lambang ini misalnya lambang khusus untuk menunjukkan pentingnya Operasi penanggulangan bencana alam atau bahkan pangkat khusus di bidang kebencanaan. Dari segi tradisi dan ritual, hal ini mencakuplah pelatihan berkala tentang manajemen bencana, menjadikan manajemen bencana sebagai tema

¹⁷ Onedy Ariwibowo. 2010. Peran Budaya Organisasi: Studi Eksplorasi pada PT Simoplas. Skripsi. Universitas Diponegoro, abstrak

dalam pembicaraan tingkat tinggi baik dalam menerima tamu dari AL asing, mengunjungi pangkalan lain atau pangkalan AL asing serta unit TNI AL dan TNI lainnya serta terdapat simulasi berkala proses dukungan lantamal ketika terjadi bencana alam.

Konsep diri seorang prajurit dilihat dari konsep diri positif. Konsep diri ini ditunjukkan dalam perasaan diri prajurit kalau dirinya orang yang penting untuk terlibat dalam OMSP bencana, merasa dirinya sebagai orang yang sangat diandalkan masyarakat untuk menanggulangi bencana, dan melihat bahwa tindakannya setelah menjalankan tugas bukan sebuah pengorbanan atau tanggung jawab tetapi sebagai bentuk hak yang patut ia dapatkan.

Motivasi tugas mencakup motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik datang dari dalam diri seperti merasa perlu untuk terlibat dalam penanggulangan bencana, ingin mendapatkan pengalaman tentang penanggulangan bencana, dan memiliki cita-cita membantu masyarakat dalam situasi bencana. Motivasi ekstrinsik datang dari luar diri. Hal ini mencakuplah ingin mendapatkan kenaikan pangkat dan takut mendapatkan hukuman.

Disiplin tugas mencakup aspek pelanggaran disiplin dan aspek kesesuaian pemberian sanksi disiplin dengan pelanggaran yang dilakukan.

2.1.3.2 Komponen Organisasi

Komponen organisasi yang dimaksud disini adalah organisasi sebagai satu keseluruhan. Sebuah organisasi memiliki struktur di dalamnya yang ditujukan untuk meraih visi dan misi dari organisasi. Analisis organisasi dapat dilakukan pada struktur yang telah ada. Walau begitu, jika struktur tersebut belum tersedia, maka analisis diarahkan pada visi dan misi dari organisasi tersebut. Dari evaluasi terhadap ketercapaian visi dan misi organisasi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan apakah struktur organisasi harus dirombak atau tidak sehingga organisasi dapat berjalan lebih efektif.

Visi dari Organisasi Lantamal III ada dua dan dapat dibagi menjadi dua yaitu kesiapan operasi dan kecepatan gerak yang tinggi, dan kemampuan menciptakan stabilitas laut. Misi dari Lantamal III mencakup tiga misi yaitu (1) melaksanakan dukungan rebase, repair, replenishment, dan rest/recreation, (2) melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut dengan Binpotnaskuatmar dan Bintermatla, dan (3) melaksanakan operasi keamanan laut terbatas dalam rangka penegakan kedaulatan dan penegakan hukum. Kesemuanya dapat diadaptasi untuk lingkup sempit yaitu khusus dalam penanggulangan bencana alam.

2.1.3.3 Komponen Sarana

Secara umum, sarana dapat diartikan sebagai komponen fisik dari suatu organisasi. Walau begitu, terdapat tipe sarana lain yaitu sarana informasi. Sarana informasi atau *info-structure* berhubungan dengan sarana-sarana nonfisik yang dibutuhkan dalam berjalannya suatu informasi secara efisien dalam suatu organisasi dalam menanggapi suatu tugas bersama. Sarana informasi mencakup proses formal, hirarki (struktur organisasi), aturan koordinasi, dan strategi pembagian pengetahuan.¹⁸

Komponen sarana fisik di Lantamal III mencakup fasilitas labuh, fasilitas perbaikan, fasilitas perbekalan, fasilitas perawatan personil, dan fasilitas pembinaan pangkalan. Sementara itu, komponen sarana informasi mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan embarkasi, organisasi yang spesifik menangani bencana alam, kesamaan wilayah kontrol, dan koordinasi dengan instansi-instansi terkait.

2.1.4 Bencana Alam

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat

¹⁸ Huysman, M., Wulf, V. The role of Information Technology in building and sustaining the relational base of communities. In: *The Information Society (TIS)*, Vol. 21, No. 2, 2005, pp. 81 – 89

yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (*UU 24/2007*), Suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat, sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi atau lingkungan dan yang melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumberdaya mereka sendiri (*ISDR, 2004*).

Bencana alam adalah konsekuensi dari kombinasi aktivitas alami (suatu peristiwa fisik, seperti letusan gunung, gempa bumi, tanah longsor) dan aktivitas manusia. Karena ketidakberdayaan manusia, akibat kurang baiknya manajemen keadaan darurat, sehingga menyebabkan kerugian dalam bidang keuangan dan struktural, bahkan sampai kematian. Kerugian yang dihasilkan tergantung pada kemampuan untuk mencegah atau menghindari bencana dan daya tahan mereka. Pemahaman ini berhubungan dengan pernyataan: "bencana muncul bila ancaman bahaya bertemu dengan ketidakberdayaan". Dengan demikian, aktivitas alam yang berbahaya tidak akan menjadi bencana alam di daerah tanpa ketidakberdayaan manusia, misalnya gempa bumi di wilayah tak berpenghuni. Konsekuensinya, pemakaian istilah "alam" juga ditentang karena peristiwa tersebut bukan hanya bahaya atau malapetaka tanpa keterlibatan manusia. Besarnya potensi kerugian juga tergantung pada bentuk bahayanya sendiri, mulai dari kebakaran, yang mengancam bangunan individual, sampai peristiwa tubrukan meteor besar yang berpotensi mengakhiri peradaban umat manusia.

Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana..

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitas. Pencegahan Bencana

adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun ketentuan pihak yang terancam bencana.

Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.

2.1.4.1 Jenis Bencana Alam

Gempa Bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi (lempeng bumi). Kata gempa bumi juga digunakan untuk menunjukkan daerah asal terjadinya kejadian gempa bumi tersebut. Bumi kita walaupun padat, selalu bergerak, dan gempa bumi terjadi apabila tekanan yang terjadi karena pergerakan itu sudah terlalu besar untuk dapat ditahan. Gunung Meletus : merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi.

Magma adalah cairan pijar yang terdapat di dalam lapisan bumi dengan suhu yang sangat tinggi, yakni diperkirakan lebih dari 1.000 °C. Cairan magma yang keluar dari dalam bumi disebut lava. Suhu lava yang dikeluarkan bisa mencapai 700-1.200 °C. Letusan gunung berapi yang membawa batu dan abu dapat menyembur sampai sejauh radius 18 km atau lebih, sedangkan lavanya bisa membanjiri sampai sejauh radius 90 km. Kebakaran Hutan : sebuah kebakaran yang terjadi di alam liar, tetapi juga dapat memusnahkan rumah-rumah dan lahan pertanian disekitarnya. Penyebab umum termasuk petir, kecerobohan manusia, dan pembakaran.

Kemudian Tanah Longsor adalah salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Tanah longsor terjadi karena ada gangguan kestabilan pada tanah/batuan penyusun lereng, beberapa kejadian dan akibat yang menimbulkan tanah longsor antara lain: (1) Gerakan tanah yang berjalan lambat menyebabkan penggelembungan (*tilting*) sehingga bangunan di atasnya tidak dapat digunakan lagi, rekahan pada tanah menyebabkan pondasi bangunan terpisah dan menghancurkan utilitas lainnya didalam tanah; (2) Runtuhan lereng yang tiba-tiba dapat mengakibatkan terseretnya pemukiman yang berada dilingkungan serta dapat mengakibatkan tertimbunnya lingkungan tersebut; (3) Runtuhan bebatuan (*rock falls*) yang berupa luncuran bebatuan dapat menerjang bangunan atau pemukiman dibawahnya yang mengakibatkan tertimbunnya wilayah pemukiman akibat reruntuhan bebatuan tersebut.

Banjir merupakan peristiwa terbenamnya daratan oleh air. Peristiwa banjir timbul jika air menggenangi daratan yang biasanya kering. Banjir pada umumnya disebabkan oleh air sungai yang meluap ke lingkungan sekitarnya sebagai akibat curah hujan yang tinggi. Kekuatan banjir mampu merusak rumah dan menyapu fondasinya. Air banjir juga membawa lumpur berbau yang dapat menutup segalanya setelah air surut

Tsunami : (bahasa Jepang: 津波; tsu = pelabuhan, nami = gelombang, secara harafiah berarti "ombak besar di pelabuhan") adalah perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut secara vertikal dengan tiba-tiba. Perubahan permukaan laut tersebut bisa disebabkan oleh gempa bumi yang berpusat di bawah laut, letusan gunung berapi bawah laut, longsor bawah laut, atau hantaman meteor di laut. Gelombang tsunami dapat merambat ke segala arah. Tenaga yang dikandung dalam gelombang tsunami adalah tetap terhadap fungsi ketinggian dan kelajuannya. Di laut dalam, gelombang tsunami dapat merambat dengan kecepatan 500-1000 km per jam. Setara dengan kecepatan pesawat terbang. Ketinggian gelombang di laut dalam hanya

sekitar 1 meter. Dengan demikian, laju gelombang tidak terasa oleh kapal yang sedang berada di tengah laut. Ketika mendekati pantai, kecepatan gelombang tsunami menurun hingga sekitar 30 km per jam, namun ketinggiannya sudah meningkat hingga mencapai puluhan meter. Hantaman gelombang Tsunami bisa masuk hingga puluhan kilometer dari bibir pantai. Kerusakan dan korban jiwa yang terjadi karena Tsunami bisa diakibatkan karena hantaman air maupun material yang terbawa oleh aliran gelombang tsunami.

Bencana letusan gunung api. Berdasarkan waktu kejadiannya bahaya letusan gunung api dibagi 2 bagian, yakni: (1) Bahaya Utama (primer), sering juga disebut bahaya langsung, hal ini terjadi ketika proses peletusan sedang berlangsung biasanya bahaya yang ditimbulkan berupa awan panas (proclark flow), lontaran batu (pijar), hujan abu tebal, teleran lava (lava flow) serta gas beracun yang dapat membahayakan jiwa manusia; (2) Bahaya Ikutan (sekunder) adalah bahaya yang terjadi setelah proses peletusan berlangsung akibat dari letusan gunung api akan terjadi penumpukan material dalam berbagai ukuran dibagian puncak dan lereng bagian atas, saat turun hujan sebagian material tersebut akan terbawa air hujan sehingga adonan lumpur dan bebatuan turun menuju arah yang rendah.

Badai Topan adalah cuaca yang ekstrim, mulai dari hujan es dan badai salju sampai badai pasir dan debu. Badai disebut juga [siklon tropis] oleh meteorolog, berasal dari samudera yang hangat. Badai bergerak di atas laut mengikuti arah angin dengan kecepatan sekitar 20 km/jam. Badai bukan angin ribut biasa. Kekuatan anginnya dapat mencabut pohon besar dari akarnya, meruntuhkan jembatan, dan menerbangkan atap bangunan dengan mudah. Tiga hal yang paling berbahaya dari badai adalah sambaran petir, banjir bandang, dan angin kencang. Terdapat berbagai macam badai, seperti badai hujan, badai guntur, dan badai salju. Badai paling merusak adalah badai topan (hurricane), yang dikenal sebagai

angin siklon (cyclone) di Samudera Hindia atau topan (typhoon) di Samudera Pasifik.

Tornado adalah kolom udara yang berputar kencang yang membentuk hubungan antara awan cumulonimbus atau dalam kejadian langka dari dasar awan cumulus dengan permukaan tanah. Tornado muncul dalam banyak ukuran namun umumnya berbentuk corong kondensasi yang terlihat jelas yang ujungnya yang menyentuh bumi menyempit dan sering dikelilingi oleh awan yang membawa puing-puing. Umumnya tornado memiliki kecepatan angin 177 km/jam atau lebih dengan rata-rata jangkauan 75 m dan menempuh beberapa kilometer sebelum menghilang. Beberapa tornado yang mencapai kecepatan angin lebih dari 300-480 km/jam memiliki lebar lebih dari satu mil (1.6 km) dan dapat bertahan di permukaan dengan lebih dari 100 km.

Sedangkan Kekeringan adalah keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan (beberapa bulan hingga bertahun-tahun). Biasanya kejadian ini muncul bila suatu wilayah secara terus-menerus mengalami curah hujan di bawah rata-rata. Musim kemarau yang panjang akan menyebabkan kekeringan karena cadangan air tanah akan habis akibat penguapan (evaporasi), transpirasi, ataupun penggunaan lain oleh manusia. Kekeringan dapat menjadi bencana alam apabila mulai menyebabkan suatu wilayah kehilangan sumber pendapatan akibat gangguan pada pertanian dan ekosistem yang ditimbulkannya.

2.1.4.2 Penanggulangan Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri dari tiga tahap sebagaimana dikemukakan Modul yang dikeluarkan oleh BNPB yakni: (1) Tahap Pra Bencana, dalam tahap pra bencana kegiatan pencegahan/mitigasi bencana dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan dalam bentuk penegakkan hukum/peraturan pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan fisik dilapangan yang bertujuan untuk mengurangi dampak kerugian yang terjadi bila terjadi suatu bencana seperti antara lain dengan mematuhi rencana tata ruang dan tata

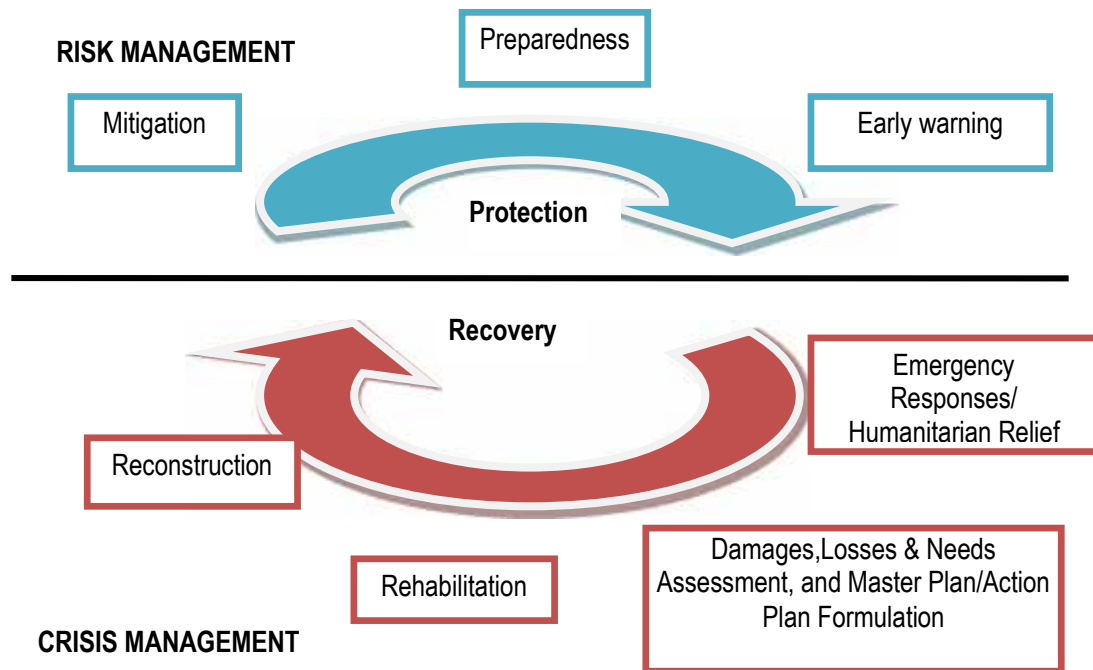
bangunan yang telah ditetapkan. Kesiapsiagaan dilakukan untuk memastikan untuk melaksanakan upaya yang sekiranya perlu dilaksanakan untuk pencegahan bencana alam; (2) Tanggap Darurat. Pada saat tanggap darurat dukungan yang diberikan dalam kegiatan penyelamatan korban bencana adalah dengan penyediaan dan pengoperasian peralatan yang diperlukan untuk mendukung dan memberikan akses bagi pelaksanaan kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana beserta harta bendanya dilokasidan keluar dari indikasi bencana. Pelaksanaan kegiatan tanggap darurat utamanya dilakukan untuk memulihkan kondisi dan fungsi prasarana dan sarana, khususnya bidang pekerjaan umum yang rusak akibat bencana yang bersifat darurat namun harus mampu mencapai tingkat pelayanan minimal yang dibutuhkan dan menyediakan berbagai sarana yang diperlukan bagi perawatan dan penampungan sementara korban bencana; dan (3) Tahap Pasca Bencana. Dalam tahap pasca bencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan harus diupayakan untuk melibatkan peran serta warga masyarakat, bantuan dari pemerintah diutamakan berupa *stimulant* yang diharapkan akan dapat menggiring tumbuhnya keswadayaan warga masyarakat.

Pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi diutamakan bagi prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum dan rumah tinggal bagi warga masyarakat miskin yang tidak mampu dengan pendekatan tridaya dalam pelaksanaannya (permukiman).

Menurut UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana dapat didefinisikan sebagai “peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam maupun faktor non alam dan faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”. Terdapat lima model manajemen bencana yaitu: (1) *Disaster management continuum model*. Model ini mungkin merupakan model yang paling populer karena terdiri dari tahap-tahap yang jelas

sehingga lebih mudah diimplementasikan. Tahap-tahap manajemen bencana di dalam model ini meliputi *emergency, relief, rehabilitation, reconstruction, mitigation, preparedness, dan early warning*; (2) *Pre-during-post disaster model*. Model manajemen bencana ini membagi tahap kegiatan di sekitar bencana. Terdapat kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan sebelum bencana, selama bencana terjadi, dan setelah bencana. Model ini seringkali digabungkan dengan *disaster management continuum model*; (3) *Contract-expand model*. Model ini berasumsi bahwa seluruh tahap-tahap yang ada pada manajemen bencana (*emergency, relief, rehabilitation, reconstruction, mitigation, preparedness, dan early warning*) semestinya tetap dilaksanakan pada daerah yang rawan bencana. Perbedaan pada kondisi bencana dan tidak bencana adalah pada saat bencana tahap tertentu lebih dikembangkan (*emergency dan relief*) sementara tahap yang lain seperti *rehabilitation, reconstruction dan mitigation* kurang ditekankan; (4) *The crunch and release model*. Manajemen bencana ini menekankan upaya mengurangi kerentanan untuk mengatasi bencana. Bila masyarakat tidak rentan maka bencana akan juga kecil kemungkinannya terjadi meski *hazard* tetap terjadi; (5) *Disaster risk reduction framework*. Model ini menekankan upaya manajemen bencana pada identifikasi risiko bencana baik dalam bentuk kerentanan maupun *hazard* dan mengembangkan kapasitas untuk mengurangi risiko tersebut.

Pendekatan lain adalah lingkaran manajemen bencana (*disaster management cycle*) yang terdiri dari dua kegiatan besar. Pertama adalah sebelum terjadinya bencana (*pre event*) dan kedua adalah setelah terjadinya bencana (*post event*). Kegiatan setelah terjadinya bencana dapat berupa *disaster response/emergency response* (tanggap bencana) ataupun *disaster recovery*. Kegiatan yang dilakukan sebelum terjadinya bencana dapat berupa *disaster preparedness* (kesiapsiagaan menghadapi bencana) dan *disaster mitigation* (mengurangi dampak bencana). Ada juga yang menyebut istilah *disaster reduction*, sebagai perpaduan dari *disaster mitigation* dan *disaster preparedness* (Makki, 2006).



Gambar 2.1 Manajemen Penanggulangan Bencana

Sumber: Makki, 2006

Terkait dengan manajemen penanggulangan bencana, maka UU No. 24 Tahun 2007 menyatakan “Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi”. Rumusan penanggulangan bencana dari UU tersebut mengandung dua pengertian dasar yaitu sebagai sebuah rangkaian atau siklus dan Penanggulangan bencana dimulai dari penetapan kebijakan pembangunan yang didasari risiko bencana dan diikuti tahap kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam UU No. 24 Tahun 2007 secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Penanggulangan bencana

Sumber : UU No 24 Tahun 2007

2.1.5 Manajemen Kedaruratan

Manajemen kedaruratan adalah seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan kedaruratan, pada menjelang bencana, saat bencana dan sesudah keadaan darurat. Menurut Fred Cuny, siklus Manajemen Darurat harus dilakukan dalam waktu panjang pada infrastruktur, kesadaran publik, dan bahkan isu-isu keadilan manusia. Manajemen kedaruratan sama persis seperti manajemen tradisional dalam mengatur berjalannya sebuah organisasi, yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian personel, pelaksanaan, kontrol pelaksanaan dan dilanjutkan dengan evaluasi kegiatan dan perhitungan anggaran. Akan tetapi pada manajemen kedaruratan, hal tersebut dilakukan dengan aplikasi waktu yang mendesak sehingga semua keputusan beresiko tinggi bila terjadi kesalahan. Kebutuhan pada saat pelaksanaan manajemen kedaruratan besar dibandingkan kemampuan sumber daya dikarenakan tuntutan situasi dan kondisi yang terjadi. Sehingga kewenangan menjadi kabur akibat desakan situasi yang urgen itu.

Proses Manajemen Darurat melibatkan empat tahap: mitigasi, kesiapan, respon dan pemulihan. Baru-baru ini Departemen Keamanan

Dalam Negeri Amerika dan FEMA telah mengadopsi istilah "ketahanan" dan "pencegahan" sebagai bagian dari paradigma Manajemen Kedaruratan.¹⁹ Sifat manajemen kedaruratan tergantung pada kondisi lokal daerah yang terkena dampak bencana, kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Tujuan Manajemen Kedaruratan antara lain; mengurangi jumlah korban, meringankan penderitaan, stabilisasi kondisi korban/pengungsi, mengamankan aset, memulihkan fasilitas kunci, mencegah kerusakan lebih jauh dan menyediakan pelayanan dasar dalam penanganan pasca darurat.

Meringankan beban masyarakat setempat Untuk memudahkan pelaksanaan Manajemen Tanggap Darurat maka diperlukan 3 C yaitu: *Command* (komando), *Control* (pengendalian), dan *Coordination* (koordinasi). *Command* berarti "kemampuan untuk mengarahkan, memerintahkan, dengan atau tanpa merujuk pada otoritas atau kekuasaan."²⁰ Sementara itu, *Control* merujuk pada "cara atau kekuasaan untuk mengatur, membatasi, memverifikasi, mengarahkan (biasanya dengan suatu standar), atau mengkomando."²¹ *Command and Control* adalah bagian utama dari karakteristik militer. *Coordination*, yaitu "pertukaran sumberdaya yang saling melengkapi secara sadar antara dua atau lebih organisasi otonom untuk mencapai tujuan bersama."²² Konsep *Coordination* merupakan konsep umum yang membangun hubungan antara militer dengan organisasi-organisasi sipil. Karakteristik Manajemen Kedaruratan, antara lain;²³ bersifat meluas, besar-besaran, dan membebani sistem normal, dalam suasana yang kacau dan/atau traumatis, keputusan harus cepat dan data/informasi terbatas serta segala keputusan membawa konsekuensi langsung.

¹⁹Wikipedia. 2012. Emergency Management
http://en.wikipedia.org/wiki/Emergency_management

²⁰Osinga, F, 2005, *Science, Strategy, and War: The Strategic Theory of John Boyd*. PhD Dissertation. University of Leiden, hal. 243

²¹ Osinga, Ibid, hal. 243

²² Bolland, J.M., Wilson, J.V., 1994. Three Faces of Integrative Coordination: A Model of Interorganizational Relations in Community-Based Health and Human Services, *Health Services Research*, 29(3):341-366, hal.344

²³ Bakornas PB, 2005, *Manajemen Kedaruratan*, Jakarta, hal 14

Prinsip-prinsip Manajemen Kedaruratan, antara lain:²⁴ (1) Komprehensif-manajer darurat mempertimbangkan dan memperhitungkan semua bahaya, semua tahap, semua stakeholder dan semua dampak yang relevan terhadap bencana; (2) Progresif-manajer darurat mengantisipasi bencana di masa depan dan mengambil langkah-langkah pencegahan dan persiapan untuk membangun tahan bencana dan tahan bencana masyarakat; (3) Terpandu Risiko-manajer darurat menggunakan prinsip-prinsip manajemen risiko suara (identifikasi bahaya, analisis risiko, dan analisis dampak) dalam menentukan prioritas dan sumber daya; (4) Terintegrasi - manajer darurat memastikan kesatuan usaha antara semua tingkat pemerintahan dan seluruh elemen masyarakat; (5) Kolaborasi - manajer darurat menciptakan dan mempertahankan hubungan yang luas dan tulus antara individu-individu dan organisasi untuk mendorong kepercayaan, mendukung suasana tim, membangun konsensus, dan memfasilitasi komunikasi; (6) Koordinasi - manajer darurat mengarahkan semua kegiatan pihak terkait untuk mencapai tujuan yang sama; (7) Fleksibel - manajer darurat menggunakan pendekatan kreatif dan inovatif dalam memecahkan tantangan bencana; (8) Profesional - manajer darurat menghargai ilmu dan pendekatan berbasis pengetahuan; berdasarkan pendidikan, pengalaman pelatihan, praktek etika, pelayanan publik dan perbaikan yang berkelanjutan.

Masalah-masalah yang terjadi pada Manajemen Kedaruratan, antara lain;²⁵ kesiapan kurang sempurna / tidak ada rencana antisipasi, peringatan dini tidak ada atau kurang efektif, informasi tidak lengkap / tidak tepat dan membingungkan, komunikasi/ transportasi terputus, kebingungan, kacau, krisis, gagal koordinasi, kebutuhan besar, bahan bantuan tidak mencukupi, lingkup terlalu besar / meluas, terlalu banyak perintah, sasaran yang tidak jelas, masalah keamanan dan jaminan perlindungan, terlalu banyak tugas, waktu terlalu sempit, banyak yang terlibat, koordinasi kompleks, hambatan politis, administratif dan birokratis.

²⁴Bakornas PB, *Ibid*, hal 23

²⁵Bakornas PB, *Ibid*, hal 31

2.1.6 Konsep Kampanye Militer

Kampanye Militer merupakan rangkaian beberapa operasi gabungan yang dilaksanakan secara berurutan, serentak untuk mencapai sasaran strategi dan operasi pada suatu ruang dan waktu yang ditentukan serta melibatkan komando permanen dan komando non permanen/bentukan. Rangkaian operasi militer yang dilaksanakan bertujuan untuk menanggulangi setiap ancaman nyata baik yang didasarkan pada rencana kontinjensi yang dirumuskan melalui perencanaan strategis maupun untuk menghadapi ancaman yang bersifat mendadak dan tidak disiapkan sebelumnya. Rangkaian operasi militer yang dilaksanakan berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan sistem politik nasional karena strata strategi militer itu sendiri merupakan bagian dari *grand strategy* atau strategi raya/ nasional yang memuat kepentingan nasional (cita-cita dan tujuan nasional). Mengingat hal tersebut, maka penyelenggaraan kampanye militer tidak dapat dipisahkan dari kebijakan politik dalam pengerahan kekuatan TNI serta dipadukan dengan kekuatan nasional lainnya dalam rangka pencapaian tujuan nasional yang telah ditentukan.²⁶

Berkaitan dengan teori kampanye militer, maka dalam penanggulangan dan pengurangan risiko (mitigasi) bencana alam oleh Lantamal III Jakarta diperlukan beberapa tahapan, yang meliputi: (1) Merumuskan tujuan maupun sasaran yang akan di capai dalam penanggulangan dan pengurangan risiko (mitigasi); (2) Menentukan sumberdaya manusia sebagai obyek, sumber daya sarana dan prasarana maupundukung anggaran yang akan digunakan untuk mendukung penanggulangan dan pengurangan risiko (mitigasi); (3) Melengkapi sarana dan prasaran yang dibutuhkan dalam penanggulangan dan pengurangan risiko (mitigasi); dan (4) Meningkatkan sinergitas dengan elemen bangsa lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penanggulangan dan pengurangan risiko (mitigasi) demi meingkatkan keberhasilan dan

²⁶Peraturan Panglima TNI Nomor: Perpang/15/IV/2008 tanggal 4 April 2008Buku Petunjuk Operasi TNI Tentang Kampanye Militer

keefektifan dalam upaya penanggulangan dan pengurangan risiko (mitigasi) tersebut.

Konsep Kampanye Militer merupakan konteks yang penting diketengahkan dalam penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana hubungan OMSP penanggulangan bencana yang dilakukan oleh TNI AL, khususnya pada aspek embarkasi sumberdaya yang dilakukan oleh Lantamal III. Embarkasi adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama antara Lantamal III, instansi terkait serta masyarakat untuk mendukung penanggulangan bencana sehingga keberhasilan embarkasi sangat menentukan pencapaian posisip dari mobilisasi sumberdaya dan penanggulangan bencana secara luas. Dan pencapaian keberhasilan ini sesuai dengan apa yang digariskan oleh Konsep Kampanye Miiliter dalam menciptakan stabilitas negara dan bangsa.

2.1.7 Konsep Pangkalan

Pangkalan secara umum adalah tempat atau sarana yang dapat digunakan oleh suatu kelompok sebagai tempat penampungan sementara untuk barang yang akan diangkut.²⁷ Dalam konteks TNI AL, maka pangkalan merupakan tempat atau sarana yang dapat digunakan oleh TNI AL sebagai tempat penampungan sementara barang maupun kapal yang akan dibawa ke tempat lain. Fungsi dari pangkalan angkatan laut antara lain: (1) Sebagai pemberi dukungan logistik.²⁸ Karenanya sangat perlu bagi sebuah pangkalan untuk memiliki kekuatan infrastruktur yang lebih tangguh bagi wilayah sekitarnya. Dalam kasus bencana tsunami misalnya, pangkalan harus lebih kokoh sehingga tidak terkena kerusakan dan mampu menjadi sumber dukungan logistik bagi bantuan kemanusiaan atau personil yang masuk ke wilayah bencana tersebut; (2) Sebagai penanda kekuatan Angkatan Laut. Adanya pangkalan menandakan kekuatan suatu negara karena semakin banyak pangkalan, maka semakin

²⁷ Diadaptasi dari SMERU, 2001, Otonomi Daerah dan Iklim Usaha: Temuan dari SMERU , hal. 17

²⁸ Ricardo A Flores, 2007. Improving the US Navy Riverine Capability: Lessons from the Colombian Experience. Master Thesis. Naval Postgraduate School, hal. 44

banyak persenjataan angkatan laut yang tersimpan di tempat tersebut: (3) Fungsi Penanda Kedaulatan. Selain sebagai dukungan logistik, pangkalan juga berfungsi sebagai penanda keberadaan atau kedaulatan suatu negara terutama di wilayah yang jauh; (4) Fungsi Pengawasan Lawan. Fungsi ini menunjukkan pangkalan dibuat untuk mempermudah mendeteksi gerak lawan. Belajar dari pengalaman Pearl Harbour, jika pangkalan berada di depan laut terbuka yang luas, maka kita tidak dapat segera tahu tentang pergerakan musuh dari seberang lautan. Karenanya, akan lebih baik jika pangkalan berhadapan langsung dengan musuh potensial. Argumen ini yang digunakan untuk membangun pangkalan angkatan laut di dekat atau bahkan menyewa tanah di dalam wilayah negara lain untuk membangun pangkalan. Sebagai contoh, pangkalan angkatan laut AS di Okinawa dan Guantanamo yang menandai upaya penjagaan pergerakan Jepang dan Kuba; (5) Fungsi Penerimaan Bantuan. Dalam bencana tsunami, Thailand membuka pangkalan angkatan lautnya untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan dari angkatan laut asing; (6) Fungsi perlindungan. Fungsi keenam dari pangkalan adalah untuk melindungi armada maritim suatu negara. Hal ini misalnya terjadi pada kasus pangkalan angkatan laut Inggris di Penang yang dibangun awal abad ke-19. Pangkalan ini ditujukan untuk melindungi kapal-kapal dagang Inggris dari bajak laut di Selat Malaka;²⁹ (7) Fungsi komunikasi. Pangkalan merupakan salah satu kekuatan yang menyusun komunikasi maritim utama selain pelabuhan, konvoi, dan kelompok perang pembawa. Tidak mengherankan jika pangkalan menjadi target serangan utama oleh penerbangan angkatan laut musuh, kapal selam musuh, dan kekuatan permukaan musuh yang melindungi kapal selam.³⁰

²⁹ Ooi Keat Gin, *Penang (1786): First British Outpost in the Straits of Melaka*, dalam *Southeast Asia: A Historical Encyclopedia*. Ed: Ooi Keat Gin, Santa Barbara: ABC Clio, 2004. hal. 1048

³⁰ Alexey D Muraviev, *SLOCs, 'Choke Points' and the Soviet Naval Cold War: The Maritime Communications Factor in Soviet Naval Strategy and Force Development, 1962-1992*, 2007 King-Hall Naval History Conference Proceedings, hal. 199

2.2 Karya Ilmiah Terdahulu

Yasa, I.G.M. 2013. *Analisis Pengaruh Budaya Organisasi dan Profesionalisme terhadap Kinerja Prajurit TNI AL di Lanal Palembang*.

Penelitian ini dilakukan untuk memeriksa kesiapan prajurit TNI AL dalam menjalankan tugas pokok lanal Palembang. Tinjauan awal menemukan kalau masalah yang dihadapi lanal Palembang adalah kemampuan Alutsista yang terbatas, masa dinas personel yang lama, kualifikasi personel, dan kurangnya jumlah personel. Peneliti kemudian merumuskan dua faktor yang mewakili kinerja prajurit yaitu faktor dari dalam diri prajurit, diwakili oleh profesionalisme, dan faktor dari luar diri prajurit, yaitu budaya organisasi. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan metode statistik regresi linier berganda. Ditemukan kalau profesionalisme dan budaya organisasi memang berpengaruh terhadap kinerja prajurit TNI AL. penelitian ini menyarankan agar kinerja prajurit ditingkatkan dengan pelatihan, rotasi penugasan, dan pengembangan budaya organisasi yang konstruktif lewat peranan kepemimpinan dan kepala satuan kerja.

Sundoro Agung Nugroho, *Analisis Kerjasama Sipil-Militer Dalam Bantuan Kemanusiaan Di Indonesia: Studi Kasus Masa Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana Alam Letusan Gunung Merapi 2010*.

Pada masa tanggap bencana Merapi 2010 dilibatkan anggota TNI lebih dari 5000 personel yang dikerahkan untuk membantu dalam penanganan bencana letusan Gunung Api Merapi di bawah kendali BNPB bersama-sama dengan unsur lain seperti Pemerintah Daerah, organisasi kemanusiaan baik dari dalam maupun luar negeri, organisasi non-pemerintah (LSM) dan juga lembaga usaha yang terlibat langsung dalam pemberian bantuan membantu dalam penanganan bencana letusan Gunung Api Merapi di bawah kendali BNPB bersama-sama dengan unsur lain seperti Pemerintah Daerah, organisasi kemanusiaan baik dari dalam maupun luar negeri, organisasi nonpemerintah (LSM) dan juga lembaga usaha yang terlibat langsung dalam pemberian bantuan Kegiatan bantuan kemanusiaan dalam penanganan bencana letusan Gunung Merapi inilah

yang diambil sebagai studi kasus bagi pelaksanaan kerjasama sipil-militer di Indonesia dimana kegiatan tersebut belum terkonsep dalam suatu doktrin khusus kerjasama sipil-militer seperti halnya negara anggota NATO dan PBB.

Dari hasil penelitian didapat kesimpulan bahwa kerjasama sipil-militer dilaksanakan pada masa prabencana sampai dengan pascabencana. Pada masa tanggap darurat, fase-fase kerjasama sipil-militer telah dilaksanakan namun masih banyak yang belum sesuai dengan harapan. Pada fase perencanaan, secara regulasi dan aspek hukum masih belum memadai bentuk kerja sama sipil-militer ini. Kemudian koordinasi dan komunikasi masih belum maksimal baik intern maupun ekstern. Pada tahap persiapan, seluruh kegiatan masih ditangani oleh masing-masing institusi dan anggaran yang digunakan adalah anggaran institusi yang bersangkutan. Tahap pelaksanaan sudah berjalan dengan baik, yaitu adanya koordinasi dan komunikasi intensif antar institusi serta pelaksanaan kegiatan yang berjalan dengan baik. Pada tahap pengakhiran, penyerahan tugas dan tanggung jawab dilaksanakan antara militer dengan militer dan sipil dengan sipil. Dalam hal ini militer tetap menjalankan tugasnya dalam membantu menanggulangi bencana. Dari hasil penelitian tersebut dapat dijadikan acuan dalam menganalisis kemampuan Lantamal III Jakarta guna penanggulangan dan pengurangan risiko bencana alam (mitigasi).

Koko Komarudin, 2008, *Peran TNI AL, Penanggulangan Bencana, Operasi Militer Selain Perang (The Role of Navy, Disaster Management, Military Operation Other Than War)*, Pasca Sarjana ITB.

Secara geografis Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan terhadap bencana alam yang sering mengakibatkan korban jiwa dan kerugian material yang sangat besar, sehingga bencana alam merupakan salah satu bentuk ancaman serius yang harus ditanggulangi secara bersama oleh seluruh komponen bangsa. Sebagai perwujudan

Undang-undang TNI No. 34 Tahun 2004 dan doktrin TNI AL "Eka Sasana Jaya", TNI AL selalu terlibat aktif dalam mendukung operasi penanggulangan bencana di Indonesia.

Penelitian ini mengidentifikasi kegiatan TNI AL dalam penanggulangan bencana, mekanisme pengerahan kekuatan TNI AL, serta hambatan yang dihadapi. Konsep peningkatan peran TNI AL sebagai saran untuk pembuatan kebijakan peningkatan peran TNI AL dalam penanggulangan bencana. Pendekatan penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara serta menggunakan teknik snowball dan studi dokumentasi. Prinsip-prinsip penanggulangan bencana, analisis SWOT dan aspek kapasitas serta sumber daya organisasi digunakan untuk memetakan dan menganalisis permasalahan yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan kemampuan yang dimiliki sekarang, TNI AL sudah berperan penting dalam penanggulangan bencana, meskipun harus menghadapi beberapa kendala, diantaranya adalah terbatasnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dukungan logistik/anggaran, masih belum terjalin koordinasi yang baik antar instansi/lembaga serta peran serta masyarakat. Untuk meningkatkan peran dan meminimalkan kendala-kendala yang ada, maka upaya-upaya yang harus dilakukan adalah melakukan evaluasi yang digunakan sebagai dasar untuk membentuk dan melengkapi aturan penanggulangan bencana, penataan ulang organisasi kekuatan TNI AL untuk penanggulangan bencana meliputi: pengadaan Alutsista berfungsi tempur dan non tempur serta peningkatan gelar SSAT, pengalokasian anggaran untuk operasi penanggulangan bencana, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengadaan latihan bersama dan peningkatan koordinasi baik internal TNI AL maupun antar instansi/lembaga-lembaga lain secara bertahap, berjenjang dan berlanjut. Dari hasil penelitian dapat dijadikan acuan dalam menentukan variabel data yang digunakan dalam menentukan pelaksanaan embarkasi Lantamal III Jakarta dalam mendukung penanggulangan bencana alam yang terjadi di tanah air.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2007 menyatakan “Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi”. Kemudian bila dikaitkan dengan tugas TNI dalam operasi membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan terlihat adanya tugas yang perlu disinergikan dalam pelaksanaan di lapangan (Perpang TNI No. Perpang/14/III/2008 tanggal 27 Maret 2008 tentang Naskah Sementara OMSP, hal. 98). Selama ini, tindak pencegahan dan penanggulangan bencana alam belum menunjukkan keterpaduan antara komponen dan sumber daya yang tersedia.

Pada umumnya, kegiatan penanggulangan cenderung masih bersifat sektoral dan kedaerahan, bahwa seluruh stakeholders pencegahan dan penanggulangan bencana alam termasuk masyarakat dan para pengusaha belum mencerminkan sinergitas yang terkoordinasi. Penanggulangan bencana atau manajemen bencana merupakan satu siklus multi *stakeholders* yang mempunyai keterkaitan erat dan saling ketergantungan antara satu komponen dengan komponen lainnya. Diperlukan penanganan yang terintegrasi dan terkoordinasi melalui sinergitas *stakeholders* dan manajemen penanggulangan bencana yang tepat, yang dapat didukung oleh kemampuan Lantamal III dalam melaksanakan Penanggulangan Bencana alam keberhasilan Lantamal III dalam melaksanakan operasi ini, sangat ditentukan oleh tingkat kemampuannya dalam aspek Sumber Daya Manusia, Organisasi serta Sarana dan Prasarana.



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian

Sinergitas antara BNPB, BPBD Provinsi/kabupaten dan Lantamal dalam menanggulangi bencana alam akan/dan didukung oleh *stakeholders* yang lain akan terwujudnya kesiapsiagaan dukungan pangkalan yang baik dalam melaksanakan penanggulangan bencana, rehabilitasi, membantu pembangunan infrastruktur dan mengurangi bertambahnya korban bencana.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, desain ini digunakan karena peneliti berkeinginan untuk memberikan gambaran, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sedang terjadi yang dihadapi oleh pangkalan TNI AL/Lantamal III di Jakarta. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat hubungan antar variabel-variabel yang ada”.³¹

Secara umum, ciri-ciri metode penelitian deskriptif analisis sebagai berikut;³² bersifat mendeteskikan kejadian atau peristiwa yang bersifat faktual, bersifat mencari informasi faktual dan dilakukan secara mendetail guna mengidentifikasi masalah-masalah atau untuk mendapatkan justifikasi keadaan dan praktik-praktik yang sedang berlangsung mendeteskikan subyek yang sedang dikelola oleh kelompok orang tertentu dalam waktu yang bersamaan, metode penelitian deskriptif analisis tidak menguji hipotesis melainkan hanya mendeteskikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel yang diteliti.

Desain penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian kualitatif, sehingga data yang dikumpulkan dalam penelitian ini sebagian besar data deskriptif dalam bentuk laporan dan uraian sehingga penelitian ini tidak mengutamakan angka-angka dan atau pengolahan data statistik, walaupun tidak menolak data kuantitatif.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

³¹Mardalis, 1995, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 26

³²Sudarwan Danim, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung : Pustaka Setia, hlm. 45 - 47

3.2.1 Dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan teknik studi kepustakaan dilakukan dengan pengumpulan data sekunder yang bersumber pada literatur-literatur ilmiah, seperti buku-buku, makalah, jurnal, majalah, surat kabar, dokumen resmi yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari sumber-sumber lain yang dianggap relevan dengan kajian penelitian, seperti yang dilakukan peneliti di Perpustakaan Unhan, Mabes TNI AL dan melalui browsing di internet. Undang-undang/peraturan-peraturan pendukung seperti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 tentang TNI, Undang-undang Republik Indonesia No. 24 tentang penanggulangan bencana, data juga akan diambil dari peraturan lain yang terkait dengan penelitian.

3.2.2 Observasi. Peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap gejala-gejala obyek yang diteliti, di Pangkalan TNI Angkatan Laut Jakarta (Lantamal) III Jakarta. Peneliti secara langsung akan mengungkap kondisi nyata di lapangan serta mencatat aturan-aturan yang ada terkait dengan penelitian, sehingga akan mendapatkan celah terhadap permasalahan yang muncul.

3.2.3 Wawancara. Setelah peneliti mendistribusikan *checklist* pertanyaan/questioner untuk pendalaman, dilakukan wawancara parsial agar memperkuat obyektivitas data, diantaranya dengan Komandan Lantamal III Jakarta, Wadan Lantamal III Jakarta, Asrena Lantamal III Jakarta, Asops Lantamal III Jakarta, Aspers Lantamal III, Kadisminpers Lantamal III, Kadisyahal Lantamal III, Kadis Faslan Lantamal III, Paban Ops Lantamal III Jakarta, Kasatkom Lantamal III, Kasubsi Perangkat Komunikasi Basarnas, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD DKI, Deputi Kesiap siagaan BNPB, Deputi Tanggap Darurat BNPB, Personel LSM Pos Keadilan Peduli Umat, personel LSM Tim Penanggulangan Bencana dan Kakesbang Pemprov Jakarta Utara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data serta informasi yang digali dari sumber informasi melalui percakapan atau tanya jawab. Maksud wawancara, untuk mengungkap data dan informasi dari sumber langsung yang sifat datanya

berhubungan dengan makna-makna yang berada dibalik perilaku atau situasi sosial yang terjadi.

Dalam penelitian ini akan menggunakan Wawancara Semi Standar, merupakan kombinasi wawancara terpimpin dan tak terpimpin yang menggunakan inti pokok pertanyaan yang akan diajukan, membuat garis besar pokok-pokok pembicaraan, yang disampaikan secara bebas namun dapat mengambil data dan informasi yang diharapkan. Wawancara yang diharapkan adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, pihak yang diajak wawancara diminta/memberikan pendapat dan ide-idenya. Pembagian metode dalam menjawab masalah penelitian ditunjukkan pada tabel berikut, disertai dengan alasan pemilihan metode:

Tabel 3.1 Metode untuk Setiap Variabel

	Bentuk Kesiapan Embarkasi	Metode	Subjek	Alasan
1	2	3	4	5
1	Profesionalisme	Dokumentasi dan Wawancara	Dokumen Keprajuritan, Dan Lantamal III, Kasubdit Bantuan Darat Bidang Sandang Pangan BNPB, Kadisyahal Lantamal III, Aspers Lantamal III	Kompetensi Prajurit tercatat , kompetensi tidak tercatat diperoleh lewat wawancara
2	Budaya Organisasi	Wawancara	Asrena Lantamal III, Paban Renum Srena Lantamal III, Kadis Faslan Lantamal III	Budaya membutuhkan pengalaman
3	Konsep Diri	Wawancara	Wadan Lantamal III; Wadan Lantamal III, LSM Tim Penanggulangan Bencana Indonesia, Kakesbang Pemprov Jakarta Utara	Konsep diri membutuhkan pengalaman
4	Motivasi Tugas	Wawancara	Paban ops Lantamal III, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD DKI, Asops Danlantamal III, Kadisminpers Lantamal III, Wadan Lantamal III	Motivasi membutuhkan pengalaman
5	Disiplin Tugas	Dokumentasi	Dokumen Keprajuritan; Wadan Lantamal III, Kasubdit Bantuan Darat Bidang Sandang Pangan BNPB, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD DKI	Pelanggaran disiplin prajurit tercatat

1	2	3	4	5
6	Ketercapaian Visi dan Misi Organisasi	Dokumentasi	Dokumen Organisasi, Asrena Danlantamal III, Paban ops Lantamal III, Kadisyahal Lantamal III, Asops Danlantamal III, Kakesbang Pemprov Jakarta Utara, Kasubdit Jaga Pelatihan dan Standarisasi Basarnas, Kadis Faslan Lantamal III	Tersedia di laporan
7	Fasilitas Labuh	Observasi	Fasilitas Labuh, Kadis Faslan Lantamal III, Komandan KRI Lemadang, Kadisyahal Lantamal III	Harus dilihat langsung
8	Fasilitas Perbaikan	Observasi	Fasilitas Perbaikan, Kafasharkan Lantamal III	Harus dilihat langsung
9	Fasilitas Perbekalan	Observasi	Fasilitas Perbekalan, , Kadisbek Lantamal III	Harus dilihat langsung
10	Fasilitas Komunikasil	Observasi	Dokumen Kom, Kasatkom Lantamal III, Kasubsi Perangkat Komunikasi Basarnas, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD DKI	Harus dilihat langsung
11	Fasilitas Pembinaan Pangkalan	Observasi	Fasilitas Pembinaan Pangkalan, Dandenma Lantamal III	Harus dilihat langsung
12	Proses Pelaksanaan Formal	Wawancara	Asops Lantamal III, Kadisminpers Lantamal III, Kadisyahal Lantamal III, Karyawan BNPB, anggota Denma Lantamal III, Paban ops Lantamal III, Komandan KRI Lemadang, Kakesbang Pemprov Jakarta Utara, Deputi Kedaruratan BNPB, Dansatkamla Lantamal III, LSM Pos Keadilan Peduli Umat, Deputi Kesiapsiagaan BNPB, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD DKI	Belum ada dokumen yang relevan
13	Hirarki	Wawancara	Asops Lantamal III	Belum ada dokumen yang relevan
14	Aturan Koordinasi	Wawancara	Asops Lantamal III	Belum ada dokumen yang relevan
15	Strategi Pembagian Pengetahuan	Wawancara	Asops Lantamal III	Belum ada dokumen yang relevan
16	Ketersediaan Sarana	Wawancara	Fasilitas Labuh, Kadis Faslan Lantamal III, Komandan KRI Lemadang, Kadisyahal Lantamal III, Kafasharkan	Sarana embarkasi perlu data dari luar

1	2	3	4	5
			Lantamal III, Perbekalan, Kadisbek Lantamal III, Kasatkom Lantamal III, Kasubsi Perangkat Komunikasi Basarnas, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD DKI.	

Sumber: Penelitian, 2013

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif, yakni melalui:

Pertama, Reduksi Data, yaitu memilih dan memilah data-data pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Data-data yang telah didapatkan akan dilaksanakan pemilihan serta pemilahan disesuaikan dengan fokus apa yang menjadi penelitian sehingga mendapatkan data dapat menjawab permasalahan.

Kedua, *Display/penyajian Data*, yakni langkah menyajikan data dalam bentuk : kata-kata, kalimat-kalimat, gambar, simbol, skema, bagan, grafik, tabel, dan matriks. Dalam penyajian data dilaksanakan dengan merangkai kata-kata dari data yang didapatkan sehingga menjadi kalimat yang dapat menjelaskan hasil penelitian yang didukung dengan gambar, simbol, skema, bagan, grafik, tabel dan matriks yang dapat disajikan dengan benar.

Ketiga, Verifikasi Data, yaitu data yang telah terkumpul, diuji secara empiris sehingga validitas, realibilitas dan obyektivitas data teruji. Verifikasi data diperlukan sehingga hasil analisis data yang didapatkan akan bermanfaat bagi pembuatan keputusan, bila data yang ada adalah data yang baik dan benar.

Keempat, Penilaian Data, yaitu pemberian skor untuk setiap indikator. Panduan untuk memberikan skor dapat dilihat pada tabel 3.2. Penilaian akhir merupakan skor rata-rata indikator.

Tabel 3.2 Panduan untuk Pemberian Skor

Katagori	Skor/Skala
Sangat tidak mencukupi / sangat rendah / tidak siap	1
Tidak mencukupi / rendah / kurang siap	2
Cukup baik / sedang / cukup siap	3
Tinggi / baik / siap	4
Sangat tinggi / sangat baik / sangat siap	5

Sumber: Penelitian, 2013

3.3 Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan dengan menggunakan uji kredibilitas untuk menguji keabsahan data dengan cara, antara lain:

Pertama, perpanjangan pengamatan, yakni melakukan pengamatan terhadap obyek kajian secara mendalam, memerlukan waktu yang lama sehingga akan dapat diketahui validitas dan reliabilitas data yang diperoleh. Meningkatkan ketekunan, yakni menekuni data yang diperoleh secara cermat, hati-hati, dan jeli sehingga akan dapat memilah dan memilih data yang valid dan kredibel.

Kedua, triangulasi, yakni *cross check* atau pemeriksaan silang antara data, dengan tujuan untuk memperoleh kepercayaan dan akurasi data. Triangulasi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek sumber, teknik dan waktu. Triangulasi merupakan pengecekan data-data dari berbagai sumber yang didapatkan dengan berbagai cara. Mengecek kebenaran data dengan membandingkan dari sumber informasi lain dicek silang dengan menggunakan triangulasi, dengan tujuan untuk membandingkan tingkat kebenaran data dengan kenyataan sebenarnya. Triangulasi ini menguntungkan peneliti dalam dua hal, yaitu; pertama, Mengurangi risiko terbatasnya kesimpulan pada metode dan sumber informasi tertentu; kedua, Meningkatkan validitas kesimpulan sehingga lebih merambah pada ranah yang lebih luas.

Ketiga, analisis negatif, yakni memeriksa adanya responden yang menjawab atau menanggapi pertanyaan dalam wawancara secara berbeda dengan sebagian besar responden lainnya sehingga perlu ditelusuri motif dan alasannya. Jawaban negatif adalah fakta yang menyimpang dari jawaban responden lainnya, yang ditemukan saat penggalan data. Data negatif ini dapat digunakan untuk menguji dan membandingkan tentang kebenaran yang didapatkan dari yang lain, dengan data yang didapatkan.

Keempat, menggunakan *member check*, yakni meminta dan mengkonfirmasi kepada informan untuk melihat dan membaca kembali rangkuman hasil wawancara yang dilakukan peneliti sehingga informan dapat memberikan persetujuan terhadap isi wawancara tersebut. Member check dalam penelitian dilakukan dengan cara mendiskusikan hasil penelitian kepada para informan yang telah memberikan informasi pada peneliti. Dalam diskusi peneliti menyampaikan temuan-temuan yang akan dituangkan dalam penulisan tesis kepada pemberi informasi.

Kelima, interpretasi data, yakni mencari pemahaman, pemaknaan dan penghayatan terhadap data yang telah diolah. Teknik analisis data seperti ini sering disebut dengan teknik analisis *verstehen* (pemaknaan).

BAB 4

PEMBAHASAN DAN ANALISA

4.1 Hasil Pembahasan

4.1.1 Deskripsi Lantamal III

4.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Lantamal III

Lantamal III Jakarta bertugas menyelenggarakan dukungan administrasi dan logistik bagi unsur-unsur Komando Armada RI Kawasan Barat dan unsur-unsur TNI AL lainnya serta melaksanakan pembinaan potensi maritim menjadi kekuatan pertahanan dan keamanan negara di laut, menyelenggarakan operasi keamanan laut secara terbatas serta tugas-tugas lainnya berdasarkan kebijakan Kasal. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Lantamal III melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:³³

Pertama, fungsi dukungan 4 R (*Rebase, Repair, Replenishment, Rest or Recreation*) bagi satuan berupa penyiapan fasilitas pangkalan secara terbatas, antara lain Fasilitas Labuh, Fasilitas Perbaikan, Fasilitas Perawatan Personil, Fasilitas Pembinaan Pangkalan.

Kedua, Fungsi Keamanan Laut, antara lain menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan operasi keamanan laut secara terbatas dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan laut daerah, menyelenggarakan fungsi yustisi dalam rangka penyelesaian kasus-kasus tindak pidana dan penyelenggaraan hukum di laut sesuai dengan ketentuan/perundang-undangan yang berlaku, serta koordinasi dengan instansi terkait dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran hukum di laut.

Ketiga, Fungsi Binpotnaskuatmar, yaitu: (1) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan potensi nasional bidang maritim di wilayah Lantamal III yang meliputi sumber daya manusia aspek maritim, sumber daya alam dan sumber daya buatan aspek maritim, sarana dan prasarana nasional di

³³ Komando Armada Barat. Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut III (PPOP Lantamal III). Keputusan Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat. 2013

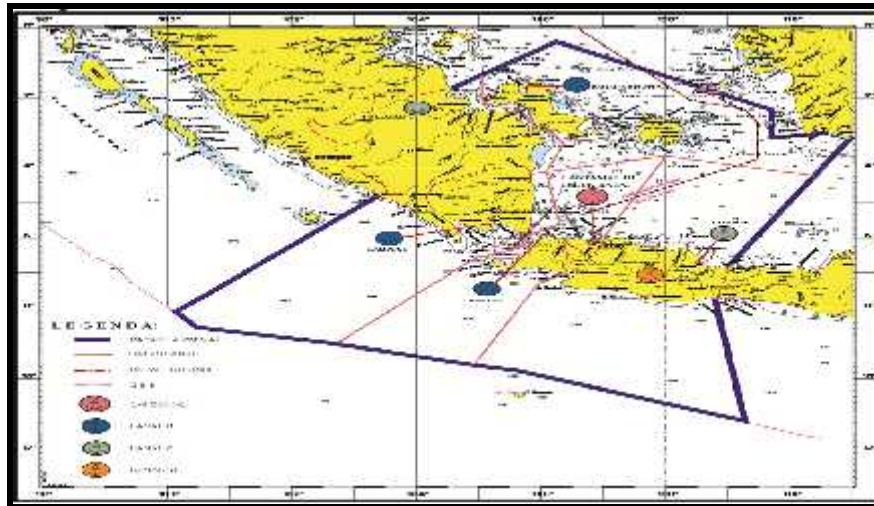
bidang maritim serta kegiatan-kegiatan pembangunan kelautan; (2) Turut serta membantu pemberdayaan wilayah pertahanan laut di Lantamal III dalam rangka menyiapkan komponen cadangan dan komponen pendukung bidang maritim; (3) Penciptaan kepercayaan masyarakat terhadap TNI AL selaku aparat penegak kedaulatan dan hukum di laut serta bekerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan desa pesisir secara terpadu.

4.1.1.2 Lingkup Wilayah Kerja Lantamal III

Luas wilayah kerja Lantamal III Jakarta adalah 537.038,2 Km², pada sebelah Selatan berbatasan dengan ZEE Samudera Hindia dengan posisi antara 06° 22' 00" S - 98° 38' 00" T dan 11° 00' 00" S - 108° 45' 00" T.³⁴ Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Karimata (wilayah Operasi Lantamal Tanjung Pinang). Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah operasi Lantamal Padang tepatnya di propinsi Bengkulu, Pulau Lingga dan Pulau Singkep. Sebelah Timur sudah memasuki wilayah Pulau Jawa, yang langsung berbatasan dengan daerah operasi Surabaya, tepatnya di Tanjung Brebes, Cilacap sampai Nusa Kambangan. Selain itu wilayah kerja Lantamal Jakarta juga dilewati Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI-I) dan berbatasan langsung dengan wilayah negara lain yaitu Australia. Secara organisasi, wilayah kerja Lantamal III Jakarta meliputi Lanal Palembang, Lanal Lampung, Lanal Babel, Lanal Banten, Lanal Cirebon, Lanal Bandung dan perairan di sepanjang Teluk Jakarta serta Kepulauan Seribu.³⁵

³⁴ Koarmabar. *Analisa daerah Operasi Armada Barat*. 2012

³⁵ Komando Armada Barat, Op. Cit, hal. 11



Gambar 4.1 Peta Wilayah Kerja Lantamal III

Sumber : Lantamal III, 2013

4.1.2 Sumberdaya Manusia Lantamal III

Komposisi Prajurit yang ada di Lantamal III terdiri dari 1 orang Perwira Tinggi dan Perwira Menengah, 218 orang Perwira Pertama dan 1323 orang Bintara serta 1180 orang Tamtama dan didukung oleh 426 orang Pegawai Negeri Sipil, dimana komposisinya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1. Komposisi Prajurit TNI AL dan PNS di Lantamal III

No	SDM	Jumlah
1.	Perwira Tinggi	1
2.	Perwira Menengah	218
3.	Bintara	1323
4.	Tamtama	1180
5.	PNS	426
Jumlah		3148

Sumber : Lantamal III, 2013

Komposisi Prajurit TNI AL dan PNS Lantamal III tersebut tersebar diseluruh departemen-departemen yang ada di lingkungan Lantamal III Jakarta. Komposisi tersebut belum termasuk jumlah personil di lanal-lanal yang berada di bawah jajaran Lantamal III.



Gambar 4.2 Personil Lantamal III

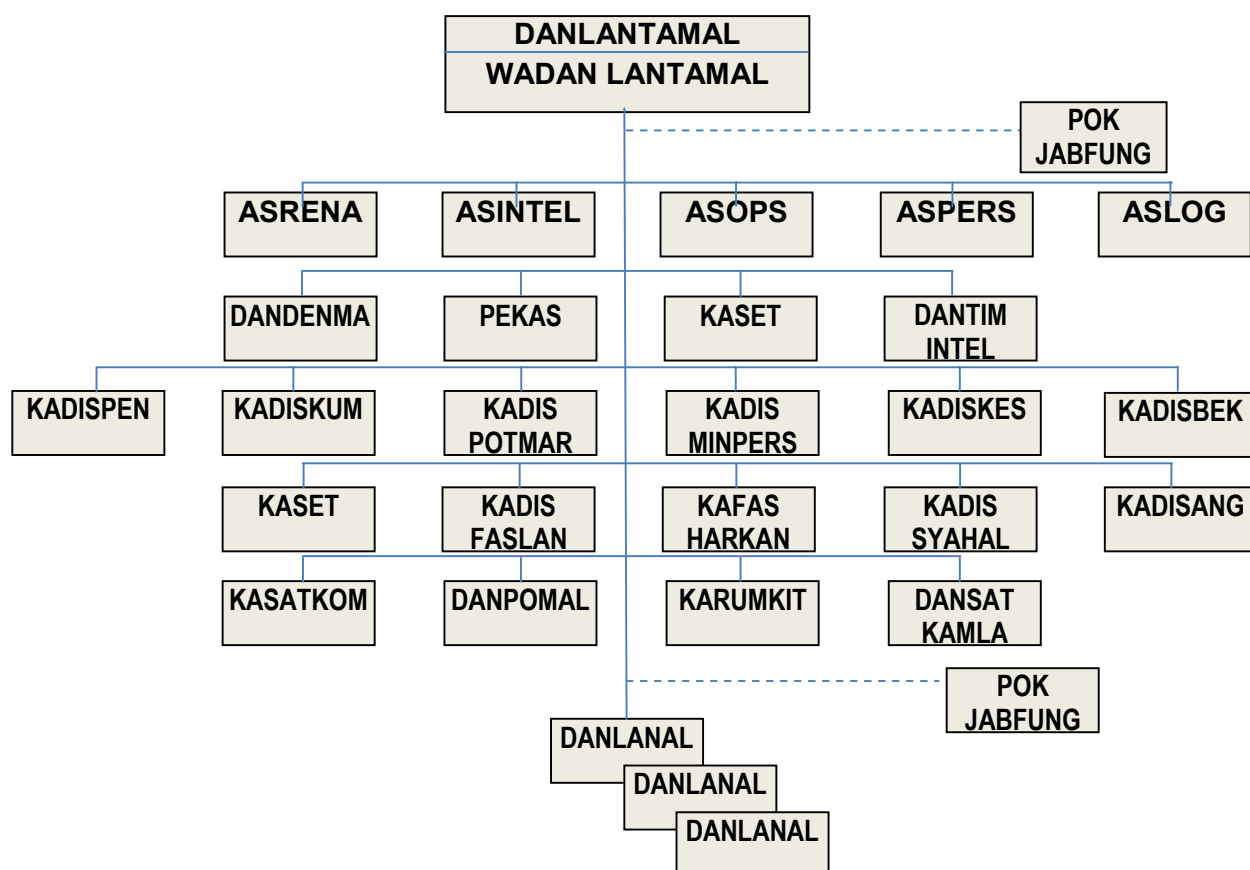
Sumber : Lantamal III, 2013

4.1.3 Organisasi Lantamal III

Lantamal merupakan Pangkalan Utama TNI AL yang menjadi tumpuan dalam mendukung tugas pokok unsur-unsur TNI AL yang terdiri dari kapal, pesawat udara dan Marinir. Berdasarkan ST Kasal No. 035/SREN/0706 TWU. 0713.1016 dan SE Kasal No. SE/6/VIII/2006 tanggal 2 Agustus 2006, TNI AL memiliki 11 buah Lantamal yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia untuk mendukung tugas pokok TNI AL.³⁶ Secara organisasi, Lantamal berada di bawah Komando armada, baik Komando Armada Barat (Koarmabar) maupun Komando Armada Timur (Koarmatim). Pada konteks ini, Lantamal III merupakan pangkalan operasional yang berada di jajaran Koarmabar.

³⁶ Mabasal. Kebijakan Strategis Tentang Pengembangan Pangkalan TNI AL Untuk Mewujudkan Stabilitas KEamanan Daerah Dalam Rangka Tetap Tegaknya NKRI. 2007

Lantamal III sebagai pangkalan utama TNI AL yang berpusat di Jakarta memiliki tugas untuk membantu keberhasilan kapal-kapal perang yang akan bergerak menuju daerah bencana dengan jalan melakukan embarkasi sumberdaya secara tepat, cepat sehingga pelaksanaan mobilisasi sumberdaya tersebut dapat diandalkan sebagai upaya penanggulangan bencana yang kompleks. Lantamal III dipimpin oleh seorang Komandan Lantamal yang membawahi beberapa staf, dengan kekuatan personel militer sebanyak 2851 dan 426 orang pegawai negeri sipil. Untuk Lebih detilnya dapat dilihat dalam gambar berikut ini:



Gambar 4.3 Struktur Organisasi Lantamal III

Sumber: Srena Lantamal III, 2013

Secara umum, fungsi pokok Lantamal adalah pangkalan yang bertugas untuk menyiapkan dan mendukung tugas pokok KRI baik

menyiapkan fasilitas Labuh, perbaikan, perawatan personil, dan Pembinaan Pangkalan. Sehingga sesuai tugas pokok Lantamal hanya menyiapkan semua keperluan untuk mendukung KRI. Kegiatan embarkasi yang dilakukan oleh personil Lantamal III hanya terkait dengan kegiatan penanggulangan bencana skala nasional karena itu Lantamal III diperintah sebagai pangkalan awal. Namun demikian, belum ada secara terstruktur organisasi di Lantamal yang spesifik untuk menanganani bencana alam.³⁷

Setelah ada perintah pelaksanaan penanggulangan bencana oleh Kasal secara berjenjang, dengan segera Staf Operasi Lantamal III membentuk organisasi Satgas Embarkasi yang dikoordinir langsung oleh Asops (Asisten Staf Operasi). Jika bencana tersebut adalah bencana nasional maka organisasi penanggulangan bencana yang meliputi Koarmabar dan Lantamal III Jakarta langsung dibentuk. Koarmabar menyiapkan KRI yang bertugas mobilisasi logistik bantuan dan relawan menuju ke daerah yang terkena dampak bencana. Sedangkan Lantamal III bertugas sebagai pendukung dalam embarkasi dari pangkalan awal sampai KRI tersebut berangkat. Untuk menjalankan dua kegiatan penanggulangan bencana dalam satu kegiatan yang berkesinambungan, dibutuhkan suatu kerjasama yang solid dan sinergitas antara organisasi embarkasi dan organisasi mobilisasi. Karena keberhasilan mobilisasi, baik kecepatan dan ketepatan tergantung dengan keberhasilan embarkasi yang dilaksanakan oleh Lantamal III sebagai pangkalan.

Untuk itu, maka dibutuhkan jumlah personil embarkasi yang cukup. Memang antara personil yang bertugas mengatur dan personil yang mengangkat beserta meletakan barang-barang tersebut di kapal adalah orang-orang yang berbeda. Dan untuk penyusunan barang-barang itu juga dibantu oleh ABK³⁸ KRI yang akan membawa barang-barang tersebut ke daerah yang terkena dampak bencana alam. Selama ini jumlah personil

³⁷Wawancara dengan Firman Noegraha, Asrena Danlantamal III, 2 September 2013, di Jakarta

³⁸ ABK dari Anak Buah Kapal, yaitu orang-orang yang bekerja di kapal. Penggunaan istilah ABK bersifat luas, tidak hanya digunakan oleh TNI Angkatan Laut saja namun juga digunakan oleh kapal-kapal sipil

yang terlibat embarkasi tidak terlalu banyak tetapi cukup saja dan jumlah mereka sekitar 13 sampai 15 orang.³⁹

Untuk menghindari terjadinya permasalahan dalam kordinasi dengan pihak-pihak lain, langkah tepat yang diambil Lantamal III adalah melakukan *briefing* secara intern organisasi embarkasi yang dibentuk dan mengatur pembagian tugas ketika pelaksanaan embarkasi sekaligus mengajak pihak-pihak lain yang terdiri dari berbagai latar belakang untuk bekerjasama. Adanya *briefing* sebelum pelaksanaan embarkasi dibenarkan oleh Deputi Tanggap Darurat BNPB, hal ini dilakukan untuk menyamakan persepsi sebelum embarkasi sehingga dengan demikian setidaknya akan menghindari terjadinya salah paham dan salah tindak. Sehingga dengan demikian, tidak terkesan masing-masing instansi melakukan tugasnya sendiri-sendiri, akan tetapi semuanya berada dalam wilayah kontrol yang sama. Tabel berikut mendetail jumlah SDM untuk setiap posisi di luar tenaga pengangkutan barang yang bersifat insidentil berdasarkan hasil wawancara dengan Paban ops Lantamal III Jakarta. Dari tabel ini diperkirakan SDM yang dibutuhkan untuk embarkasi adalah 13 hingga 15 orang (sesuai hasil wawancara dengan Rulli Riono, Paban Ops Lantamal III Jakarta).

Tabel 4.2 Jumlah SDM Lantamal III yang Terlibat Embarkasi

Posisi	SDM
Dansatgas Embarkasi	1
Anggota BNPB	3
PWA Muat KRI	Sesuai jumlah KRI
Posko Penerima	5 hingga 7
Korlap	4
Organisasi Pemberi	Tergantung jumlah Organisasi pemberi
LSM	Tergantung jumlah LSM
Pemda	Tergantung lembaga Pemda yang terlibat
Masyarakat	Tergantung masyarakat

Sumber: Hasil Wawancara dengan Paban Ops Lantamal III (diolah Peneliti, 2013)

³⁹ Wawancara dengan Rulli Riono, Paban ops Lantamal III, 2 September 2013, di Jakarta

Personil embarkasi yang berjumlah maksimal 15 orang dirasakan cukup untuk melaksanakan embarkasi, hal ini sesuai dengan pernyataan dari narasumber:

“Jumlah Tim Embarkasi memang tidak terlalu banyak namun dapat melaksanakan pergeseran logistik bantuan beserta sukarelawan yang akan berangkat bersama KRI menuju ke daerah yang terkena dampak bencana. Namun departemen lain yang ada di Lantamal III membantu pelaksanaan embarkasi, seperti Syahal Lantamal III menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan agar KRI yang akan lepas dan sandar dermaga Lantamal dapat melaksanakan dengan cepat.”⁴⁰

Dalam konteks di atas, dapat berarti bahwa Tim Embarkasi tidak bekerja sendirian. Semua sumberdaya yang terdapat di Lantamal III bekerja sama untuk mensukseskan embarkasi tersebut sesuai dengan bidang masing-masing. Hal tersebut ditegaskan oleh seorang narasumber yang mengatakan bahwa embarkasi dan mobilisasi sumberdaya menuju ke tempat yang terkena dampak bencana adalah tugas TNI AL sehingga semua bidang yang terdapat di bawah jajaran TNI AL harus membantu secara optimal. Dalam aspek embarkasi, Lantamal III diberi perintah untuk melaksanakan, sehingga seluruh komponen yang terdapat di jajaran Lantamal III harus membantu, tidak hanya Tim Embarkasi yang melaksanakan.⁴¹ Secara keseluruhan dengan keterbatasan jumlah personil, embarkasi sumberdaya dapat berjalan dengan optimal, sesuai dengan pernyataan narasumber berikut ini:

“Jumlah personil embarkasi Lantamal memang sedikit, namun berfungsi banyak, pengaturannya baik. Seluruh tugas embarkasi

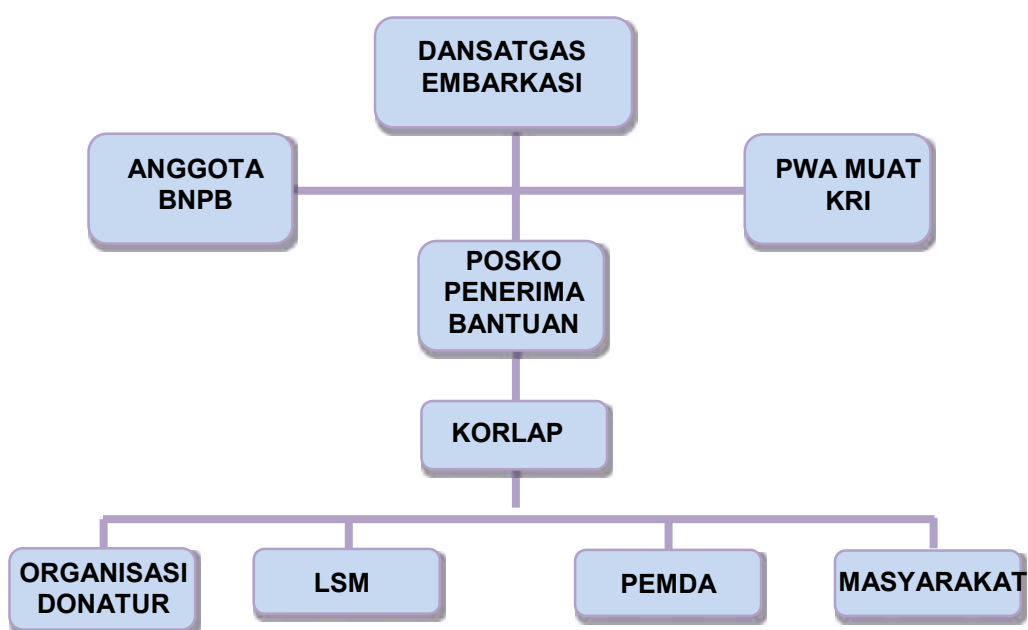
⁴⁰ Wawancara dengan Sutriyana, Kadisyahal Lantamal III, 23 Desember 2013, di Jakarta

⁴¹ Wawancara dengan Eddy Sucipto, Asops Danlantamal III Jakarta, 2 September 2013, di Jakarta

berjalan dengan baik, memang organisasi militer itu terkordinir mungkin karena kedisiplinannya.”⁴²

Pernyataan di atas ditegaskan oleh seorang narasumber yang mengatakan bahwa organisasi embarkasi Lantamal III mampu melaksanakan aktifitas tersebut dengan kontrol yang baik dan berhasil menjalankan tugas dengan baik pula.⁴³

Adapun organisasi embarkasi sumberdaya Lantamal III adalah sebagai berikut:



Gambar 4.4 Organisasi Embarkasi Lantamal III Jakarta

Sumber: Sops Lantamal III, 2013

4.1.4 Sarana Embarkasi Lantamal III

4.1.4.1 Fasilitas Pelabuhan

Dalam pengoperasian menyandarkan dan melepaskan kapal, Lantamal III Jakarta memiliki beberapa dermaga yang berfungsi untuk mendukung kegiatan tersebut. Beberapa dermaga yang dimiliki Lantamal

⁴² Wawancara dengan Beto Pasifik, Kakesbang Pemprov Jakarta Utara, 23 September 2013, di Jakarta

⁴³ Wawancara dengan Anggit Mulyo Satoto, Kasubdit Jaga Pelatihan dan Standarisasi Basarnas, 22 Desember 2013, di Jakarta

III tersebut, dibagi dalam beberapa fungsi spesifik, antara lain Dermaga Operasional dan Dermaga *Beaching*⁴⁴.

Dermaga Operasional merupakan dermaga pangkalan Angkatan Laut Jakarta yang berada di lokasi wilayah pelabuhan umum yang sebenarnya merupakan milik Pelindo. Dermaga ini merupakan dermaga lama dengan dimensi ukuran panjang 311 meter dan lebar 5 meter. Dengan konstruksi beton berotot dengan kapasitas kemampuan 1.200 ton, yang mampu disandari 4 KRI jenis *Parchim*, Perusak Kawal (PK) atau 2 KRI Perusak Kawal Rudal (PKR) + 1 Perusak Kawal (PK).



Gambar 4.5 Dermaga Operasional Lantamal III, Pondok Dayung

Sumber : Lantamal III, 2013

Dermaga baru dengan dimensi ukuran panjang 450 meter dan lebar 10 meter, dermaga satu sisi konstruksi beton berotot dengan kapasitas kemampuan 2.400 ton, belum dioperasikan karena masih menunggu pembangunan *break water* (pemecah ombak) dan pengerukan dasar lautnya untuk di dalamkan sehingga dapat disandari kapal jenis Perusak Kawal Rudal (PKR). Dermaga Kapal Angkatan Laut (KAL) dengan dimensi ukuran panjang 30 meter dan lebar 7 meter, dermaga satu sisi dengan konstruksi beton berotot, yang mampu disandari 4 KAL. Ketidaksiapan Dermaga Baru seperti yang dikatakan narasumber bahwa:

⁴⁴ Koarmabar. *Analisa daerah Operasi Armada Barat*. 2012

“Lantamal memiliki dermaga baru yang sampai saat ini belum dapat dioperasikan sebagai fasilitas labuh kapal-kapal jenis LST karena kedangkalan air.”⁴⁵

Hal ini ditegaskan oleh seorang nara sumber yang mengatakan bahwa kondisi dermaga baru saat ini tidak siap untuk disandari kapal jenis FPB,⁴⁶ apalagi kapal jenis LST⁴⁷ karena draft⁴⁸ kapal-kapal tersebut tidak sesuai dengan kedalaman air di dermaga tersebut.⁴⁹ Dermaga *Beaching* merupakan dermaga yang posisinya satu garis dengan dermaga operasional, dengan dimensi ukuran panjang 12 meter dengan kemiringan 1 berbanding 3 atau kemiringan 30 sampai dengan 40 derajat dengan lebar 20 meter. Dermaga Operasional digunakan untuk unsur KRI jenis Angkut Tank (AT) *Type Frosch*, dengan kapasitas kemampuan 2000 ton untuk 1 KRI. Posisi dermaga di jalur lintas pelayaran atau belokan menuju Dermaga Nusantara, dermaga ini digunakan untuk bongkar muat kendaraan tempur dan perbekalan tempur.

“Dermaga Operasional sesungguhnya milik Pelindo dipinjamkan kepada TNI AL, biasanya digunakan untuk proses embarkasi dan debarkasi personil dan material. Kapal jenis LST dapat sandar di sini namun harus berhati-hati karena ramai kapal karena lalu lintas lepas sandar kapal-kapal niaga. Disamping itu, dermaga ini persis di belokan.”⁵⁰

Untuk mengatasi kondisi tersebut, maka Kadis Syahal Lantamal III berkordinasi dengan Pelindo untuk menyandarkan dan melepas KRI yang membawa sumberdaya dalam konteks mobilisasi. Hal ini seperti yang dikatakan oleh seorang narasumber bahwa kordinasi dengan Pelindo

⁴⁵ Wawancara dengan Solehudin, Kadis Faslan Lantamal III, 22 Desember 2013, di Jakarta

⁴⁶ *Fast Patrol Boat*, kapal patroli yang memiliki kecepatan sampai 30 knot yang memiliki draft yang rendah sekitar 2,7 m

⁴⁷ *Landing Ship Tank*, Kapal angkut Tank yang digunakan untuk pendaratan amphi, memiliki draft yang dalam sekitar 4 m-5 m

⁴⁸ Batas air sampai ke lunas kapal

⁴⁹ Wawancara dengan Nizar Khadafi, Komandan KRI Lemadang, 24 Desember 2013, di Jakarta

⁵⁰ Wawancara dengan Solehudin, Kadis Faslan Lantamal III, 22 Desember 2013, di Jakarta

dirasakan penting untuk menghindari bahaya tubrukan ketika KRI akan disandarkan atau berangkat menuju daerah bencana.⁵¹



Gambar 4.6 Dermaga *Beaching* Lantamal III

Sumber: Lantamal III, 2013

4.1.4.2 Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan

Untuk mendukung kegiatan pemeliharaan dan perbaikan, Lantamal III Jakarta memiliki beberapa fasilitas Harkan (Pemeliharaan dan Perbaikan) yang berfungsi untuk mendukung kegiatan tersebut. Fasilitas pemeliharaan dan perbaikan, antara lain Dock Kapal, Bengkel Perkapalan, Bengkel Permesinan, Bengkel Listrik dan Elektronika.⁵²

Fasharkan (Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan) Lantamal III Jakarta dalam melakukan *docking* kapal-kapal yang perbaikan didukung dengan fasilitas dock kapal sebanyak 2 unit. Kedua fasilitas dock tersebut memiliki kemampuan yang berbeda, dock yang pertama memiliki kemampuan untuk docking kapal sampai dengan ukuran 50 gros ton. Sedangkan dock kedua lebih besar lagi, yaitu hingga ukuran kapal di bawah 500 gros ton.

⁵¹ Wawancara dengan Sutriyana, Kadisyahal Lantamal III, 23 Desember 2013, di Jakarta

⁵² Fasharkan. *Data kesiapan Lantamal Jakarta*. 2012



Gambar 4.7 Bengkel Fasharkan Lantamal III

Sumber: Lantamal III, 2013

Untuk Bengkel Perkapalan, Fasharkan memiliki 2 (dua) unit bengkel sarana perbaikan dan perawatan untuk badan kapal. Bengkel yang pertama berukuran panjang 41 meter dan lebar 33,3 meter. Bengkel kedua berukuran panjang 53 meter dan lebar 40 meter.

Bengkel Permesinan memiliki panjang 60 meter dan lebar 23 meter dengan kemampuan peralatan perbaikan sangat terbatas, hanya mampu perbaikan mesin-mesin kapal berukuran kecil. Bengkel listrik yang dimiliki Lantamal III Jakarta berukuran panjang 23 meter dan lebar 10,3 meter, sarana peralatan yang dimiliki sangat terbatas. Sedangkan bengkel elektronika berada di dalam bengkel perkapalan dengan kemampuan perbaikan dan perawatan peralatan elektronika ringan.

Dengan kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Fasharkan, sangat sulit untuk mendukung perbaikan KRI yang rusak secara optimal. Untuk itu Fasharkan bekerjasama dengan bengkel perkapalan swasta untuk melakukan perbaikan tersebut. Hal itu sesuai dengan pernyataan narasumber berikut ini:

“Kemampuan sarana Fasharkan jauh dari siap, terutama untuk perbaikan kapal-kapal berukuran besar. Apalagi kalau dikejar waktu, kita tidak mampu.”⁵³

Sebenarnya Fasharkan memiliki personil yang mampu melaksanakan perbaikan kapal baik mesin maupun bangkap (bangunan kapal) dengan baik. Personil yang terdiri dari militer dan pegawai sipil itu sudah memiliki kemampuan teknis, namun terkendala dengan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan yang tidak siap sehingga dalam mendukung perbaikan KRI untuk operasi penanggulangan bencana tidak optimal.⁵⁴

4.1.4.3 Fasilitas Pembekalan (Fasbek)

Untuk mendukung kegiatan perbekalan unsur, personil dan material, Lantamal III Jakarta memiliki beberapa fasilitas yang berfungsi untuk mendukung kegiatan tersebut. Fasilitas perbekalan itu, antara lain: Fasilitas Bekal Ulang (Bekul), Fasilitas Gudang Logistik Cair, Gudang Perbekalan Umum.⁵⁵

Adapun Fasilitas Bekal Ulang (Bekul), untuk melaksanakan penyimpanan bahan bakar, Lantamal III memiliki sarana tangki timbun dengan kapasitas hingga 30 ton. Sedangkan untuk melakukan pengisian unsur-unsur menggunakan dua unit tongkang dengan kapasitas daya tampung sebanyak 360 meter kubik. Kedua tongkang tersebut memiliki pompa untuk menstransfer bahan bakar 40 ton per jam.

Sementara Fasilitas Gudang Logistik Cair untuk mendukung perbekalan, Lantamal III memiliki gudang untuk logistik cair dengan dimensi panjang 94,5 meter dan lebar 20 meter yang digunakan untuk menampung peralatan perbekalan dan menampung minyak lincir atau pelumas dalam kemasan drum.

Sedangkan untuk Gudang Perbekalan Umum, Lantamal III Jakarta memiliki tiga buah gudang yang berguna sebagai fasilitas untuk

⁵³ Wawancara dengan Suhariyanto, Kafasharkan Lantamal III, 22 Desember 2013, di Jakarta

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ Fasbek. *Data kesiapan Lantamal Jakarta*. 2012

menampung perbekalan umum. Ketiga gudang tersebut memiliki ukuran panjang 60 meter dan lebar 20 meter dan berada dalam satu lokasi.

Meskipun Lantamal III memiliki tiga buah gudang perbekalan umum akan tetapi tidak bisa digunakan untuk mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana alam terutama pada bidang embarkasi dikarenakan ketiga gudang itu sudah terisi dengan bermacam barang-barang keperluan dinas. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber di bawah ini bahwa:

“Semua gudang yang dimiliki oleh Lantamal III telah terpakai oleh logistik dinas. Tidak cukup kalau dimasukkan barang-barang lain non dinas. Untuk barang bantuan bencana tidak bisa, apalagi jarak gudang yang kita miliki jauh dari dermaga KRI, jadi repot untuk bergeserannya.⁵⁶

4.1.4.4 Fasilitas Pembinaan Pangkalan (Fasbinlan)

Beberapa fasilitas yang dimiliki Lantamal III untuk pembinaan pangkalan antara lain Fasilitas Listrik PLN, Fasilitas Mobil Genset, dan Fasilitas Genset Permanen. Untuk Fasilitas Listrik PLN, jaringan listrik yang disuplai PLN untuk mendukung Markas Komando Lantamal III Jakarta berkemampuan 5.300 KVA. Perkantoran dan dermaga Pondok Dayung disuplai PLN dengan kemampuan 2.400 KVA. Untuk Fasilitas Mobil Genset, Pangkalan Utama Angkatan Laut III Jakarta memiliki tiga unit mobil genset. Yang pertama Merk MAN (1 unit) dengan kemampuan 380 V, 500 KVA. Kedua, Merk Detroit (1 unit) dengan kemampuan 380 V, 430 KVA. Dan yang terakhir, Merk Mercedes (1 unit) dengan kemampuan 440 V, 400 KVA. Ketiga mobil genset itu berfungsi untuk kesiapan cadangan listrik, baik untuk mendukung Mako Lantamal maupun untuk kapal yang sandar di dermaga umum. Sedangkan untuk Fasilitas Genset Permanen, generator yang dipasang secara permanen merk Mercy dengan kemampuan 380 V, 500 KVA. Generator merk Dongfang dengan

⁵⁶ Wawancara dengan Fendy Guntoyo, Kadisbek Lantamal III, 24 Desember 2013, di Jakarta

kemampuan 380 V, 375 KVA dan Generator merk Stamford dua unit dengan kemampuan 425 V, 500 KVA serta Fasilitas Generator apung dengan kemampuan 440 V, 775 KVA yang berada di dermaga Pondok Dayung. Generator yang dipasang dan disiapkan di dermaga untuk dukungan darurat bagi kapal yang sandar.⁵⁷

“Fasilitas pembinaan pangkalan yang dimiliki Lantamal III dalam kondisi terbatas saja, dapat mendukung penggunaan untuk Mako Lantamal III dan KRI namun tidak dapat berlangsung lama karena usia sarana itu sudah tua.”⁵⁸

Kondisi sarana pembinaan pangkalan yang tidak optimal menjadi faktor pokok sehingga sampai saat ini Lantamal III masih tergantung dengan PLN. Hal ini dibenarkan oleh seorang narasumber yang mengatakan bahwa Lantamal III mendapat suplay listrik untuk penerangan dan operasional kegiatan kantor dan dermaga dari PLN, penggunaan genset dan generator hanya digunakan ketika listrik PLN mati atau karena kegiatan lapangan yang menggunakan genset atau generator.⁵⁹



Gambar 4.8 Mobil Genset Lantamal III

Sumber: Lantamal III, 2013

⁵⁷ Fasbinlan. *Data kesiapan Lantamal Jakarta*. 2012

⁵⁸ Wawancara dengan Teddy Bernard, Dandenma Lantamal III, 24 Desember 2013, di Jakarta

⁵⁹ Ibid

4.1.4.5 Sarana Informasi

Sarana informasi dibutuhkan untuk mengkoordinasikan seluruh unsur. Kesiapan sarana informasi yang tersedia dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut: Ukuran dari masing-masing tingkat kesiapan adalah sangat tidak siap, tidak siap, cukup siap, siap, dan sangat siap. Ukuran ini ditafsirkan dari hasil wawancara seperti kata-kata yang mirip dan dapat mewakili bentuk kesiapan yang dimaksud.

Tabel 4.3 Kesiapan Sarana Informasi Lantamal III

No	Komponen	Bentuk Kesiapan Embarkasi	Penilaian	
			Tingkat	Skala
1	Proses Pelaksanaan Formal	Perencanaan embarkasi	Tdk Siap	1
2		Pengorganisasian embarkasi	Tdk Siap	1
3		Pelaksanaan embarkasi	Tdk Siap	1
4		Pengawasan pelaksanaan embarkasi	Siap	4
5	Hirarki	Organisasi yang spesifik menangani bencana alam	Tdk Siap	1
6	Aturan Koordinasi	Kesamaan wilayah kontrol	Krg Siap	2
7	Strategi Pembagian Pengetahuan	Koordinasi dengan instansi-instansi terkait	Krg Siap	2
Rata-rata			Kurang	1,714

Sumber: Hasil Wawancara dengan Kasatkom Lantamal III (diolah Peneliti, 2013)

Dari hasil evaluasi, diketahui bahwa secara umum Lantamal III belum siap dari segi sarana informasi. Hal yang masih harus diperbaiki adalah masih adanya ketidakjelasan dalam koordinasi yang diharapkan, hirarki organisasi yang spesifik menangani bencana alam belum ada, belum ada briefing secara intern organisasi yang dibentuk dan mengatur pembagian tugas ketika pelaksanaan embarkasi, perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan embarkasi yang belum siap setiap saat. Kondisi ini juga dijelaskan oleh seorang narasumber yang mengatakan bahwa ketidaksiapan koordinasi dengan instansi lain yang terlibat dalam embarkasi dikarenakan tidak ada briefing yang mengatur peran setiap personil yang terlibat dalam embarkasi, hal itu juga karena kondisi orang-orang dan instansi lain yang memberikan bantuan datang

silih berganti dan tidak berinteraksi secara intens dengan personil embarkasi Lantamal III.⁶⁰

Kendala terkait aspek komunikasi juga diketengahkan oleh narasumber lain yang mengatakan bahwa kesulitan yang terjadi antara pihak Lantamal III dengan instansi yang memberikan bantuan dan masyarakat karena kesulitan koordinasi yang tidak dapat diciptakan sepenuhnya. Kesulitan itu tidak menjadi kendala yang besar karena Lantamal III bisa mengatasi dengan jalan membuka posko yang sedikit banyak dapat memberikan penjelasan.⁶¹

Hal ini juga ditekankan dalam hasil wawancara dengan Eddy Sucipto Asisten operasi Lantamal III Jakarta, mengatakan:

“Salah satu risiko yang paling penting dalam tugas penanggulangan bencana alam yang dihadapi oleh Lantamal III adalah ketika bencana alam terjadi di dua lokasi sekaligus, apalagi jika Lantamal III sendiri menjadi lokasi bencana tersebut. Seperti dalam banjir rob kemarin, kita berharap tidak terjadi bencana alam di tempat lain, karena prajurit diarahkan untuk mengatasi masalah banjir tersebut. Banjir itu menyebabkan fungsi Lantamal III terganggu dan masyarakat juga kesulitan. Jadi prajurit diarahkan ke masyarakat untuk membantu, tetapi jika ada bencana di tempat lain yang membuat Lantamal III harus mendukung KRI, maka sarana yang ada tidak mencukupi.”

Selain itu, dikatakan pula kalau: “Sementara kita belum punya struktur khusus yang menandai penanggulangan Bencana, maka kita harus melihat bencana sebagai bentuk operasi sebagaimana bentuk operasi yang lain dan ada banyak bentuk operasi lain selain Operasi penanggulangan bencana.”

⁶⁰ Wawancara dengan Natsir Huseng Liwang, Kasubsi Perangkat Komunikasi Basarnas, 24 Desember 2013

⁶¹ Wawancara dengan Iwan P. Samosir, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD DKI, 24 Desember 2013

4.1.5 Deskripsi Embarkasi Sumberdaya

Secara organisasi Lantamal III Jakarta sebagai bagian dari TNI AL secara umum sangat mendukung dalam setiap operasi penanggulangan bencana. Hal ini terlihat dari standar operasi yang telah dimilikinya dimana setelah ada perintah pelaksanaan penanggulangan bencana oleh Kasal secara berjenjang, dengan segera Staf Operasi Lantamal III membentuk organisasi Satgas Embarkasi yang dikoordinir langsung oleh Asops (Asisten Staf Operasi). Jika bencana tersebut adalah bencana nasional maka organisasi penanggulangan bencana yang meliputi Koarmabar dan Lantamal III langsung dibentuk.

Koarmabar menyiapkan KRI yang bertugas mobilisasi logistik bantuan dan relawan menuju ke daerah yang terkena dampak bencana. Sedangkan Lantamal III bertugas sebagai pendukung dalam embarkasi dari pangkalan awal sampai KRI tersebut berangkat. Untuk menjalankan dua kegiatan penanggulangan bencana dalam satu kegiatan yang berkesinambungan, dibutuhkan suatu kerjasama yang solid dan sinergitas antara organisasi embarkasi dan organisasi mobilisasi. Karena keberhasilan mobilisasi, baik kecepatan dan ketepatan tergantung dengan keberhasilan embarkasi yang dilaksanakan oleh Lantamal III sebagai pangkalan awal.

Fakta memperlihatkan bahwa dukungan Lantamal III pada operasi penanggulangan bencana dilakukan dengan beberapa tahapan yang akan dijelaskan pada bagian pembahasan.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Sumberdaya Manusia Lantamal III

4.2.1.1. Profesionalisme

Secara umum, personil TNI selalu siap secara mental maupun fisik dalam tugas OMSP Bencana Alam. Walau begitu, kesiapan masih belum cukup tanpa didukung kompetensi. Sejauh ini, kompetensi SAR dan evakuasi TNI AL masih belum cukup dibandingkan kemampuan tempur.

Kurangnya kompetensi ini berakibat pada kebertopangan personil TNI AL pada komando taktis dan kompetensi tempur yang relevan dengan tugas penanggulangan bencana. Namun demikian, profesionalisme personil Lantamal III dapat diandalkan, hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber bahwa penguasaan profesi prajurit Lantamal III dapat diandalkan dalam melaksanakan setiap tugas yang menyangkut penanganan bencana.⁶²

“Setiap prajurit Lantamal III memiliki kemampuan keprajuritan yang dapat diandalkan sesuai dengan korps masing-masing. Dan kemampuan tersebut sangat bermanfaat dalam melaksanakan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Lantamal III.”⁶³

Hal tersebut di atas ditegaskan oleh seorang narasumber yang mengatakan bahwa kemampuan olah prajurit dan profesionalisme keprajuritan personil Lantamal III diperoleh saat personil tersebut mengikuti pendidikan dasar keprajuritan dan diasah di kedinasan.⁶⁴ Upaya peningkatan kompetensi dilakukan lewat pelatihan dan pendidikan serta pengalaman. Ukuran dari masing-masing tingkat profesionalisme adalah sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Ukuran ini ditafsirkan dari hasil wawancara seperti kata-kata yang mirip dan dapat mewakili kompetensi yang dimaksud. Dari penelitian yang dilaksanakan, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.4 Penilaian Kompetensi Personil Lantamal III

No	Kompetensi yang Relevan dengan Embarkasi	Penilaian	
		Tingkat	Skala
1	2	3	4
1	Melakukan pembersihan, pengamanan, dan pengaturan laut sekitar Lantamal III dengan cepat untuk masuk dan keluar kapal untuk PB	Sedang	3
2	Menilai kelayakan berlayar suatu kapal dengan cepat untuk tugas PB	Tinggi	4
3	Perbaiki kapal untuk embarkasi logistik bantuan bencana	Rendah	2

⁶² Endang Suhendar. Kasubdit Bantuan Darat Bidang Sandang Pangan BNPB

⁶³ Wawancara dengan Sutriyana, Kadisyahal Lantamal III, 23 Desember 2013, di Jakarta

⁶⁴ Wawancara dengan Ikin Sodikin, Komandan Lantamal III, 23 September 2013, di Jakarta

1	2	3	4
4	Melakukan efisiensi ruang kapal dengan cepat untuk muat personil dan Logistik bantuan bencana	Rendah	2
5	Bergerak cepat menuju lokasi bencana	Tinggi	4
6	Memberikan bantuan pada kapal yang mengalami kesulitan dengan cepat	Sedang	3
7	Melakukan perlindungan kapal dari badai di laut	Rendah	2
8	Bernavigasi pada cuaca berkabut	Tinggi	4
9	Pemadaman kebakaran kapal	Tinggi	4
10	Penyelamatan korban di laut	Sgt Tinggi	5
11	Pengetahuan tentang karakteristik bencana alam dan dampaknya	Rendah	3
	Rata-rata	Sedang	3.181

Sumber: Hasil Wawancara dengan Aspers Lantamal III (diolah Peneliti, 2013)

Dari hasil evaluasi, diketahui bahwa secara umum prajurit TNI di Lantamal III belum cukup memiliki kemampuan untuk melakukan efisiensi ruang kapal dengan cepat untuk muat personil dan bantuan kemanusiaan, melakukan perlindungan kapal dari badai di laut, pengetahuan tentang karakteristik bencana alam dan dampaknya serta perbaikan kapal untuk embarkasi logistik bantuan bencana.

4.2.1.2. Budaya Organisasi

Budaya organisasi adalah faktor dari luar prajurit yang dapat mempengaruhi perilaku dan sikap prajurit dalam mendukung penanggulangan bencana alam. Budaya organisasi TNI AL tercermin dari sumpah prajurit TNI AL. Dalam konteks embarkasi bencana alam, karena tidak dilaksanakan setiap saat, sehingga menyebabkan pengaruh positif untuk menciptakan budaya pada personil Lantamal III tidak terlalu signifikan.⁶⁵

Hal tersebut di atas ditegaskan oleh pernyataan seorang narasumber yang menyatakan bahwa organisasi kebencanaan yang belum terbentuk secara struktural menjadi penyebab kurangnya relevansi penanggulangan bencana terutama konteks embarkasi sebagai budaya

⁶⁵ Wawancara dengan Yohanis Bassang, Paban Renum Srena Lantamal III, 23 Desember 2013 di Jakarta.

organisasi yang signifikan dan menyeluruh dalam kehidupan organisasi Lantamal III.⁶⁶

Berikut hasil penilaian budaya organisasi yang relevan dengan tugas pelaksanaan embarkasi. Ukuran dari masing-masing tingkat budaya organisasi adalah sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Ukuran ini ditafsirkan dari hasil wawancara seperti kata-kata yang mirip dan dapat mewakili karakteristik yang dimaksud.

Tabel 4.5 Budaya Organisasi Lantamal III

No	Komponen	Karakteristik Budaya Organisasi	Penilaian	
			Tingkat	Skala
1	Kepemimpinan	Danlantamal melakukan perubahan-perubahan dalam tubuh organisasi untuk mengantisipasi bencana alam	Rendah	2
2	Norma & Praktek Manajemen	Bencana alam dipandang sebagai ancaman yang mengganggu stabilitas keamanan laut	Sedang	3
3		Prihatin terhadap kejadian bencana alam	Rendah	2
4		Mempelajari aspek manajemen bencana secara mandiri	Rendah	2
5		Membicarakan tentang bencana antar sesama prajurit	Sedang	3
6	Cerita dan Tokoh	Prajurit dengan pengalaman embarkasi berbagi pengalaman dengan prajurit yang belum pernah berhadapan melaksanakan embarkasi	Sedang	3
7		Terdapat tokoh panutan dalam plaks embarkasi	Rendah	2
8	Lambang	Terdapat lambang khusus untuk menunjukkan pentingnya melaksanakan embarkasi	Rendah	2
9		Terdapat pangkat khusus untuk menunjukkan prestasi di bidang embarkasi	Sedang	3
10	Tradisi dan Ritual	Pelatihan berkala tentang manajemen bencana	Sedang	3
11		Embarkasi menjadi salah satu tema dalam pembicaraan saat menerima tamu dari AL asing.	Sedang	3
12		Embarkasi menjadi salah satu tema dalam pembicaraan saat berkunjung ke Lantamal atau unit TNI AL lainnya	Sedang	3
13		Terdapat simulasi berkala proses dukungan Lantamal ketika terjadi embarkasi	Sedang	3
Rata-rata			Rendah	2,615

Sumber: Hasil Wawancara dengan F. Nugraha, Asrena Lantamal III (diolah Peneliti, 2013), dijakarta

⁶⁶ Wawancara dengan Solehudin, Kadis Faslan Lantamal III, 23 Desember 2013, di Jakarta

Dari hasil evaluasi, diketahui bahwa secara umum prajurit TNI di Lantamal III telah kurang memiliki budaya organisasi yang baik. Hal yang masih harus diperbaiki adalah perlunya Danlantamal melakukan perubahan-perubahan dalam tubuh organisasi untuk mengantisipasi bencana alam, sikap prajurit yang masih kurang prihatin terhadap kejadian bencana alam, keengganan prajurit untuk belajar sendiri mengenai aspek-aspek manajemen bencana, kurangnya tokoh panutan dalam melaksanakan embarkasi di kalangan prajurit, dan tidak adanya lambang khusus untuk menunjukkan pentingnya penanggulangan bencana alam. Hal ini salah satunya dapat ditunjukkan pula oleh hasil wawancara berikut:

“Sebenarnya budaya di Lantamal III tidak jauh berbeda dengan budaya TNI secara umum. Hanya saja karakteristik penanggulangan bencana alam berbeda dengan ancaman lain. Kalau ancaman lainnya kita bisa mengandalkan intelijen misalnya karena ancaman seperti itu datang dari manusia yang perilakunya dapat diperkirakan dan diamati. Tetapi kalau bencana alam, itu berbagai jenis, dan sifatnya berbeda-beda. Sehingga menimbulkan kesulitan dalam struktur organisasi guna menghadapi bencana alam lalu sehingga perlu perlu struktur organisasi/jabatan khusus untuk hel tersebut. Pelatihan atau simulasi itu sering dilakukan, akan tetapi untuk perubahan struktur belum dilakukan. Disamping Lantamal belum memiliki banyak pengalaman dalam keterlibatan pada embarkasi tugas penanggulangan bencana alam kecuali pada penanggulangan bencana alam di Aceh dan Mentawai Tahun 2004.”⁶⁷

4.2.1.3. Konsep Diri

Konsep diri merujuk pada kemampuan prajurit TNI melihat dirinya sendiri lewat pengalaman, pemikiran, dan pergaulannya. Konsep diri yang positif akan mendukung kinerja prajurit TNI AL dalam mendukung

⁶⁷ Wawancara dengan Firman Noegraha, Asrena Danlantamal III, 2 September 2013, di Jakarta

penanggulangan bencana alam. Konsep diri yang negatif akan berdampak sebaliknya. Konsep diri penting bagi prajurit TNI karena dalam pergerakan yang kolektif dan tanpa penanda individual yang jelas, seorang prajurit dapat merasa dirinya tidak memperoleh penghargaan yang selayaknya, dibandingkan jika ia bergerak sendiri atau menonjol dalam kelompok.

“Perbedaan antara level Perwira dengan Bintara dan Tamtama terletak pada cara berpikir, bergaul dan bertindak, itu membentuk konsep diri mereka. Hal itu juga yang menjadi penilaian dalam berinteraksi dengan masyarakat dan instansi lain seperti BNPB, Perwira sudah memiliki kemampuan berinteraksi dengan luwes sementara level anggota, artinya Bintara, Tamtama masih memiliki kendala. Tapi tidak semua anggota, banyak juga anggota yang memiliki pengetahuan baik sehingga luwes dalam berinteraksi sehingga keterlibatan mereka dirasakan penting dalam penanggulangan bencana alam.”⁶⁸

Seorang narasumber mengatakan bahwa keyakinan prajurit Lantamal III dalam melaksanakan embarkasi logistik sangat tinggi dan mampu memberi keyakinan kepada masyarakat dan donatur yang membawa logistik bantuan serta para sukarelawan bahwa mereka dapat diandalkan dalam tugas tersebut.⁶⁹

Hal tersebut diatas ditegaskan oleh nara sumber lain yang mengatakan bahwa sikap dan seragam prajurit Lantamal III memberikan keyakinan sehingga menunjukkan bahwa prajurit tersebut merasa penting dalam keterlibatannya dalam penanggulangan bencana.⁷⁰

Tabel berikut menunjukkan konsep diri personil Lantamal III berdasarkan hasil observasi. Ukuran dari masing-masing tingkat konsep diri adalah sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi.

⁶⁸ Wawancara dengan Much. Richard , Wadan Lantamal III, 23 Desember 2013, di Jakarta

⁶⁹ Wawancara dengan Sutrimo, LSM Tim Penanggulangan Bencana Indonesia, 3 September 2013, di Jakarta

⁷⁰ Wawancara dengan Beto Pasifik, Kakesbang Pemprov Jakarta Utara, 23 September 2013, di Jakarta

Ukuran ini ditafsirkan dari hasil wawancara seperti kata-kata yang mirip dan dapat mewakili karakteristik yang dimaksud.

Tabel 4.6 Konsep Diri Personil Lantamal III

No	Karakteristik Konsep Diri	Penilaian	
		Tingkat	Skala
1	Merasa dirinya sebagai orang yang sangat penting untuk terlibat dalam embarkasi	Tinggi	4
2	Merasa dirinya sebagai orang yang sangat diandalkan masyarakat untuk menanggulangi bencana	Tinggi	4
3	Melihat bahwa tindakannya setelah menjalankan tugas bukan sebuah pengorbanan ataupun tanggung jawab namun sebagai bentuk hak yang patut ia dapatkan	Rendah	2
	Rata-rata	Sedang	3,333

Sumber: Hasil Wawancara dengan Much. Richard, Wadan Lantamal III (diolah Peneliti, 2013)

Dari hasil evaluasi, diketahui bahwa secara umum prajurit TNI di Lantamal III telah memiliki konsep diri yang positif. Hal yang masih harus diperbaiki adalah persepsi personil yang masih melihat bahwa tindakan mereka dalam pelaksanaan embarkasi sebagai langkah menjalankan tugas, sebuah pengorbanan, atau pelaksanaan tanggung jawab, ketimbang hak yang harus mereka ambil sebagai seorang yang sangat penting untuk terlibat dalam penanggulangan bencana alam.

4.2.1.4. Motivasi Tugas

Ada banyak motivasi yang mendorong seorang prajurit TNI AL bertindak. Motivasi tugas dapat bersifat ekstrinsik ataupun intrinsik. Motivasi menjalankan tugas yang baik semestinya bersifat intrinsik sehingga tidak bermasalah ketika faktor-faktor luar berubah menjadi lebih buruk. Walau begitu, adanya motivasi ekstrinsik lebih baik daripada tidak

termotivasi sama sekali. Tabel berikut menunjukkan motivasi tugas prajurit TNI AL di Lantamal III berdasarkan hasil wawancara. Ukuran dari masing-masing tingkat motivasi adalah sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Ukuran ini ditafsirkan dari hasil wawancara seperti kata-kata yang mirip dan dapat mewakili karakteristik yang dimaksud.

Tabel 4.7 Motivasi Tugas Personil Lantamal III

No	Tipe	Motivasi yang Relevan dengan embarkasi	Penilaian	
			Tingkat	Skala
1	Motivasi Intrinsik	Merasa perlu untuk terlibat dalam embarkasi	Sedang	3
2		Ingin mendapatkan pengalaman tentang embarkasi	rendah	2
3		Memiliki cita-cita untuk membantu masyarakat dalam situasi bencana	Sedang	3
4	Motivasi Ekstrinsik	Ingin mendapatkan prestasi dengan terlibat pada embarkasi	Sedang	3
5		Takut mendapatkan hukuman jika tidak melaksanakan perintah embarkasi	Tinggi	4
6		Ingin melaksanakan tugas diluar profesi pokoknya seperti penanganan bencana	Rendah	2
Rata-rata			Sedang	3,166

Sumber: Hasil Wawancara dengan Paban Ops Lantamal III (diolah Peneliti, 2013)

Dari hasil evaluasi, diketahui bahwa secara umum personil Lantamal III telah memiliki motivasi yang positif dalam tugas yang harus diaplikasikan dalam penanggulangan bencana. Hal yang masih harus diperbaiki adalah kurangnya keinginan untuk mendapatkan pengalaman tentang penanggulangan bencana alam dan kurangnya keinginan melaksanakan tugas diluar profesi pokoknya seperti penanganan bencana. Rendahnya motivasi ini datang dari kurangnya pengalaman dalam operasi Penanggulangan Bencana. Menurut wawancara: "Kalau motivasi prajurit sekarang agak sulit untuk penanggulangan bencana alam. Karena belum ada struktur organisasi khususnya maka pada penanggulangan bencana alam juga diperlakukan sama dengan operasi lainnya."⁷¹

⁷¹ Wawancara dengan Letkol Laut (P) Rulli Riono, Paban Ops Lantamal III, 2 September 2013, di Jakarta

“Anggota Lantamal III Jakarta melakukan kegiatan dalam embarkasi hanya karena diperintah komandannya. Tapi tidak ada dari mereka yang berusaha untuk menghindar. Mereka loyal melaksanakannya.”⁷²

Ada kecendrungan prajurit hanya peduli terhadap profesionalisme mereka dalam tugas OMP, hal tersebut yang menjadi motivasinya sehingga ketika ada tugas lain yang berbeda di luar jalur tersebut, secara langsung atau tidak langsung akan mengurangi motivasi mereka untuk bertindak melaksanakan perintah tersebut.⁷³

“Anggota hanya mengambil tindakan ketika diberi perintah, untuk motivasi atau berinisiatif mengerjakan awal, tidak ada. Mungkin karena kondisi proses awal penerimaan anggota seperti itu. Dibutuhkan prajurit yang melaksanakan perintah saja.”⁷⁴

Untuk meningkatkan motivasi prajurit dalam melaksanakan tugasnya, organisasi TNI AL memberikan *reward* secara intensif, bahkan akan memberikan *reward* yang terbaik seperti kenaikan pangkat luar biasa ketika prajurit tersebut berhasil dan berprestasi dalam melaksanakan tugasnya.⁷⁵

4.2.1.5. Disiplin Tugas

Disiplin tidak dapat dilepaskan dari hidup seorang prajurit. SDM TNI AL akan dinilai buruk jika disiplin tidak ditegakkan. Dari hasil evaluasi, diketahui bahwa secara umum prajurit TNI di Lantamal III telah sangat disiplin. Tidak ada aspek yang harus diperbaiki dalam hal kedisiplinan personil Lantamal III. Hal ini didukung oleh pernyataan wawancara:

⁷² Wawancara dengan Iwan P. Samosir, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD DKI, 24 Desember 2013, di Jakarta

⁷³ Wawancara dengan Eddy Sucipto, Asops Danlantamal III, 2 September 2013, di Jakarta

⁷⁴ Wawancara Prasetyo, Kadisminpers Lantamal III, 23 Desember 2013, di Jakarta

⁷⁵ Wawancara dengan Much. Richard, Wadan Lantamal III, 23 Desember 2013, di Jakarta

“Khususnya dalam disiplin, TNI dari angkatan manapun selalu tinggi, disiplin merupakan bagian utama yang membedakan TNI dengan sipil. Sesungguhnya aspek disiplin prajurit TNI memang merupakan suatu keandalan dalam melaksanakan penanggulangan bencana.”⁷⁶

Hal ini diakui oleh personil BNPB yang telah beberapa kali bekerja sama dengan personil TNI dalam rangka penanggulangan bencana di Mentawai. Dalam konteks ini dikatakannya bila kedisiplinan prajurit TNI itu memudahkan setiap kegiatan penanganan bencana, baik ketika tahap tanggap darurat, maupun ketika tahap rehabilitasi dan kontruksi.”⁷⁷ Kedisiplinan dari personil Lantamal III menjadi sebuah tolok ukur positif dalam pelaksanaan embarkasi. Salah satu komponen utama dari prajurit Lantamal III yang selalu diandalkan dalam embarkasi adalah kedisiplinan prajuritnya sehingga pelaksanaan embarkasi dapat terlaksana dengan baik.⁷⁸

Dalam menjalani kehidupannya, setiap prajurit TNI AL selalu berada pada koridor yang membatasi, yaitu kedisiplinan sebagai prajurit TNI AL yang berpedoman pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Untuk mengaplikasikan hal tersebut, maka diberikan aspek *reward* dan *punishment* yang akan mengarahkan prajurit tersebut pada koridor berperilaku yang baik sesuai dengan harapan pimpinan. Untuk itu peran atasan menjadi hal yang utama dalam mengontrol dengan jalan selalu memberikan pengarahan-pengarahan yang baik yang akan menjadi pedoman dalam berdinamika dan berperilaku di lingkungan sekitarnya. TNI AL selalu berupaya untuk memberikan sanksi dan pujian yang berimbang dengan tindakan yang diambil oleh prajurit dengan harapan dapat

⁷⁶ Ibid

⁷⁷ Endang Suhendar. Kasubdit Bantuan Darat Bidang Sandang Pangan BNPB, 24 Desember 2013

⁷⁸ Wawancara dengan Iwan P. Samosir, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD DKI, 24 Desember 2013, di Jakarta

memberikan pilihan yang positif bagi prajurit tersebut dalam kehidupannya berdinamis dan dilingkungkannya.⁷⁹

Tabel 4.8 Disiplin Personil Lantamal III

No	Karakteristik Disiplin yang Relevan dengan Penanggulangan Bencana Alam	Penilaian	
		Tingkat	Skala
1	Jumlah pelanggaran disiplin	Sedang	3
2	Kesesuaian pemberian sanksi disiplin dengan pelanggaran yang dilakukan	Tinggi	4
	Rata-rata	Tinggi	3,5

Sumber: Hasil Wawancara dengan Wadan Lantamal III (diolah Peneliti, 2013)

Berdasarkan seluruh aspek SDM di atas, maka dapat disimpulkan bahwa SDM Lantamal III memiliki disiplin tinggi dalam tugas mendukung penanggulangan bencana alam.

Organisasi yang baik selalu membutuhkan dukungan sumberdaya manusia (SDM) yang kompeten, begitu juga Lantamal III yang merupakan komponen Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) TNI AL, dimana keberadaan SDM yang terdiri dari Prajurit dan PNS dalam memenuhi tuntutan tugas dan fungsinya dapat dioptimalkan sehingga tujuan dari organisasi dapat tercapai secara efektif. Kemampuan dari SDM Lantamal III dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya sangat penting, keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok Lantamal III tergantung dari kesiapan dan profesionalisme prajurit Lantamal III. Begitu juga dalam memenuhi tugas dan keterlibatannya pada kegiatan embarkasi terutama pada penanggulangan Bencana Alam. Menentukan sumberdaya manusia sebagai subyek, sumber daya sarana dan prasarana maupun dukungan anggaran yang akan digunakan untuk mendukung penanggulangan dan pengurangan resiko (mitigasi). Hal ini sesuai dengan Konsep Kampanye

⁷⁹ Wawancara dengan Much. Richard, Wadan Lantamal III, 23 Desember 2013, di Jakarta

Militer yang mendetilkan konteks penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Lantamal III membutuhkan sumberdaya manusia sebagai subyek dalam pelaksanaan embarkasi untuk mengirim logistik bantuan ke daerah yang terkena dampak bencana. Tidak dapat disangkal bahwa Konsep Kampanye Militer berhubungan dengan kondisi politik nasional, sehingganya keberhasilan suatu kestabilan kondisi politik nasional sangat tergantung dengan keberhasilan penanganan bencana alam apalagi yang berskala nasional.

Dalam Konsep Kampanye Militer dikatakan bahwa sangat penting menentukan sumberdaya manusia sebagai subyek yang menjadi aktor dalam operasi penanganan bencana ini. Hal itu sepenuhnya benar karena peran dari sumberdaya manusia sangat penting dalam penanganan bencana. Termasuk dalam konteks embarkasi, karena keberhasilan mobilisasi sumberdaya ke daerah yang terkena dampak bencana sangat tergantung dengan ketepatan dan kecepatan proses embarkasi sehingga logistik bantuan yang dibawah itu merupakan barang yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat yang terkena dampak bencana dan tiba dengan cepat agar dapat mengeliminir jumlah korban.

Sebagaimana diketahui, fakta memperlihatkan bahwa Lantamal III seringkali terlibat dalam operasi penanggulangan Bencana Alam seperti yang pernah dilakukannya pada penanggulangan Bencana Tsunami di Aceh Gunung Merapi dan Gempa Bumi di Padang Sumatera Barat, sebagaimana dijelaskan oleh seorang narasumber bahwa Lantamal III berperan dalam embarkasi logistik bantuan yang dibawah oleh KRI. Dalam konteks komponen personil, dapat disimpulkan bahwa kualitas personil Lantamal III dapat ditinjau dari lima aspek yaitu profesionalisme, budaya organisasi, konsep diri, motivasi tugas, dan disiplin tugas sehingga didapat ukuran optimal dalam mengukur kualitas dari sumberdaya manusia dalam embarkasi. Pada penelitian ini, didapatkan data yaitu secara profesionalisme, personil Lantamal III dinilai cukup baik⁸⁰, adapun yang harus ditingkatkan adalah kemampuan melakukan

⁸⁰ Wawancara dengan Kadisyahal Lantamal III, Aspers Lantamal III, di Jakarta.

efisiensi ruang kapal dengan cepat, melakukan perlindungan kapal dari badai di laut, pengetahuan tentang karakteristik bencana alam dan dampaknya serta perbaikan kapal untuk embarkasi logistik bantuan bencana. Pada budaya organisasi, personil Lantamal III dapat dinilai kurang.⁸¹ Terutama pada tindakan yang harus dilakukan untuk merubah organisasi dalam mengantisipasi bencana alam, sikap prajurit yang masih kurang prihatin terhadap kejadian bencana alam, keengganan prajurit untuk belajar sendiri mengenai aspek manajemen bencana, kurangnya tokoh panutan dalam penanggulangan bencana di kalangan prajurit, dan tidak adanya lambang khusus untuk menunjukkan pentingnya penanggulangan bencana. Konsep diri personil Lantamal III dinilai positif. Hal yang masih harus diperbaiki adalah persepsi personil yang masih melihat bahwa tindakan mereka dalam penanggulangan bencana sebagai langkah menjalankan tugas atau pelaksanaan tanggung jawab. Personil Lantamal III memiliki motivasi yang positif. Hal yang diperbaiki adalah kurangnya keinginan untuk mendapatkan pengalaman tentang penanggulangan bencana dan melaksanakan tugas diluar profesi. Sedangkan kedisiplinan SDM Lantamal III memiliki kemampuan tinggi dalam mendukung penanggulangan Bencana Alam.⁸²

Kekurangan dalam lima komponen personel tersebut terjadi dikarenakan kurangnya pengalaman penugasan yang berkenaan dengan penanganan bencana alam, terutama pada bidang embarkasi. Disamping itu, personil Lantamal III masih sangat kurang menerima pelatihan dan pelajaran terkait kebencanaan sehingga yang terlihat adalah personil menemui kesulitan untuk melakukan embarkasi logistik yang bersifat khusus, seperti obat-obatan dan barang bantuan lain yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat yang terkena dampak bencana. Hal itu sesuai dengan narasumber yang mengatakan bahwa keterbatasan pengetahuan personil Lantamal III mengenai jenis-jenis logistik bantuan, terutama obat-obatan menjadi kendala signifikan di dalam pelaksanaan

⁸¹ Wawancara dengan Kadis Faslan Lantamal III, Asrena Danlantamal III, di Jakarta

⁸² Wawancara dengan Kasubdit Bantuan Darat Bidang Sandang Pangan BNPB, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD DKI, Wadan Lantamal III, di Jakarta.

embarkasi barang-barang tersebut ke KRI. Pernyataan itu ditegaskan oleh seorang narasumber bahwa personil Lantamal III sudah terbiasa melaksanakan embarkasi namun untuk embarkasi barang-barang dan alat-alat terkait dengan penanggulangan bencana pada tataran praktis belum optimal sehingga dibutuhkan pelatihan serta ketrampilan khusus penanganan logistik bantuan. Dan di lingkungan Lantamal III kegiatan pelatihan semacam ini belum pernah dilaksanakan.

Namun demikian, dalam aspek profesionalisme, personil Lantamal III memiliki kelebihan didalamnya, sehingga kemampuan profesi ini dapat diandalkan untuk mempermudah dalam pelaksanaan embarkasi walaupun pada kenyataannya organisasi embarkasi tidak terstruktur pada organisasi Lantamal III sehingga baru dibentuk ketika terjadi bencana dan menyebabkan budaya organisasi yang sesungguhnya sama dengan budaya organisasi TNI⁸³ tidak dapat menciptakan suatu relevansi mengenai kebencanaan di lingkungan Lantamal III. Kondisi ini semakin terlihat karena perbedaan konsep diri antara level Perwira, Bintara dan Tamtama yang tentu saja memiliki pengetahuan yang berbeda⁸⁴ sehingga ketika berinteraksi dengan personil dari instansi lain pada saat embarkasi terjadi perbedaan keluwesan dalam konteks interaksi. Dan hal ini mempengaruhi sinergitas yang terjalin antara Lantamal III dengan instansi tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa motivasi personil Lantamal III cukup baik⁸⁵ walaupun pada awalnya mereka melaksanakan embarkasi atas perintah atasannya sehingga mengurangi inisiatif personil untuk bekerja secara optimal, terutama karena organisasi embarkasi memang belum terstruktur. Namun demikian, kedisiplinan personil Lantamal III dapat dinilai baik dan sangat bermanfaat sehingga dapat diandalkan dalam pelaksanaan embarkasi.

Secara keseluruhan, dari kelima komponen personil dapat kita nilai bahwa personil Lantamal III siap dalam pelibatangannya mendukung

⁸³ Wawancara dengan Asrena antamal III, di Jakarta

⁸⁴ Wawancara dengan Wadan Lantamal III, di Jakarta

⁸⁵ Wawancara dengan Paban Ops Lantamal III, di Jakarta

penanggulangan bencana pada bidang embarkasi. Dalam konteks Manajemen Darurat, Fred Cuny mengatakan bahwa proses Manajemen Darurat berlangsung dalam yang lama memiliki kesamaan dengan manajemen tradisional. Yang membedakan Manajemen Darurat dilaksanakan pada waktu yang mendesak sehingga semua keputusan berisiko tinggi bila terjadi kesalahan. Untuk itu maka dibutuhkan personil yang memiliki kualitas tinggi yang meliputi lima aspek komponen personil. Namun demikian, dari embarkasi yang telah dilaksanakan, sumberdaya personil Lantamal III telah mampu melaksanakan Manajemen Darurat sehingga dapat mendukung pelaksanaan mobilisasi sumberdaya yang dilakukan oleh KRI.

4.2.2 Analisis Organisasi Lantamal III

4.2.2.1 Aspek Tujuan Strategis

Visi dari Lantamal III adalah “memiliki kesiapan operasi dan kecepatan gerak yang tinggi guna mendukung satuan-satuan operasional TNI AL dan dapat menciptakan stabilitas keamanan laut di wilayah kerjanya”. Visi ini dapat diadaptasi menjadi visi khusus yang berorientasi pada operasi penggulangan bencana menjadi (1) memiliki kesiapan operasi dan kecepatan gerak yang tinggi guna mendukung satuan-satuan operasional TNI AL dalam menjalankan penanggulangan bencana, dan (2) menciptakan stabilitas keamanan laut bagi TNI AL dalam menjalankan penanggulangan bencana di wilayah kerjanya. Visi pertama memiliki dua sub-visi yaitu (a) memiliki kesiapan operasi dalam mendukung satuan-satuan operasional TNI AL dalam menjalankan penanggulangan bencana, dan (b) memiliki kecepatan gerak yang tinggi guna mendukung satuan-satuan operasional TNI AL dalam menjalankan penanggulangan bencana. Abstraksi visi ini menjadi indikator menghasilkan tiga indikator ketercapaian visi yaitu (1) kesiapan operasi, (2) kecepatan gerak yang tinggi, dan (3) Kemampuan menciptakan stabilitas laut.

Misi merupakan aspek yang tidak seabstrak visi namun tidak pula sekonkrit tujuan. Pada umumnya, misi merupakan upaya konkretisasi dari visi. Misi dari Lantamal III adalah (1) melaksanakan dukungan 4 R (*Rebase, Repair, Replenishment, dan Rest or Recreation*), (2) melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut (Binpotnaskuatmar dan Bintermatla) di wilayah kerja Lantamal III, dan (3) melaksanakan operasi keamanan laut terbatas dalam rangka penegakan kedaulatan dan hukum di wilayah kerja Lantamal III. Ketiga misi ini juga dapat diadaptasi menjadi misi yang spesifik penanggulangan bencana yaitu (a) melaksanakan dukungan 4 R pada operasi penanggulangan bencana, (b) Melaksanakan pemberdayaan sinergitas instansi lain untuk mendukung operasi penanggulangan bencana, dan (c) melaksanakan operasi keamanan laut terbatas untuk mendukung penanggulangan bencana. Tiga misi ini dapat didekomposisi menjadi 8 indikator, 4 untuk misi pertama, dan masing-masing dua untuk misi kedua dan ketiga.

4.2.2.2 Ketercapaian Tujuan

Untuk mengukur ketercapaian tujuan dengan masing-masing tingkat ketercapaian visi misi secara hierarki yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Ukuran ini ditafsirkan dari hasil wawancara seperti kata-kata yang mirip dan dapat mewakili tujuan yang dimaksud.

Tabel 4.9 Ketercapaian Visi dan Misi Organisasi Lantamal III

No	Komponen	Tujuan yang Relevan dengan penanggulangan Bencana	Penilaian	
			Tingkat	Skala
1	2	3	4	5
1	Visi 1	Kesiapan operasi untuk mendukung penanggulangan bencana	Sedang	3
2		Kecepatan gerak yang tinggi saat penanggulangan bencana	Tinggi	4
3	Visi 2	Kemampuan menciptakan stabilitas laut ketika penanggulangan bencana	Rendah	2

1	2	3	4	5
4	Misi 1	Melaksanakan dukungan Rebase untuk penanggulangan bencana	Rendah	2
5		Melaksanakan dukungan Repair untuk penanggulangan bencana	Tinggi	4
6		Melaksanakan dukungan Replenishment untuk penanggulangan bencana	Rendah	2
7		Melaksanakan dukungan Rest or Recreation untuk penanggulangan bencana	Sedang	3
8	Misi 2	Melaksanakan pemberdayaan sinergitas instansi lain untuk mendukung penanggulangan bencana	Sedang	3
9		Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut dengan Bintermatla untuk penanggulangan bencana	Sangat Tinggi	5
10	Misi 3	Melaksanakan operasi keamanan laut terbatas dalam rangka penegakan kedaulatan saat penanggulangan bencana	Sedang	3
11		Melaksanakan operasi keamanan laut terbatas dalam rangka penegakan hukum saat penanggulangan bencana	Sedang	3
Rata-rata			Sedang	3,09

Sumber: Hasil Wawancara dengan Asops Danlantamal III (diolah Peneliti, 2013)

Dari hasil evaluasi, diketahui bahwa secara umum Lantamal III memiliki visi dan misi dalam mendukung tugas embarkasi. Hal yang masih harus diperbaiki adalah penambahan organisasi yang secara khusus menangani penanggulangan bencana alam.

Lantamal III belum memiliki organisasi yang benar-benar khusus menangani bencana alam. Demikian juga dengan organisasi embarkasi sumberdaya untuk mendukung mobilisasi sumberdaya bantuan ke daerah yang terkena dampak bencana. Yang terjadi adalah ketika ada bencana maka Lantamal III membentuk organisasi embarkasi yang terdiri dari personil dari berbagai departemen. Dari wawancara didapat jumlah jumlah personil yang terlibat embarkasi berjumlah sekitar 13 sampai 15 orang.⁸⁶ Adapun personil yang termasuk di dalam organisasi embarkasi bertugas mengatur pelaksanaan embarkasi, sedangkan personil yang mengangkat barang-barang tersebut ke KRI adalah orang-orang yang berbeda. Dengan jumlah personil itu embarkasi dapat terlaksana dengan baik

⁸⁶ Wawancara dengan Paban Ops Lantamal III dan Kakesbang Pemprov Jakarta Utara.

karena departemen lain yang terdapat di dalam Lantamal III membantu pelaksanaan embarkasi sesuai dengan bidang masing-masing.

Dalam komponen organisasi, peneliti menganalisis visi dan misi yang terdapat pada organisasi embarkasi. Walaupun organisasi embarkasi merupakan organisasi yang dibentuk ketika adanya bencana alam, tetapi dapat dinilai bahwa organisasi embarkasi cukup mampu melaksanakan tugasnya. Indikatornya adalah adanya ketercapaian visi dan misi yang dijadikan komponen. Dari dua visi dan tiga misi dalam sebelas tujuan yang relevan dengan operasi penanggulangan bencana didapatkan nilai sedang⁸⁷ sehingga dapat dikatakan organisasi embarkasi sumberdaya Lantamal III untuk mendukung mobilisasi sumberdaya ke daerah yang terkena dampak bencana cukup mampu melaksanakan tugasnya. Adapun hal-hal yang harus diperbaiki adalah kemampuan menciptakan stabilitas laut ketika penanggulangan bencana, melaksanakan dukungan *Rebase*, *Replenishment*, dan *Rest or Recreation* untuk Operasi penanggulangan bencana.⁸⁸ Menurut kaidah komponen organisasi ketika dilaksanakan evaluasi terhadap ketercapaian visi dan misi organisasi tersebut, dapat ditarik kesimpulan apakah struktur organisasi harus dirombak atau tidak agar organisasi tersebut dapat berjalan lebih efektif. Dengan nilai di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi embarkasi sumberdaya Lantamal III tidak perlu dirombak karena sesuai dengan kaidah komponen organisasi.

Menurut John Prince Jones dalam Konsep Organisasi untuk meneliti komponen organisasi yaitu struktur, peralatan dan personel pengawak peralatan dalam organisasi yang merupakan sebuah sistem yang saling berhubungan, harus dilaksanakan secara keseluruhan untuk menghasilkan validitas hasil. Beranjak dari situ, dengan temuan sebelumnya, ketidakberhasilan pelaksanaan dukungan *Rebase*, *Replenishment*, dan *Rest or Recreation* untuk penanggulangan bencana dikarenakan ketidaksiapan sarana dan prasarana pendukung Lantamal III dalam penanganan bencana. Dalam hal ini memang terdapat

⁸⁷ Wawancara dengan Asops Danlantamal III, di Jakarta

⁸⁸ Wawancara dengan Asops Danlantamal III, di Jakarta

ketimpangan dalam organisasi embarkasi Lantamal III, namun pada pelaksanaannya secara keseluruhan embarkasi sumberdaya tersebut dapat berjalan dengan baik.

4.2.3 Analisis Sarana Embarkasi Lantamal III

Dari hasil evaluasi dengan menggunakan ukuran dari masing-masing tingkat kesiapan adalah sangat tidak siap, tidak siap, cukup siap, siap, dan sangat siap. Ukuran ini ditafsirkan dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber seperti kata-kata yang mirip dan dapat mewakili bentuk kesiapan yang dimaksud (Lihat Tabel 4.10). Dapat diketahui bahwa secara umum sarana Lantamal III tidak siap. Hal yang masih harus diperbaiki adalah dermaga baru (450 x 10 m) yang masih belum operasional, jarak antara gudang dan dermaga yang jauh serta tidak ada akses langsung ke dermaga sehingga menyulitkan mobilitas embarkasi, kemampuan peralatan di bengkel permesinan (60 x 23 m) yang masih sangat terbatas sehingga hanya mampu melakukan perbaikan pada mesin-mesin kapal berukuran kecil, bengkel listrik (23 x 10,3 m) yang memiliki peralatan sangat terbatas, dermaga operasional lama yang kurang siap, dermaga KAL yang perlu diperbaiki, dermaga *beaching* yang kurang optimal, dock kapal 1 yang perlu diremajakan, bengkel perkapalan 1 (41 x 33,3 m) yang sudah tua, gudang perbekalan umum III (60 x 20 m) yang perlu diperbaiki, fasilitas perawatan personil yang masih terbatas, mobil genset MAN, 380 V, 500 KVA dan mobil genset Mercedes 440 V 400 KVA serta genset permanen Mercy 380 V 500 KVA yang masih kurang cukup bagi kebutuhan Lantamal.

Tabel 4.10 Kesiapan Sarana Fisik Lantamal III

No	Bentuk Kesiapan Sarpras	Penilaian	
		Tingkat	Skala
1	2	3	4
1	Menyandarkan dan melepaskan 4 KRI jenis Parchim, PK atau 2 KRI PKR + 1 PK	Tdk Siap	1
2	Menyandarkan dan melepaskan berbagai jenis kapal	Tdk Siap	1
3	Menyandarkan dan melepaskan 4 KAL	Tdk Siap	1

1	2	3	4
4	Menyandarkan dan melepaskan KRI AT tipe Frosch; bongkar muat ranpur dan perbekalan tempur	Tdk Siap	1
5	Docking kapal < 50 gross ton	Ckp Siap	3
6	Docking kapal < 500 gross ton	Krg Siap	2
7	Perbaikan dan Perawatan badan kapal	Tdk Siap	1
8	Perbaikan dan Perawatan badan kapal	Ckp Siap	3
9	Perbaikan mesin kapal	Ckp Siap	3
10	Perbaikan dan perawatan peralatan elektronika ringan	Sgt Siap	5
11	Mendukung perbekalan unsur, personel, dan material	Krg Siap	2
12	Penyimpanan bahan bakar	Siap	4
13	Pengisian unsur-unsur	Ckp Siap	3
14	Pengisian unsur-unsur	Siap	4
15	Menampung peralatan perbekalan dan menampung minyak lincir atau pelumas dalam kemasan drum	Siap	4
16	Menampung perbekalan umum	Ckp Siap	3
17	Menampung perbekalan umum	Siap	4
18	Menampung perbekalan umum	Tdk Siap	1
19	Fasilitas Perawatan Personel	Tdk Siap	1
20	Fasilitas Pembinaan Pangkalan	Ckp Siap	3
21	Sumber listrik utama	Ckp Siap	3
22	Kesiapan cadangan listrik	Tdk Siap	1
23	Kesiapan Cadangan listrik	Siap	4
24	Kesiapan cadangan listrik	Tdk Siap	1
25	Dukungan darurat bagi kapal yang sandar	Ckp Siap	3
	Rata-rata	Kurang	2,48

Sumber: Hasil Wawancara dengan Narasumber Lantamal III (diolah Peneliti, 2013)⁸⁹

Hasil dari evaluasi dapat dijelaskan bahwa kesiapan sarana fisik Lantamal III Jakarta, masih kurang, yang disebabkan oleh belum tersedianya infrastruktur yang memadai.

Untuk mengurangi jatuhnya korban jiwa akibat bencana, maka peran TNI AL dalam mendukung pergeseran logistik bantuan dirasakan sangat penting. Keberhasilan pencapaian kapal-kapal TNI AL pembawa logistik dan sukarelawan dengan waktu yang cepat dan ketepatan jenis logistik bantuan yang dikirim tergantung pada embarkasi Lantamal III dan keberhasilan dari embarkasi itu berkaitan erat dengan kesiapan sarana yang dimiliki oleh Lantamal III sebagai pangkalan awal dalam pemuatan logistik bantuan. Komponen sarana mendeskripsikan pembagian sarana menjadi dua kelompok, yaitu sarana fisik dan non fisik. Komponen sarana fisik di Lantamal III mencakup fasilitas labuh, fasilitas perbaikan, fasilitas

⁸⁹ Wawancara dengan Kadisfaslan, Kafasharkan, Kadisbek dan Dandenma Lantamal III, di Jakarta

perbekalan, fasilitas perawatan personil, dan fasilitas pembinaan pangkalan. Dukungan sarana fisik sangat penting pada konteks embarkasi, namun kesiapan sarana Lantamal III belum memadai,⁹⁰ seperti pada fasilitas labuh; dermaga yang belum siap operasi karena kedangkalan air di sekitarnya, dermaga operasional yang sebenarnya milik Pelindo terletak tepat di belokan yang ramai lalu lintas pelayaran dan dermaga beaching yang siap terbatas. Kemampuan peralatan di bengkel permesinan (60 x 23 m) yang masih sangat terbatas sehingga hanya mampu melakukan perbaikan pada mesin-mesin kapal berukuran kecil, bengkel listrik (23 x 10,3 m) yang memiliki peralatan sangat terbatas, dock kapal 1 yang perlu diremajakan, bengkel perkapalan 1 (41 x 33,3 m) yang sudah tua, gudang perbekalan umum III (60 x 20 m) tidak dapat digunakan karena jauhnya akses menuju dermaga embarkasi dan ketidaksiapan gudang itu sendiri sebagai tempat penampungan barang-barang bantuan karena penuh dengan barang-barang dinas Lantamal III sehingga menggunakan *Tank deck* KRI yang belum berangkat sebagai gudang sementara. Fasilitas perawatan personil yang masih terbatas, mobil genset MAN, 380 V, 500 KVA dan mobil genset Mercedes 440 V 400 KVA serta genset permanen Mercy 380 V 500 KVA yang masih kurang cukup bagi kebutuhan Lantamal.

Sementara itu, komponen sarana informasi atau non fisik mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan embarkasi, organisasi yang spesifik menangani bencana alam, kesamaan wilayah kontrol, dan koordinasi dengan instansi-instansi terkait. Penelitian ini menunjukkan bahwa sarana informasi Lantamal III belum siap karena adanya ketidakjelasan dalam koordinasi yang diharapkan, hirarki organisasi yang spesifik menangani bencana alam

⁹⁰ Wawancara dengan Solehudin, Kadis Faslan Lantamal III, Kadisyahal Lantamal III, Kafasharkan Lantamal III, Kadisbek Lantamal III, Dandenma Lantamal III, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD DKI, Kasatkom Lantamal III, Kasubsi Perangkat Komunikasi Basarnas

belum ada, belum ada briefing secara intern organisasi, perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan embarkasi yang belum siap.⁹¹

Pada pelaksanaan embarkasi, sarana merupakan hal yang penting untuk mendukung pelaksanaannya. Keberadaan sarana sangat mempengaruhi kelancaran embarkasi karena dalam konteks ini sarana menjadi sesuatu yang dapat memudahkan pencapaian keberhasilan pelaksanaan embarkasi tersebut. Dalam Konsep Pangkalan, TNI AL mendefinisikan sarana sebagai tempat penampungan sementara barang maupun kapal yang akan dibawa ke tempat lain. Namun kenyataannya sarana yang dimiliki oleh Lantamal III tidak dapat memenuhi kriteria tersebut dikarenakan keterbatasannya, baik sarana fisik maupun sarana non fisik. Sehingga Lantamal III, dari aspek sarana tidak dapat melaksanakan fungsi penerimaan bantuan, fungsi perlindungan dan pemberi dukungan logistik. Dikatakan pada Konsep Pangkalan bahwa sangat perlu bagi sebuah pangkalan memiliki kekuatan infrastruktur yang lebih tangguh bagi wilayah sekitarnya, belum terpenuhi oleh Lantamal III.

4.2.4 Analisis sarana informasi

Sarana informasi dibutuhkan untuk mengkoordinasikan seluruh unsur. Kesiapan sarana informasi yang tersedia dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut: Ukuran dari masing-masing tingkat kesiapan adalah sangat tidak siap, tidak siap, cukup siap, siap, dan sangat siap. Ukuran ini ditafsirkan dari hasil wawancara seperti kata-kata yang mirip dan dapat mewakili bentuk kesiapan yang dimaksud.

Tabel 4.11 Kesiapan Sarana Informasi Lantamal III

No	Komponen	Bentuk Kesiapan Embarkasi	Penilaian	
			Tingkat	Skala
1	Proses Pelaksanaan Formal	Perencanaan embarkasi	Tdk Siap	1
2		Pengorganisasian embarkasi	Tdk Siap	1
3		Pelaksanaan embarkasi	Tdk Siap	1

⁹¹ Wawancara dengan Kasatkom Lantamal III, Kasubsi Perangkat Komunikasi Basarnas, di Jakarta

1	2	3	4	5
4		Pengawasan pelaksanaan embarkasi	Siap	4
5	Hirarki	Organisasi yang spesifik menangani bencana alam	Tdk Siap	1
6	Aturan Koordinasi	Kesamaan wilayah kontrol	Krg Siap	2
7	Strategi Pembagian Pengetahuan	Koordinasi dengan instansi-instansi terkait	Krg Siap	2
Rata-rata			Kurang	1,714

Sumber: Hasil Wawancara dengan Kasatkom Lantamal III (diolah Peneliti, 2013)

Dari hasil evaluasi, diketahui bahwa secara umum Lantamal III belum siap dari segi sarana informasi, karena belum dilengkapi dengan organisasi yang secara khusus menangani penanggulangan bencana alam. Hal yang masih harus diperbaiki adalah masih adanya ketidakjelasan dalam koordinasi yang diharapkan, hirarki organisasi yang spesifik menangani bencana alam belum ada, belum ada briefing secara intern organisasi yang dibentuk dan mengatur pembagian tugas ketika pelaksanaan embarkasi, perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan embarkasi yang belum siap setiap saat. Kondisi ini juga dijelaskan oleh seorang narasumber yang mengatakan bahwa ketidaksiapan kordinasi dengan instansi lain yang terlibat dalam embarkasi dikarenakan tidak ada briefing yang mengatur peran setiap personil yang terlibat dalam embarkasi, hal itu juga karena kondisi orang-orang dan instansi lain yang memberikan bantuan datang silih berganti dan tidak berinteraksi secara intens dengan personil embarkasi Lantamal III.⁹²

Kendala terkait aspek komunikasi juga diketengahkan oleh narasumber lain yang mengatakan bahwa kesulitan yang terjadi antara pihak Lantamal III dengan instansi yang memberikan bantuan dan masyarakat karena kesulitan kordinasi yang tidak dapat diciptakan sepenuhnya. Kesulitan itu tidak menjadi kendala yang besar karena

⁹² Wawancara dengan Natsir Huseng Liwang, Kasubsi Perangkat Komunikasi Basarnas, 24 Desember 2013, di Jakarta

Lantamal III bisa mengatasi dengan jalan membuka posko yang sedikit banyak dapat memberikan penjelasan.⁹³

Hal ini juga ditekankan dalam hasil wawancara dengan Eddy Sucipto Asisten operasi Lantamal III Jakarta, mengatakan:

“Salah satu risiko yang paling penting dalam tugas penanggulangan bencana alam yang dihadapi oleh Lantamal III adalah ketika bencana alam terjadi di dua lokasi sekaligus, apalagi jika Lantamal III sendiri menjadi lokasi bencana tersebut. Seperti dalam banjir rob kemarin, kita berharap tidak terjadi bencana alam di tempat lain, karena prajurit diarahkan untuk mengatasi masalah banjir tersebut. Banjir itu menyebabkan fungsi Lantamal III terganggu dan masyarakat juga kesulitan. Jadi prajurit diarahkan ke masyarakat untuk membantu, tetapi jika ada bencana di tempat lain yang membuat Lantamal III harus mendukung KRI, maka sarana yang ada tidak mencukupi.”

Selain itu, dikatakan pula kalau: “Sementara kita belum punya struktur khusus yang menangi penanggulangan Bencana, maka kita harus melihat bencana sebagai bentuk operasi sebagaimana bentuk operasi yang lain dan ada banyak bentuk operasi lain selain Operasi penanggulangan bencana.”

4.3 Analisis Pelaksanaan Embarkasi Sumberdaya

4.3.1. Analisis berdasarkan Teori Sinergitas

Embarkasi sumberdaya yang dilakukan Lantamal III merupakan tugas yang melibatkan instansi lain yang terkait di dalam konteks penanggulangan bencana, seperti BNPB, Basarnas, dan orang-orang dari berbagai disiplin ilmu yang menjadi sukarelawan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana. Pelaksanaan embarkasi

⁹³ Wawancara dengan Iwan P. Samosir, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD DKI, 24 Desember 2013

dikerjakan bersama-sama dan masing-masing bersinergis untuk meraih pencapaian positif. Keberhasilan dari embarkasi ini terjadi ketika koordinasi dan kerjasama serta saling mempercayai terjalin antara semua aktor yang terlibat di dalamnya. Hal itu merupakan syarat utama seperti pola *Synergistic* yang terdapat dalam Teori Sinergitas. Dari wawancara penelitian ini,⁹⁴ dapat dilihat bahwa interaksi antara aktor yang terlibat embarkasi menunjukkan indikasi tersebut. Sehingga kondisi sinergitas ini dapat menutupi kelemahan pelaksanaan embarkasi dalam aspek sarana.⁹⁵ Walaupun terlihat masih ada kekurangan koordinasi, hal itu disebabkan oleh donatur diluar organisasi bencana,⁹⁶ tetapi dapat segera diatasi anggota di lapangan.

Keberhasilan kerjasama yang bersinergis secara berkelompok ini juga menunjukkan terlaksananya Konsep Kampanye Militer saat pelaksanaan embarkasi sehingga menimbulkan efek positif terhadap stabilitas nasional, karena pemerintah dianggap mampu mengatasi bencana yang terjadi di wilayah negara. Keberhasilan embarkasi tentu saja akan mensupport mobilisasi sumberdaya dengan cepat dan tepat, itu yang menjadi alasan sehingga Konsep Kampanye Militer terlaksana baik.

Pelaksanaan organisasi embarkasi sesuai dengan prinsip manajemen kedaruratan, yaitu Terpandu Risiko dikarenakan adanya upaya untuk mengurangi jumlah korban dengan jalan melakukan embarkasi logistik bantuan kepada korban bencana alam. Juga terdapat integrasi dan kolaborasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya sehingga tercipta koordinasi antara pihak Lantamal III dengan personil instansi tersebut. Disamping itu, embarkasi sumberdaya yang dilakukan oleh Lantamal III dan instansi terkait, sudah menunjukkan pola manajemen yang dimulai dengan perencanaan, organisasi, pelaksanaan

⁹⁴ Wawancara dengan Kadisyahal Lantamal III Kakesbang Pemprov Jakarta Utara, Asops Danlantamal III, Komandan KRI Lemadang, Dansatkamla Lantamal III, Deputi Kesiapsiagaan BNPB, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD DKI, di Jakarta.

⁹⁵ Wawancara dengan Solehudin, Kadis Faslan Lantamal III, Kadisyahal Lantamal III, Kafasharkan Lantamal III, Kadisbek Lantamal III, Dandenma Lantamal III, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD DKI, Kasatkom Lantamal III, Kasubsi Perangkat Komunikasi Basarnas, di Jakarta

⁹⁶ Wawancara dengan Paban ops Lantamal III, Fathur, anggota Denma Lantamal III, di Jakarta

dan kontrol. Sehingga aspek ini jelas mendeskripsikan kapasitas positif dari embarkasi. Walaupun organisasi embarkasi sumberdaya Lantamal III itu dibentuk ketika terjadi bencana alam yang berskala nasional dan bukan merupakan organisasi yang terstruktur pada organisasi Lantamal III sendiri, namun organisasi embarkasi dinilai cukup mampu melaksanakan kegiatan tersebut. Adapun kekurangannya adalah dari segi sarana yang dimiliki Lantamal III berupa fasilitas fisik dan fasilitas non fisik.⁹⁷ Manajemen kedaruratan yang memiliki empat fase dan telah terpenuhi oleh embarkasi dalam tiga fase, yaitu mitigasi, kesiapan, respon dan pemulihan sehingga tujuan dari manajemen kedaruratan untuk mengurangi jumlah korban, meringankan penderitaan, stabilisasi kondisi korban terpenuhi dengan baik.

4.3.2 Analisis Berdasarkan Teori Manajemen

4.3.2.1 Perencanaan Embarkasi (*Planning*)

Merupakan tahap persiapan penanggulangan bencana khususnya embarkasi logistik dan personil dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:⁹⁸ (1) Membentuk Satgas Embarkasi Lantamal III yang terdiri dari personil dari kompartemen yang dinilai memiliki kemampuan dalam pelaksanaan embarkasi. Personil tersebut berasal dari Staf Operasi, Staf Logistik, Staf Personil, Satmarhanlan, Sintel, Pomal dan Denma Lantamal III; (2) Memberi perintah kepada Kadis Syahal agar berkordinasi dengan Pelindo dalam rangka memudahkan KRI yang akan sandar dan lepas ketika proses embarkasi sumberdaya; (3) Berkordinasi dengan Kolinlamil untuk peminjaman Marsailing area yang nantinya digunakan untuk menampung relawan yang akan dikirim menggunakan KRI ke daerah bencana; (4) Membuka Posko penerimaan bantuan bencana; (5) Kordinasi dengan Koarmabar mengenai KRI yang akan

⁹⁷ Wawancara dengan Kafasharkan Lantamal III Jakarta, Kadisbek Lantamal III, Kadis Faslan Lantamal III, Kadisyahal Lantamal III, KRI Lemadang, Deputi Kedaruratan BNPB, Dansatkamla Lantamal III, LSM Pos Keadilan Peduli Umat

⁹⁸ Wawancara dengan Kolonel Laut (P) Eddy Sucipto, Asops Danlantamal III, 2 September 2013

digunakan untuk embarkasi; dan (6) Kordinasi dengan BNPB terkait masalah embarkasi.

Perencanaan embarkasi diawali dengan membentuk Satgas Embarkasi, setelah para personil dari berbagai kompartemen ini mendapat surat perintah, mereka langsung digerakkan dalam rangka mendukung pelaksanaan embarkasi. Kondisi ini sesuai dengan narasumber yang menyatakan bahwa:

“Satgas embarkasi terdiri dari berbagai kompartemen dengan tujuan agar mempermudah pelaksanaan embarkasi. Lantamal III memang belum memiliki Satgas Embarkasi secara tetap, selama ini pelaksanaannya bersifat insidental, jika ada kejadian baru pelaksanaan penanggulangan bencana.”⁹⁹

Disamping itu, Lantamal bertugas menyiapkan KRI untuk melaksana tugas operasi, dalam hal ini adalah menyiapkan perbekalan, personil dan dukungan yang dibutuhkan dalam operasional. Sebagai pangkalan, Lantamal III mempunyai fasilitas embarkasi, meliputi dermaga di Pondok Dayung, gudang-gudang di daerah Sunter, *marshalling area* yang seharusnya ada tapi sampai saat ini belum terdukung. Begitu juga dengan dermaga yang belum layak karena sarana dan prasarana tidak lengkap serta posisinya yang sulit untuk melaksanakan embarkasi.

Setelah mendapatkan surat perintah, masing-masing bidang membuat perencanaan internal yang berguna sebagai acuan dalam melaksanakan perencanaan embarkasi. Hal ini ditegaskan oleh seorang narasumber yang mengatakan bahwa:

“Perencanaan perbidang itu sangat penting untuk lebih memperjelas tugas pada bidang masing-masing karena kita harus jeli melihat perkembangan kondisi yang ada. Seperti tugas Syahal Lantamal, kami harus mengetahui kapal-kapal niaga yang akan keluar dan masuk sehingga kami dapat mudah berkordinasi

⁹⁹ Wawancara Prasetyo, Kadisminpers Lantamal III, 23 Desember 2013, di Jakarta

dengan Pelindo untuk dapat menggerakkan KRI yang akan sandar dan berangkat nantinya.”¹⁰⁰

Perencanaan embarkasi sangat berguna untuk memperlancar pelaksanaan embarkasi. Sehingga dapat menganalisa kebutuhan dan langkah apa saja yang akan diambil pada saat pelaksanaan embarkasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan:

“Perencanaan itu berguna untuk memperjelas kegiatan yang kita hadapi. Disamping itu juga berguna untuk mengukur kekuatan sendiri dan mencari kelemahan sehingga dapat kita tutupi dengan segera.”¹⁰¹

Seorang narasumber mengatakan bahwa kelebihan militer terdapat pada bagaimana organisasi itu membuat strateginya diawali dengan perencanaan yang matang, seperti pada saat embarkasi yang di lakukan Lantamal III, perencanaan yang dilakukan dapat mengeliminir kesalahan dan kelemahan yang dimiliki sehingga mampu menyelesaikan tugas embarkasi dengan baik.¹⁰²

4.3.2.2 Pengorganisasian Embarkasi (*Organizing*)

Tujuan dari pengorganisasian adalah membantu dalam membuat tujuan menjadi bermakna dan berkontribusi bagi efisiensi organisasi.¹⁰³ Pengorganisasian embarkasi dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah proses pelaksanaan embarkasi. Pada pengorganisasian, dilakukan pekerjaan embarkasi secara bersama-sama. Pengorganisasian peran dan fungsi secara umum telah diatur sedemikian rupa dalam skala yang lebih luas, sehingga pembagian peran dan fungsi ini mampu memudahkan setiap pekerjaan penanggulangan bencana. Hal ini sesuai dengan narasumber yang mengatakan bahwa pengorganisasian pada

¹⁰⁰ Wawancara dengan Sutriyana, Kadisyahal Lantamal III, 23 Desember 2013, di Jakarta.

¹⁰¹ Wawancara dengan Eddy Sucipto, Asops Danlantamal III, 2 September 2013, di Jakarta

¹⁰² Wawancara dengan Heriyadi, Karyawan BNPB, 21 Desember 2013, di Jakarta

¹⁰³ Wehrich, H., Koontz, H. 2008. Major Principles or Guides for the Managerial Functions of Planning, Organizing, Staffing, Leading, and Controlling, hal. 3

embarkasi sangat membantu untuk mempermudah jalannya embarkasi sehingga setiap personil mengetahui tugas masing-masing.¹⁰⁴ Pernyataan itu ditegaskan oleh salah satu karyawan BNPB:

“Pemahaman akan apa yang akan dilakukan dalam penanggulangan bencana tiap personil meningkat pada saat embarkasi, karena telah diorganisasikan dan direncanakan dalam penanggulangan bencana tersebut oleh perwira embarkasi sesuai tugas masing-masing.”¹⁰⁵

Ketika terjadi bencana secara tiba-tiba, Lantamal III Jakarta mengorganisasikan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana yang dibentuk untuk mengkoordinir dukungan logistik, personil dan sumberdaya yang diembarkasi, bekerjasama dengan Koarmabar dan Kolinlamil. Satuan Tugas Embarkasi itu sudah melekat di dalam setiap operasi yang dilakukan oleh Lantamal, sebagai sebuah keharusan yang berguna untuk mendukung pelaksanaan operasi. Jadi operasi apapun yang digelar, Satgas embarkasi itu akan melaksanakan tugasnya, akan tetapi memang untuk tugas penanggulangan bencana tentu saja jumlah personil akan ditambahkan karena melihat banyaknya logistik dan sumberdaya yang akan diembarkasi. Kondisi itu sesuai dengan narasumber yang mengatakan bahwa penambahan jumlah personil embarkasi sangat sangat tergantung dengan kuantitas sumberdaya yang akan digeser melalui KRI. Namun demikian, penambahan personil itu hanya pada bidang pengangkutan sumberdaya bukan pada tim embarkasi yang telah dibentuk.¹⁰⁶

Pengorganisasian tim embarkasi dilakukan dengan cepat ketika satgas penanggulangan bencana dibentuk, hal ini dilakukan karena organisasi embarkasi bersifat sementara dan bukan merupakan bagian dari struktur organisasi Lantamal III. Hal ini sesuai dengan pernyataan

¹⁰⁴ Wawancara dengan Fathur, anggota Denma Lantamal III, 2 September 2013, di Jakarta

¹⁰⁵ Wawancara dengan Hairil, anggota Denma Lantamal III, 3 September 2013, di Jakarta

¹⁰⁶ Wawancara dengan Rulli Riono, Paban ops Lantamal III, 2 September 2013, di Jakarta

narasumber yaitu: “Sementara ini Lantamal belum mempunyai buku petunjuk tentang penanggulangan bencana maka organisasi embarkasi tersebut belum ada. Satgas Penanggulangan Bencana tersebut yang akan menyusunnya.”¹⁰⁷

4.3.2.3 Pelaksanaan Embarkasi (*Actualize*)

Setelah melewati fase perencanaan dan pengorganisasian, dilanjutkan dengan pelaksanaan embarkasi dengan pertimbangan bahwa kesiapan personil, organisasi dan sarana pangkalan yang diperlukan telah sesuai dengan perencanaan awal. Kadis Syahal mengkoordinasikan dermaga yang digunakan agar dikosongkan untuk persiapan masuknya KRI yang terlibat operasi penanggulangan bencana.

Dermaga yang digunakan adalah dermaga *beaching*. Dermaga ini digunakan dengan alasan bahwa KRI yang digunakan adalah jenis LST (*Landing Ship Tank*) yang memiliki kemampuan untuk *beaching* (memantai) dan hal ini akan memudahkan pelaksanaan embarkasi karena *bow door* dan rampah kapal akan dibuka sehingga logistik bantuan dapat langsung diarahkan ke dalam Tank deck kapal. *Landing Ship Tank* merupakan kapal logistik yang dirancang khusus mengangkut barang dan manusia dan melakukan pendaratan langsung. Disamping itu LST memiliki kemampuan melakukan operasi *beaching* dan operasi pindah.¹⁰⁸

Beberapa KRI telah standby ketika logistik dan personil masuk ke dalam kapal tersebut. Dansatgas embarkasi berkordinasi dengan perwira muat KRI untuk memudahkan embarkasi logistik sesuai dengan kondisinya.

¹⁰⁷Wawancara dengan Eddy Sucipto, Asops Danlantamal III, 2 September 2013, di Jakarta

¹⁰⁸ Operasi pindah adalah pemindahan muatan baik melalui lambung maupun rampah dari KRI jenis LST yang tidak dapat memantai atau merapat ponton ke sarana/kapal angkut yang dapat melaksanakan pemantaian yang selanjutnya mendaratkan muatan ke pantai



Gambar 4.9 Proses Embarkasi

Sumber: Lantamal III, 2013



Gambar 4.10 Proses Embarkasi

Sumber: Lantamal III, 2013

Penyusunan barang-barang bantuan itu tidak bisa diletakkan begitu saja, tetapi disusun sesuai dengan berat dan diameternya. Disinilah dibutuhkan peranan perwira muat KRI yang memimpin embarkasi di dalam KRI, khususnya pada saat menyusun barang-barang bantuan

tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber bahwa kordinasi antara organisasi embarkasi dengan perwira muat KRI sangat penting untuk memudahkan penyusunan barang bantuan karena perwira muat KRI mengetahui spesifikasi kapal dan tanck deck kapal dimana barang tersebut akan diletakkan.¹⁰⁹ Lantamal III bekerjasama dengan BNPB membuka Posko yang bertugas menerima bantuan dari masyarakat dan organisasi lainnya. Setelah ada pengumuman resmi dari Mabesal, maka Posko penerimaan bantuan mulai aktif dan penyumbang segera mendatangi Mako Lantamal III. Namun guna memudahkan proses mobilitas bantuan, penyerahan langsung diarahkan ke dermaga karena gudang Lantamal III jauh dari dermaga embarkasi. Kondisi tersebut menjadi kendala bagi pihak yang memberikan bantuan karena tidak tahu posisi dermaga tersebut, sesuai dengan narasumber yang mengatakan bahwa:

“Kita mengirim bantuan bencana melalui Lantamal III Jakarta, setelah kita hubungi kantornya kita diarahkan membawa barang-barang itu langsung ke dermaga tidak ke kantor Lantamal, kami tidak tahu letak dermaga setelah kordinasi ada anggota Lantamal yang antar kami ke sana.”¹¹⁰

Banyaknya jumlah barang bantuan dari penyumbang korban bencana ditumpukkan di dermaga menjadi berantakan, apalagi masih menunggu kesiapan KRI yang akan membawanya. Kondisi itu menjadi parah karena adanya penyumbang yang meletakkan saja barang-barang tersebut di dermaga. Seperti pernyataan narasumber bahwa:

“Barang bantuan itu tersebut diterima...ada donatur yang meletakkan tanpa kordinasi dulu letaknya, sehingga letaknya tidak tertata dengan dengan baik. Hal tersebut menjadikan barang sering

¹⁰⁹ Wawancara dengan Nizar Khadafi, Komandan KRI Lemadang, 24 Desember 2013, di Jakarta

¹¹⁰ Wawancara dengan Betu Pasifik, Kakesbang Pemprov Jakarta Utara, 23 September 2013, di Jakarta

dipindah-pindah, karena tidak tersedia gudang di dermaga, barang hanya disusun dulu saja.”¹¹¹

Kondisi tersebut akan membuat barang-barang yang penempatannya tidak berdasarkan jenis barang, mudah rusak dan terpengaruh dengan barang-barang yang lain menjadi yang mudah rusak atau rentan terhadap cuaca.

“Ya hanya kotak-kotak yang tidak diberi nama dan jenis barang, akibatnya penggolongan barang-barang saat mau dimasukkan ke dalam kapal jadi masalah.”¹¹²

Kendala gudang dapat diatasi dengan jalan menggunakan KRI sebagai gudang untuk menampung sementara barang-barang bantuan tersebut sebelum barang-barang bantuan itu dipindahkan ke KRI yang lain.

“Kekurangan sarana penyimpanan logistik bantuan diatasi oleh Lantamal III pakai kapal perang yang lain sebagai gudang. Memang jadi repot pindah-pindah barang tapi setidaknya buat barang bantuan itu tidak rusak kena hujan.”¹¹³

Walaupun demikian, solusi tersebut ternyata tidak mampu menjawab persoalan secara signifikan. Hal itu terjadi ketika kapal yang telah penuh dengan barang-barang bantuan harus berangkat menuju daerah yang terkena dampak bencana, drastis kapal yang menjadi gudang sementara harus disiapkan berangkat pula. Akibatnya, barang-barang yang berada di dalam kapal kembali harus dibongkar untuk dilaksanakan penyusunan. Hal itu menyebabkan terjadi dua kali pekerjaan dan tentu saja membuat barang-barang tersebut menjadi rusak, apalagi barang-barang yang bersifat sensitif. Kondisi tersebut semakin parah

¹¹¹ Wawancara dengan Fathur, anggota Denma Lantamal III, 2 September 2013, di Jakarta.

¹¹² Wawancara dengan) Rulli Riono, Paban ops Lantamal III, 2 September 2013, di Jakarta

¹¹³ Wawancara dengan Tri Budiarto, Deputi Kedaruratan BNPB, 23 September 2013, di Jakarta

tatkala cuaca pada saat itu tidak mendukung. Hal itu sesuai dengan narasumber yang mengatakan bahwa:

“Yang mencemaskan kalau terjadi hujan. Barang-barang bisa rusak, sehingga harus benar-benar waspada dan mempertimbangkan kecepatan bekerja untuk memuat barang ke kapal.”¹¹⁴

Kondisi keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Lantamal III Jakarta berpengaruh negatif pada pihak yang memberi bantuan dan menjadi pertimbangan karena khawatir barang-barang bantuan yang mereka kirim rusak.¹¹⁵ Hal ini sesuai dengan narasumber yang mengatakan bahwa:

“Barang bantuannya berasal dari orang-orang yang mendonornya...ya, karena hari hujan dan kita tidak bisa menaruhnya di gudang karena dermaga Lantamal tidak punya gudang akhirnya kita tutupi pakai terpal saja. Memang tidak banyak yang rusak tapi kita khawatir obat-obatan yang kita bawa jadi rusak.”¹¹⁶

Disamping itu, Satgas tersebut memilih barang bantuan sesuai jenis dan mengatur material-material untuk penanggulangan bencana berdasar fungsi serta tujuan distribusinya. Prioritas barang sangat diperlukan, untuk itu maka barang-barang itu dipisahkan sesuai peruntukan. Apabila ada barang yang bersifat *urgen* dan harus segera dikirim, maka Satgas Embarkasi akan berkordinasi dengan TNI AU yang berada di Halim sehingga barang tersebut dapat dikirim dengan pesawat TNI AU.

¹¹⁴ Ibid

¹¹⁵ Wawancara dengan Dovian Isjafrin, Dansatkamla Lantamal III, 24 Desember 2013, di Jakarta

¹¹⁶ Wawancara dengan Subur, LSM Pos Keadilan Peduli Umat, 23 September 2013, di Jakarta

“Kita kerjasama dengan TNI AU di Halim..kalo ada barang-barang yang mendesak harus kita kirim langsung kita kordinasikan ke sana.”¹¹⁷

Pelaksanaan Embarkasi ini masih terdapat terkendala dengan pengetahuan personil mengenai material penanggulangan bencana, serta komunikasi dengan lokasi bencana sehingga sering kali barang yang dibutuhkan tidak sesuai dengan yang dikirim dari Satgas Penanggulangan Bencana. Walaupun demikian, kendala tersebut dapat diatasi dengan kerjasama yang dibangun dengan personil dari BNPB yang terlibat embarkasi sehingga penggolongan barang-barang bantuan sesuai karakteristik dan jenisnya dapat dilakukan. Sinergitas yang terjalin tersebut tentu saja sangat berharga untuk memudahkan pelaksanaan embarkasi. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh seorang narasumber bahwa anggota Lantamal III yang terlibat embarkasi memiliki kemampuan dan semangat yang dapat diandalkan terutama loyalitas mereka terhadap atasannya. Hal itu yang dapat memudahkan pelaksanaan embarkasi barang-barang bantuan.¹¹⁸

Seorang narasumber menegaskan pernyataan di atas bahwa:

“Fasilitas memang kurang tapi kekompakan anggota Lantamal bisa membuat embarkasi selesai dengan baik.”¹¹⁹

Kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan embarkasi membuat embarkasi menjadi lebih mudah dilaksanakan dan dapat menutupi kekuarangan dalam konteks sarana. Hal itu diakui oleh seorang narasumber yang mengatakan bahwa sinergitas dengan instansi lain adalah sesuatu yang sangat berharga untuk mencapai keberhasilan embarkasi.¹²⁰

¹¹⁷ Wawancara dengan Eddy Sucipto, Asops Danlantamal III, 2 September 2013

¹¹⁸ Wawancara dengan Doddy Ruswanto, Deputi Kesiapsiagaan BNPB, 21 September 2013

¹¹⁹ Wawancara Wawancara dengan Iwan P. Samosir, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD DKI, 24 Desember 2013

¹²⁰ Wawancara dengan Rulli Riono, Paban ops Lantamal III, 2 September 2013

4.3.2.4 Pengawasan Pelaksanaan Embarkasi (*Controlling*)

Pengawasan embarkasi dilakukan oleh Asops Lantamal III sebagai kordinator embarkasi. Dalam pengawasan embarkasi ini, dilakukan pula jalinan komunikasi yang bertujuan untuk menghubungkan bagian satu dengan lainnya. Di jaring komunikasi ini, Asop Lantamal III melakukan pengecekan personil dan material yang menjadi aktor embarkasi. Secara eksternal, komunikasi juga terjalin antara Lantamal III dengan BNPB, yaitu antara Asops Lantamal III, Katim Satgas Embarkasi dan anggota BNPB. Untuk pelaksanaan penanggulangan bencana, TNI AL memang berada di bawah komando BNPB, akan tetapi ketika pelaksanaan dan pengawasan embarkasi, secara total dilakukan oleh Lantamal III sehingga BNPB hanya bersifat berkordinasi saja. Hal ini bukan masalah bagi BNPB karena pada dasarnya BNPB sangat mengandalkan Lantamal III pada pelaksanaan embarkasi.

“Embarkasi itu ke kapalnya AL oleh anggota Lantamal. Kita berkordinasi saja, yang penting semuanya berjalan dengan lancar.”¹²¹

Pengawasan dilakukan dalam arti sebagai pengontrol logistik dan personil yang akan dikirimkan ke daerah yang terkena dampak bencana, dapat masuk sesuai rencana ke dalam KRI yang telah ditentukan. Dalam hal ini, Satgas Embarkasi juga harus berkordinasi dengan pihak KRI, dalam hal ini Perwira Muat KRI sehingga kekeliruan terkait jenis dan jumlah logistik bantuan serta personil relawan yang akan *on board* ke kapal tersebut tidak terjadi. Hal itu sesuai pernyataan narasumber bahwa:

“Semua barang dan orang yang akan dibawah ke daerah bencana didata di penjagaan kapal. Termasuk sukarelawan. Itu untuk memudahkan pengecekan.”¹²²

¹²¹ Wawancara dengan Doddy Ruswanto, Deputi Kesiapsiagaan BNPB, 21 September 2013, di Jakarta

¹²² Wawancara dengan Nizar Khadafi, Komandan KRI Lemadang, 24 Desember 2013, di Jakarta

Pengawasan ini sangat penting karena daya muat KRI harus dipastikan sehingga jumlah logistik yang embarkasi berada dalam jumlah yang cukup dan tidak berlebihan. Persoalan akan terjadi bila jumlah muatan berlebihan, dan bisa membuat kapal menjadi oleng dalam perjalanan. Apalagi kapal menuju daerah yang terkena dampak bencana, yang kemungkinan besar sedang mengalami kondisi cuaca buruk.

Pengawasan aktifitas embarkasi secara langsung terhadap barang apa saja yang diangkut KRI beserta masalah-masalah yang dapat terjadi dalam pengangkutan dilakukan secara berkelanjutan sehingga setiap barang yang masuk ke KRI tetap terpantau secara jumlah dan kondisi. Apabila terjadi hujan, maka embarkasi harus dihentikan sementara, karena air hujan dapat merusak kondisi barang yang akan dikirim ke daerah bencana. Penundaan embarkasi mutlak dilakukan karena demi menjaga kualitas barang yang akan dikirim. Disinilah peran penting Satgas Embarkasi untuk mengambil langkah berkordinasi dengan KRI untuk menghentikan *loading* barang ke kapal.

“Kita memang usahakan secepat mungkin embarkasinya sebisa mungkin. Tapi keselamatan barang juga utama, ya kalo memang harus berhenti karena hujan kita lakukan, tapi kalo bisa terus dengan gunakan terpal untuk menutupnya kita terus.”¹²³

Disamping itu, faktor keamanan harus benar-benar diperhatikan karena menyangkut kepastian jumlah barang yang akan dikirim oleh KRI. Satgas Embarkasi harus melakukan pengawasan dengan ketat terhadap kegiatan orang-orang yang tidak berkompeten. Hal ini sesuai dengan narasumber yang mengatakan bahwa organisasi embarkasi tidak bekerja sendiri karena didukung oleh departemen yang lain, dalam aspek pengamanan barang bantuan dilakukan oleh Sintel Lantamal dan Pomal Lantamal.¹²⁴ Walaupun masih terdapat kekurangan dalam konteks

¹²³ Wawancara dengan Eddy Sucipto, Asops Danlantamal III, 2 September 2013, di Jakarta.

¹²⁴ Wawancara dengan Dovian Isjafrin, Dansatkamla Lantamal III, 24 Desember 2013, di Jakarta.

kordinasi, namun organisasi Lantamal III dalam mendukung penanggulangan bencana, terutama pada aspek embarkasi, dapat dinilai cukup optimal karena pelaksanaan embarkasi yang dilakukan oleh Lantamal III telah sesuai dengan tahapan yang terdapat pada manajemen kedaruratan. Yang dimulai dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan kontrol.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Lantamal III Jakarta bertugas menyelenggarakan dukungan administrasi dan logistik bagi unsur-unsur Komando Armada RI Kawasan Barat dan unsur-unsur TNI AL lainnya serta melaksanakan pembinaan potensi maritim menjadi kekuatan pertahanan dan keamanan negara di laut, menyelenggarakan operasi keamanan laut secara terbatas serta tugas-tugas lainnya berdasarkan kebijakan Kasal. Selain melaksanakan tugas tersebut. Lantamal III Jakarta melaksanakan tugas penanggulangan diantaranya mendukung operasi penanggulangan bencana.

5.1.2 Untuk mendukung pelaksanaan operasi penanggulangan bencana, keterlibatan Lantamal III lebih sebagai pangkalan awal dalam aspek embarkasi serta distribusi logistik yang dilakukan melalui jalur laut. Namun demikian dalam pelaksanaannya Lantamal III Jakarta, berdasarkan hasil penelitian masih memiliki keterbatasan dari aspek kemampuan sarana pendukung yang belum siap dan personil yang belum memahami secara teknis operasi penanggulangan bencana serta organisasi yang dibentuk ketika terjadi bencana.

5.1.3 Dalam konteks personil, kemampuan SDM Lantamal III dalam melaksanakan embarkasi tergolong cukup siap. Secara detail, komponen yang tergolong sangat siap adalah disiplin keprajuritan; budaya organisasi rendah, dan konsep diri cukup siap.

5.1.4 Kesiapan organisasi Lantamal III dalam mendukung penanggulangan bencana alam tergolong cukup siap dilihat dari ketercapaian visi dan misi. Komponen yang tergolong cukup siap adalah kesiapan operasi secara keseluruhan untuk mendukung penanggulangan bencana. Komponen yang tergolong kurang siap adalah kemampuan menciptakan stabilitas laut ketika bencana, pelaksanaan dukungan

Rapair, Rebase, Replenishment, dan Rest or Recreation yang dirancang khusus untuk penanggulangan bencana. Namun secara keseluruhan, organisasi embarkasi Lantamal III dinilai kurang siap untuk melaksanakan tugas tersebut dalam rangkaian penanggulangan bencana.

5.1.5 Dukungan sarana Lantamal III yang terbagi menjadi dua bagian yaitu sarana fisik dan sarana non fisik untuk mendukung penanggulangan bencana alam tergolong tidak siap sehingga mempengaruhi pelaksanaan embarkasi sumberdaya yang dilakukan oleh Lantamal III.

5.1.6 Pelaksanaan embarkasi yang dilakukan oleh Lantamal III secara keseluruhan dapat dinilai kurang. Lantamal III kurang mampu dalam melaksanakan embarkasi sehingga pelaksanaan embarkasi belum dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat terjadi dikarenakan kerjasama dan sinergitas antara aktor-aktor yang terlibat pada tugas tersebut, belum terwujud secara optimal.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Teoritis

5.2.1.1 Pada teori sinergitas perlu ditambahkan tentang sinergitas antara elemen masyarakat sipil dan militer, sehingga akan dapat meningkatkan keterpaduan dalam menjalankan fungsi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan serta membangun keterpaduan dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaan.

5.2.1.2 Pada teori organisasi perlu dijelaskan secara nyata dan jelas, karena pada pelaksanaan di lapangan terkadang membuat bingung pelaksana untuk membedakan-membedakan perintah. Selain itu teori organisasi yang kurang jelas akan dapat menimbulkan persaingan tidak sehat antara pejabat yang satu dengan pejabat yang lainnya. Serta akan dapat menimbulkan pada tugas-tugas tambahan menjadikan tugas pokok dinomorduakan. Hal tersebut akan memberikan peluang timbulnya solidaritas karyawan kurang, karena adanya pegawai yang tidak saling

mengenal dan menimbulkan persaingan tidak sehat, karena masing-masing menganggap tugas yang dilaksanakannya yang penting.

5.2.1.3 Dengan melihat pada kondisi tersebut diharapkan ada penelitian lain yang sejenis yang membahas keterlibatan TNI khususnya TNI AL pada operasi penanggulangan bencana sampai pada pentahapan pasca bencana, dengan menggunakan pendekatan-pendekatan atau teori-teori yang relevan menyangkut kesiapan personel, sarana dan organisasi, sehingga melahirkan rekomendasi yang mutakhir untuk optimalisasi peran Lantamal III Jakarta dalam Penanggulangan Bencana.

5.2.2 Saran Praktis

5.2.2.1 Kemampuan SDM Lantamal III dalam mendukung penanggulangan bencana alam perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan seminar tentang bencana alam, atau kegiatan lainnya berupa *workshop*, baik tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, perlu dilaksanakan peningkatan kerjasama dan latihan rutin setiap tahun dengan melibatkan seluruh *stake holder* penanggulangan bencana maupun elemen masyarakat lainnya sehingga dapat dibangun komunikasi berkelanjutan untuk membangun kesiapan personel dalam menghadapi kemungkinan bencana yang terjadi.

5.2.2.1 Kesiapan organisasi Lantamal III dalam mendukung penanggulangan bencana alam dapat ditingkatkan dengan mencantumkan pernyataan khusus untuk bencana alam dalam aspek visi, misi, dan tujuan Lantamal III.

5.2.2.1 Untuk mendukung visi dan misi organisasi Lantamal III dalam hal pelaksanaan penanggulangan bencana alam, perlu diwadahi dengan membuat struktur organisasi khusus penanganan embarkasi dan penanggulangan bencana alam di Lantamal III seperti yang telah disarankan pada bab 4. Organisasi tersebut dapat dipimpin oleh seorang pejabat Kepala Sub Dinas Penanggulangan Bencana yang secara struktural berada di bawah Kadis Potmar. Untuk perancang kebijakan

tingkat Lantamal perlu diwadahi dengan satu jabatan Pabandya Penanggulangan Bencana yang bertanggung jawab di bawah Paban Ops Sops Lantamal. Untuk mengisi jabatan-jabatan ini, dapat ditempatkan perwira TNI AL yang memiliki kualifikasi khusus, misalnya perwira yang telah lulus Universitas Pertahanan jurusan *Disaster Management*.

5.2.2.1 Mengingat bahwa aspek sarana merupakan hal yang masih kurang di Lantamal III dalam hal penanggulangan bencana, maka pembangunan Lantamal III perlu ditingkatkan dengan desain yang komprehensif untuk mengoptimalkan fungsi dan tugasnya dalam Penanggulangan Bencana. Desain pembangunan Lantamal III harus mencakup sarana dan prasarana berupa: ketersediaan dermaga sandar dan dermaga *beaching* yang berdampingan; pergudangan yang mampu menampung bahan makanan, obat-obatan, pakaian, logistik cair, bahan padat seperti bahan bangunan, dan lain-lain; tempat berkumpul sementara bagi pasukan; serta peralatan embarkasi yang memadai. Melihat kondisi yang ada saat ini, maka perlu dipertimbangkan tentang relokasi Lantamal ke tempat yang lebih strategis agar pendirian sarana dan prasarananya sejalan dengan peningkatan kemampuan yang ingin dicapai.

5.2.2.1 Pengawasan merupakan salah satu fungsi penting untuk mempertanggungjawabkan dan menjamin terdistribusinya seluruh jenis bantuan korban bencana secara tepat arah dan tepat guna kepada yang berhak menerima. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan penanggulangan bencana perlu dibuat suatu format penerimaan dan penyaluran bantuan untuk mengontrol distribusi bantuan. Format tersebut berisi hal-hal mengenai asal bantuan atau pemberi bantuan, pengirim, pembawa, pendistribusi dan penerima, serta daerah asal dan daerah atau wilayah tujuan pengiriman bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agndal H, and Nilsson U (2006) "Generation of Human and Structural Capital: Lessons from Knowledge Management" *The Electronic Journal of Knowledge Management* Volume 4 Issue 2, pp 91 - 98, available online at www.ejkm.com, hal. 93.
- Alexey D Muraviev, SLOCs, 'Choke Points' and the Soviet Naval Cold War: The Maritime Communications Factor in Soviet Naval Strategy and Force Development, 1962-1992, 2007 King-Hall Naval History Conference Proceedings, hal. 199.
- Bakornas PB, 2005, *Manajemen Kedaruratan*, Jakarta.
- BNPB.2011. *Indeks Rawan Bencana Indonesia*. Jakarta.
- BNPB. 2007. *Data dan Informasi Bencana Indonesia*. Jakarta.
- BNPB. 2008. Peraturan Ka BNPB No 11 Tahun 2008 ttg Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. Jakarta
- BNPB. 2009. *Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010-2014*.
- Bolland, J.M., Wilson, J.V., 1994. Three Faces of Integrative Coordination: A Model of Interorganizational Relations in Community-Based Health and Human Services, *Health Services Research*.
- Eko Santoso. 2011. Intellectual Capital in Indonesia: The Influence of Financial Performance of Banking Industry, Doctoral Dissertation, University of Phoenix.
- Fasharkan. *Data kesiapan Lantamal Jakarta*. 2012.
- Frantzell, A. 2011. Human Security, Peacebuilding, and the Hazara Minority of Afghanistan: A Study of the Importance of Improving the Community Security of Marginalized Groups in Peacebuilding Efforts in non-Western Societies. Master Thesis.

- Huysman, M., Wulf, V. The role of Information Technology in building and sustaining the relational base of communities. In: *The Information Society (TIS)*, Vol. 21, No. 2, 2005.
- Ira M Levin. 2001. Five Windows Culture Assessment Framework. *Health Progress*, hal. 52; lihat juga penerapannya pada Departemen Pertahanan Australia oleh Carmel McGregor, 2012, The Review of Employment Pathways for APS Women in the Department of Defence. Australia Department of Defence.
- Jokowinarno, D.2009. Identifikasi Garis Pantai di Provinsi Lampung yang Rawan oleh Tsunami sebagai Akibat Letusan Gunung Krakatau. *Rekayasa: Jurnal Sipil dan Perencanaan*.
- Jokowinarno, D. 2011. Mitigasi Bencana Tsunami di Wilayah Pesisir Lampung. *Rekayasa: Jurnal Sipil dan Perencanaan*.
- Komando Armada Barat. Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut III (PPOP Lantamal III). Keputusan Panglima KOrmando Armada RI Kawasan Barat. 2013.
- Koarmabar. *Analisa daerah Operasi Armada Barat*. 2012.
- Koarmabar, *Organisasi dan Prosedur Armabar*, 2011.
- Laporan Akhir, 2009, *Telaahan Sistem Terpadu Penanggulangan Bencana di Indonesia, Buku 2 (hasil Survey)*.
- Maarif, S. 2010. Bencana dan Penanggulangannya: Tinjauan dari Aspek Sosiologis. *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*.
- Mardalis, 1995, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara.
- McCloskey, J., et al. 2008. Tsumani Threat in the Indian Ocean from a Future Megathrust Earthquake West of Sumatera. *Earth and Planetary Science Letter*.

- M.L. Lengnick-Hall et al. Strategic human resource management: The evolution of the field. *Human Resource Management Review* 19 (2009).
- Onedy Ariwibowo. 2010. Peran Budaya Organisasi: Studi Eksplorasi pada PT Simoplas. Skripsi. Universitas Diponegoro, abstrak.
- Osinga. F, 2005, *Science, Strategy, and War: The Strategic Theory of John Boyd*. PhD Dissertation. University of Leiden.
- Ooi Keat Gin, Penang (1786): First British Outpost in the Straits of Melaka, dalam *Southeast Asia: A Historical Encyclopedia*. Ed: Ooi Keat Gin, Santa Barbara: ABC Clío, 2004.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Panglima TNI Nomor: Perpang/15/IV/2008 tanggal 4 April 2008 Buku Petunjuk Operasi TNI Tentang Kampanye Militer.
- Ricardo A Flores, 2007. Improving the US Navy Riverine Capability: Lessons from the Colombian Experience. Master Thesis. Naval Postgraduate School.
- Robert J Willis, Wage Determinants: A Survey and Reinterpretation of Human Capital Earnings Functions, *Itandbook of Labor Economics, Volume L Edited by O. Ashenfelter and R. Layard* , 1986, Elsevier.
- SMERU, 2001, Otonomi Daerah dan Iklim Usaha: Temuan dari SMERU.
- Sri Najiyati, Rahmat Topo Susilo, 2011, *Sinergitas Instansi Pemerintah dalam Pembangunan*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketransmigrasian, Kemenakertrans, Jakarta.
- Sudarwan Danim, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sunarti, E. 2009. Evaluasi Penanggulangan Bencana di Indonesia: Lesson Learned 2006-2007. IPB.

- Sutarto, 2002, *Dasar-dasar Organisasi*, Gadjah Mada University Press.
- Thomalla, F., Larsen, R.K., Kanji, F., Naruchaikusol, S., Tapa, C., Ravesloot, B., Ahmed, A.K. 2009. *From Knowledge to Action: Learning to go the Last Mile*. Stockholm Environmental Institute.
- Waugh, W.L., Streib, G. 2006. Collaboration and Leadership for Effective Emergency Management. *Public Administration Review*.
- Wehrich, H., Koontz, H. 2008. Major Principles or Guides for the Managerial Functions of Planning, Organizing, Staffing, Leading, and Controlling.
- Winardi, 2003, *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*, Raja Grafindo Persada.
- Wong, L., Kolditz, T.A., Millen, R.A., Potter, T.M. 2003. *Why They Fight: Combat Motivation in the Iraqi War*. Strategic Studies Institute.
- Yasa, I.G.M. 2013. Analisis Pengaruh Budaya Organisasi dan Profesionalisme terhadap Kinerja Prajurit TNI AL di Lanal Palembang. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*.
- Yusnaldi, 2008. *Pengaruh Konsep Diri, Motivasi Kerja, Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Prajurit TNI AL Di Satuan Kapal Amphibi Komando Armada RI Di Kawasan Barat (SATFIBARMABAR)*.
- Wawancara dengan Sutriyana, Kadisyahal Lantamal III, 23 Desember 2013.
- Wawancara dengan Ikin Sodikin, Komandan Lantamal III, 23 September 2013.
- Wawancara dengan Yohanis Bassang, Paban Renum Srena Lantamal III, 23 Desember 2013.
- Wawancara dengan Solehudin, Kadis Faslan Lantamal III, 23 Desember 2013.
- Wawancara dengan Firman Noegraha, Asrena Danlantamal III, 2 September 2013.

Wawancara dengan Much. Richard , Wadan Lantamal III, 23 Desember 2013.

Wawancara dengan Sutrimo, LSM Tim Penanggulangan Bencana Indonesia, 3 September 2013.

Wawancara dengan Beto Pasifik, Kakesbang Pemprov Jakarta Utara, 23 September 2013.

Wawancara dengan Iwan P. Samosir, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD DKI, 24 Desember 2013.

Wawancara dengan Eddy Sucipto, Asops Danlantamal III, 2 September 2013.

Wawancara Prasetyo, Kadisminpers Lantamal III, 23 Desember 2013

Wawancara dengan Much. Richard , Wadan Lantamal III, 23 Desember 2013.

Wawancara dengan Anggit Mulyo Satoto, Kasubdit Jaga Pelatihan dan Standarisasi Basarnas, 22 Desember 2013.

Wawancara dengan Nizar Khadafi, Komandan KRI Lemadang, 24 Desember 2013.

Wawancara dengan Suhariyanto, Kafasharkan Lantamal III, 22 Desember 2013.

Wawancara dengan Fendy Guntoyo, Kadisbek Lantamal III, 24 Desember 2013.

Wawancara dengan Teddy Bernard, Dandenma Lantamal III, 24 Desember 2013.